

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JAKARTA

**(Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar
Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)**



Devi Tri Liana

4815116774

**Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2015

ABSTRAK

Devi Tri Liana. Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jakarta (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan). Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2015.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses penertiban dan pedagang kaki lima di Pasar Minggu. Hal ini terkait dengan permasalahan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat berdagang dan mengganggu ketertiban masyarakat. Penelitian ini juga memberikan hasil dari penertiban dan pembinaan aparatur terhadap pedagang kaki lima sehingga mereka dapat menerima untuk direlokasikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan beberapa langkah yang menjadi bagian dari metode penelitian, seperti penentuan waktu dan lokasi penelitian yang tepat, penentuan yang pantas menjadi subjek penelitian, dan teknik pengumpulan data yang diperlukan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak tiga belas orang yang terdiri atas Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu, Satgas Satpol PP Kelurahan Pasar Minggu, Satpol PP, POLRI, Dishub, dua orang masyarakat sekitar Pasar Minggu dan empat orang pedagang kaki lima yang telah direlokasikan. Konsep yang digunakan dalam penelitian terdiri dari perspektif Edwin Ray Guthrie mengenai behavioristik sebagai upaya memberikan pendidikan informal terhadap pedagang dan Robert K. Merton mengenai struktural fungsional sebagai keberterapan pedagang di lokasi penampungan.

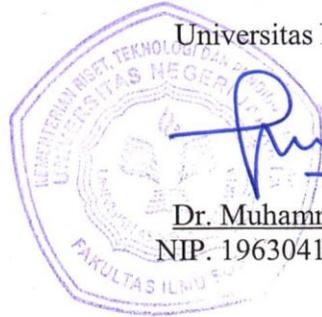
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidaktertiban akibat ketidakefektifan sistem yang dijalankan. Oleh karena itu, penertiban yang dilakukan dengan merelokasikan pedagang dan memberikan pembinaan dapat membuahkan hasil memuaskan. Pemandangan Pasar Minggu menjadi lebih terlihat tertib dan rapih. Penertiban dan pembinaan berlangsung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tahapan dari proses penertiban dan pembinaan tersebut dapat membuat para pedagang menjadi lebih memahami pentingnya ketertiban dalam berdagang. Penertiban dan pembinaan dilakukan selama setiap hari dengan tujuan agar dapat merubah pola pikir dan pola perilaku para pedagang. Peraturan Daerah dan peran dari aparatur yang terkait sangat berkontribusi besar dalam terciptanya ketertiban di Pasar Minggu.

Kunci: Penertiban, Keberterapan, Pedagang Kaki Lima

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si.
NIP. 19630412 199403 1 002

Nama	TTD	Tanggal
<u>Dr. Eman Surachman, MM</u> NIP. 19521204 197404 1 001 Ketua Sidang		30 - 11 - 2015
<u>Abdul Rahman Hamid, SH., MH.</u> NIP. 19740504 200501 1 002 Sekretaris Sidang		27 - 11 - 2015
<u>Rakhmat Hidayat, PhD.</u> NIP. 19800413 200501 1 001 Penguji Ahli		20 - 11 - 2015
<u>Ubedillah Badrun, M.Si.</u> NIP. 19720315 200912 1 001 Dosen Pembimbing I		27 - 11 - 2015
<u>Yuanita Aprilandini, M.Si.</u> NIP. 19800417 201012 2 001 Dosen Pembimbing II		25 - 11 - 2015

Tanggal Lulus: 4 November 2015

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Mimpi-mimpi kamu

Cita-cita kamu

Apa yang kamu kejar,

Biarlah ia menggantung, mengambang 5 cm di depan kening kamu,

Jadi ia nggak akan lepas dari mata kamu,

Dan kamu bawa mimpi dan keyakinan kamu itu setiap hari

Kamu lihat setiap hari dan percaya kamu bisa

(kutipan novel 5 cm)

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang tuaku yang aku cintai dan sayangi.

Terima kasih karena kalian telah mendidikku dengan baik, mengajarku dengan kesabaran dan membimbingku dengan penuh kasih sayang.

Terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar (Alm) Manto Miarjo atas dukungan, semangat dan doa kalian yang tulus.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jakarta”. Dengan studi kasus pedagang kaki lima di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu laporan penelitian yang merupakan bentuk tugas akhir yang ditempuh dalam memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muhammad Zid, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Jakarta.
2. Dr. Robertus Robert, MA selaku Ketua Jurusan Sosiologi
3. Abdi Rahmat, M. Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi
4. Rusfadia Saktiyanti Jahja, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi dan sekaligus merupakan dosen penguji SPS (Seminar Proposal Skripsi).
5. Ubedillah Badrun, M. Si selaku dosen pembimbing I, dan Yuanita Aprilandini, M. Si selaku dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik yang banyak serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis. Terima kasih juga telah meluangkan banyak waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. Eman Surachman, MM. selaku Pembimbing Akademis yang bersedia memberikan waktu dan perhatian kepada Peneliti selama menjadi mahasiswa, terima kasih banyak.
7. Segenap dosen dan staff pengajar pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis. Terima kasih banyak.
8. Kedua Kakakku Retno Handayani dan Ratna Dwi Purwanti, serta adik sepupuku Erna Mayasari, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pak Ariefuddin selaku staff bagian Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pasar Minggu dan Upiek Mardhawathy selaku staff bagian Kasi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Terima kasih karena kalian bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai, membantu memberikan informasi dan memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
10. Pak Maskut selaku Ketua PD Pasar Jaya, Pak Suryaman selaku Korlap Lokasi Binaan, Pak Hendra selaku Bendahara Lokasi Binaan. Terima kasih karena kalian bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai dan membantu memberikan informasi serta memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.
11. Pak Muhidin selaku Kasatgas Satpol PP di Kelurahan Pasar Minggu, Pak Suryadi selaku anggota Satpol PP, Pak Hadi selaku anggota Dinas Perhubungan Golongan 3A . Terima kasih karena kalian bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai dan membantu memberikan informasi serta memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.
12. Bu Hj. Neneng dan Ibu Sri (Mbak iik) selaku masyarakat di sekitar Pasar Minggu, serta keempat pedagang yang terdiri atas Ibu Endang (pedagang sayuran), Ibu Siti (pedagang mukena, sajadah, handuk dan lain-lain), Pak Muhammad (pedagang kelapa parut), Pak Khoiri (pedagang buah semangka dan melon). Terima kasih banyak karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk

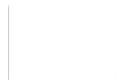
di wawancarai dan membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

13. Sahabat-sahabatku satu program studi, Eni Nurcahyati, Desi Pratama Sari, Chusnul Arvani, Siti Hanifay, Vina Ramadhani dan Devita Karlina yang selama ini memberikan masukan berupa kritik maupun saran dan semangat kepada penulis. Terima kasih untuk kebersamaan yang terjalin selama ini dalam senang maupun sedih.
14. Teman-teman satu PPL bareng, Annisa Fitriani, Asri Nurmanty, Ghea Giszelya, dan Mufty Adil, terima kasih telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga selama kurang lebih enam bulan mengajar bareng di SMAN 58 Jakarta.
15. Kawan-kawan seperjuangan Pendidikan Sosiologi Non Reguler 2011, terima kasih atas kebersamaan, solidaritas, dan kesan-kesannya selama mengikuti perkuliahan bareng.
16. Lenny Tarida Parinduri, terima kasih atas semangat, dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam menemani penulis melakukan penelitian. Serta Hanizar, Anggi Armelia Putri dan Dwi Putri Novita yang berjuang bareng agar saling mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi.
17. Sahabat-sahabat tercinta Nadia Ayu Andini, Nefridika Sandra, Feranda Intan Kurnia dan Nunu Fitria, terima kasih sudah menemani penulis dalam berbagi cerita dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
18. Kak Atik Kurniawati dan Kak Muhammad Yusuf, terima kasih sudah memberikan masukan berupa saran dan kritik, serta memberikan semangat kepada penulis.
19. Egi Rimdika Saputra, yang juga memberikan peranan tersendiri bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsinya. Terima kasih atas *support*, semangat dan kesediaannya menjadi tempat berkeluh kesah penulis.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat, kebahagiaan dunia akhirat kepada kita semua. Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti berharap skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jakarta, Oktober 2015

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Tinjauan Penelitian Sejenis.....	8
1.5. Kerangka Konseptual.....	24
1.5.1. Pembinaan Dalam Bingkai Pendidikan.....	24
1.5.2. Perspektif Struktural Fungsional Kebertahanan Pedagang Kaki Lima.....	30
1.6. Metodologi Penelitian.....	33
1.6.1. Pendekatan Penelitian.....	33
1.6.2. Peran Peneliti.....	34
1.6.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
1.6.4. Subjek Penelitian.....	35
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1.6.6. Triangulasi Data.....	43
1.6.7. Sistematika Penulisan.....	44
 BAB II DINAMIKA PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN RAYA RAGUNAN PASAR MINGGU	
2.1. Sejarah Pasar Minggu.....	47
2.2. Lokasi Keberadaan Pedagang Kaki Lima.....	50
2.3. Latar Belakang Terbentuknya Program Penertiban Pedagang Kaki.....	54

BAB III PROSES PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR MINGGU	
3.1. Mekanisme Program Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Minggu.....	59
3.2. Hasil Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Minggu.....	85
BAB IV PENERTIBAN DAN KEBERTAHANAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR MINGGU	
4.1. Penertiban dan Pembinaan Pedagang Dalam Bingkai Pendidikan Behavioristik.....	96
4.2. Kebertahanan Pedagang dalam Perspektif Robert Merton.....	114
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	121
5.2. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR BAGAN

Bagan	3.1.	Struktur Organisasi Dalam Program Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	61
Bagan	3.2.	Mekanisme Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu.....	85
Bagan	4.1.	Stimulus Lembaga Tertinggi Hingga Terkecil Secara Bertingkat.....	105
Bagan	4.2.	Stimulus Pemberian Nilai Melalui Penyuluhan dan Pengawasan.....	106
Bagan	4.3.	Dampak Sistem yang Tidak Aktif.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Foto Denah Lokasi Pasar Minggu.....	51
Gambar 2.2.	Foto Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu....	52
Gambar 3.1.	Foto Lokasi Binaan (LokBin) Pasar Minggu.....	63
Gambar 3.2.	Foto Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan.....	64
Gambar 3.3.	Foto Ketentuan Penggunaan Tempat Usaha di Lokasi Binaan (LokBin) Usaha Mikro dan kecil di wilayah DKI Jakarta.....	66
Gambar 3.4.	Foto PD Pasar Jaya Pasar Minggu.....	67
Gambar 3.5.	Foto Denah Tempat Penampungan PD Pasar Jaya Pasar Minggu.....	67
Gambar 3.6.	Foto Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha.....	69
Gambar 3.7.	Foto Surat Pemberitahuan Pembuatan Rekening Baru.....	69
Gambar 3.8.	Foto Pelaksanaan Auto Debet Pembayaran Pengelolaan Pasar (BPP) Di Pasar-pasar PD Pasar Jaya.....	69
Gambar 3.9.	Foto Aparatur Pelaksanaan Apel Pagi di Kelurahan Pasar Minggu.....	73
Gambar 3.10.	Foto Pedagang Yang Berjualan Di Pinggir Jalan Akan diangkut Dagangannya Ke Kecamatan Pasar Minggu...	74
Gambar 3.11.	Foto Pos Penjagaan Satpol PP.....	84
Gambar 3.12.	Foto Jalan Baru Menuju Arah Terminal Pasar Minggu.....	89
Gambar 3.13.	Foto Perbandingan Jalan Ragunan, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.....	91
Gambar 3.14.	Foto Tiga Jalur di Jalan Raya Ragunan.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1.	Perbandingan Penelitian Sejenis.....	23
Tabel	1.2.	Daftar Nama Informan Penelitian.....	39
Tabel	3.1.	Jadwal Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	77
Tabel	4.1	Respon Sebelum dan Setelah ditertibkan dan dibina.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketidaktertiban merupakan salah satu masalah sosial yang belakangan ini sering dialami masyarakat Ibukota. Salah satu dari ketidaktertiban itu adalah keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dan pinggir jalan. Ketidaktertiban itu muncul karena adanya kebebasan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Padahal, keberadaan pedagang kaki lima yang memenuhi jalan raya menyebabkan dampak buruk bagi kondisi jalan raya maupun masyarakat sekitar. Dampak tersebut berupa terganggunya arus lalu lintas yang menimbulkan kemacetan, sehingga dapat memicu terjadinya tindakan kejahatan ataupun kriminalitas.

Keberadaan pasar tradisional di tengah-tengah Kota juga berpengaruh besar terhadap kemacetan lalu lintas. Dimana kemacetan dapat terjadi karena minimnya penataan pasar secara terstruktur, tidak seperti pasar tradisional yang berada di Lenteng Agung yang saat ini para pedagangnya sudah tertata rapih di dalam pasar. Padahal, fungsi pasar seharusnya bisa menampung seluruh pedagang sehingga tidak ada lagi yang keluar ke jalan tetapi hal ini justru menyimpang. Kenyataannya pedagang masih ada yang keluar dari arena pasar dengan membuka atau menggelar lapaknya sendiri di tempat-tempat terlarang seperti di halte, trotoar, jalan raya, jembatan penyebrangan dan lain sebagainya.

Di sisi lain, masyarakat yang ikut berkontribusi besar untuk mendukung keberadaan pedagang kaki lima seperti membeli kebutuhan di trotoar atau pinggir jalan. Hal demikian berpengaruh bagi pengguna jalan, yaitu kemacetan yang berdampak pada kekesalan, lelah, menjadi emosional, *stress* dan menurunnya konsentrasi sehingga memicu terjadinya kecelakaan dan dampak lainnya antara lain adalah pemborosan energi, waktu dan pencemaran udara.¹

Kondisi Pasar Minggu sebelum adanya penertiban, para pedagang lebih memilih untuk keluar dari arena pasar dan berdagang di sepanjang jalan yaitu mulai dari depan Beacukai sampai dengan Pusat Perbelanjaan Robinson. Catatan sampai tahun 2013 menyebutkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tersebut sering menimbulkan kemacetan, kesan kumuh, dan semrawut, termasuk para pedagang yang sering melakukan aksi pencurian listrik sehingga membahayakan lingkungan sekitar. Aktivitas berjualan mereka (Pedagang Kaki Lima) jelas-jelas mengganggu ketertiban umum yang membuat pengguna jalan lainnya menjadi resah karena selalu mengalami kemacetan parah dan membuat kotor.²

Pedagang kaki lima yang memenuhi jalan hingga ke badan jalan raya mengakibatkan dampak tersendiri bagi wilayah berupa kemacetan lalu lintas yang cukup parah. Hal ini dikarenakan adanya penumpukan pedagang hingga satu jalur

¹ Besar Setyabudi, Subaryata, 2007, "*Kajian Evaluasi Keberadaan Usaha Dagang Di Pinggir Jalan Dan Trotoar Terhadap Kemacetan Lalu Lintas*", "JURNAL, Warta Penelitian Perhubungan Volume 19 Nomor 1, Tahun 2007" hlm 154

² <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=88546> "500 PKL di Kawasan Pasar Minggu Ditertibkan", diakses pada tanggal 18 juli 2015 PKL: 16.00 WIB

jalan. Permasalahan seperti ini memang masalah tragis yang sering dialami oleh Kota-kota besar di Indonesia, khususnya DKI Jakarta tepatnya di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Masalah seperti ini mengalami kesulitan dalam mengatasinya sebelum adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Para pedagang kaki lima umumnya tidak memiliki keahlian khusus karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga mengharuskan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi terbatas. Kehadiran pedagang kaki lima yang menempati trotoar dan pinggiran kota menimbulkan terganggunya ketertiban lalu lintas dan menyebabkan terjadinya kemacetan parah di wilayah Pasar Minggu. Hal ini membuat Pemerintah mengalami kesulitan dalam upaya penataan dan pemberdayaan jalan dengan tujuan mewujudkan kota yang bersih, indah dan nyaman.

Kondisi Pasar Minggu sekitar dua sampai tiga tahun lalu memang sangat memprihatinkan. Kondisi Pasar Minggu yang terlihat sangat berantakan, jalan raya terlihat kumuh karena banyaknya sampah berserakan yang menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini merupakan dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dan pinggir jalan, serta adanya gagasan yang menyatakan bahwa Pasar Minggu merupakan pasar buah dan sayuran terbesar di DKI Jakarta. Dengan demikian, banyak pedagang yang berburu untuk berdagang di wilayah ini begitupun masyarakat sekitar yang tergiur untuk berbelanja di wilayah ini.

Keberadaan pedagang kaki lima membuat jalan raya yang terbagi dua jalur, dipergunakan untuk membuka lapak dagangannya dan jalur lainnya untuk perlintasan

kendaraan. Keadaan demikian berlangsung setiap hari karena jalan raya yang selalu dipadati oleh pedagang kaki lima dan banyaknya kendaraan yang melintasinya. Ketidaktertiban yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas akan terus berkembang jika kebebasan berdagang di jalan tidak segera dihentikan atau dihilangkan.

Seiring berjalannya waktu dan meminimalisir dampak negatif dari keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu. Sekitar tahun 2013 Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) pun mulai diterapkan dan dijalankan. Di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) yang berbunyi “*setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberang orang dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1)*”. Dimana di dalam sebelumnya tersebut yaitu ayat (1) berbunyi “*Gubernur menunjuk atau menetapkan bagian-bagian jalan atau trototar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima*”³.

Penerapan Perda No. 8 Tahun 2007 sebagai acuan untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Selain itu, terdapat proses asosiatif yang terjalin dengan berbagai pihak terkait. Proses asosiatif merupakan proses sosial yang di dalam realitas sosial anggota-anggota masyarakatnya dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerja sama. Harmoni sosial ini menciptakan kondisi sosial

³ Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8, dari Kantor Kelurahan Pasar Minggu. hlm 8.

yang teratur.⁴ Pada proses asosiatif terdapat kerjasama yang memiliki tujuan bersama, kerja sama yang tergabung dengan berbagai pihak terkait seperti lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat yang terdiri atas Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu, Kasatgas Satpol PP di Kelurahan Pasar Minggu, Anggota Satpol PP, dan Ketua PD Pasar Jaya, Ketua Lokasi Binaan serta dibantu juga oleh TNI, POLRI dan Dishub yang ikut bekerja sama dalam melaksanakan program penertiban pedagang kaki lima di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu.

Lembaga kemasyarakatan memiliki beberapa fungsi diantaranya *pertama*, memberikan pedoman pada anggota masyarakat, yakni bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat. *Kedua*, menjaga keutuhan masyarakat. *Ketiga*, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.⁵ Tingkah laku masyarakat yang tergabung menjadi pedagang kaki lima harus mendapat pengawasan ketat agar tidak bertingkah laku yang melanggar norma masyarakat seperti membuka lapak dan menggelar dagangannya di pinggiran atau bahu jalan raya.

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa dengan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) dan adanya program penertiban melalui proses asosiatif. Maka penertiban yang dilakukan seperti ini berperan dalam upaya penataan kota menjadi tertib dan layak, baik ditinjau dari segi keindahan, keamanan, dan

⁴ Elly.M Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 77

⁵ Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm:219

kenyamanan. Proses penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP bertujuan untuk menempatkan pedagang kaki lima di lokasi yang mendapatkan izin dari Pemerintah. Sehingga mengurangi tingkat kemacetan yang setiap harinya terjadi di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil tema pembahasan penelitian yang berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jakarta”. Penelitian ini mengambil studi kasus pedagang kaki lima di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

1.2. Permasalahan Penelitian

Nilai ketertiban umum sepertinya masih kurang diprioritaskan bagi kalangan masyarakat khususnya pedagang kaki lima. Bagi pedagang kaki lima, tata tertib tidak dianggap sebagai hal yang penting dan wajib untuk dijalankan. Melainkan hanya sekedar diketahui dan didengarkan saja, karena mayoritas pedagang kaki lima lebih memprioritaskan berdagang di lokasi yang memberikan keuntungan yang maksimal. Sehingga dapat menghasilkan uang yang relatif banyak agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pedagang kaki lima lebih memilih berdagang di trotoar dan bahu jalan karena keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada berdagang di dalam kios PD Pasar Jaya Pasar Minggu. Karena masyarakat yang menjadi konsumen biasanya lebih senang untuk membeli barang-barang atau kebutuhan pokok di pinggir jalan daripada harus masuk ke dalam arena pasar.

Pada tahun 2013, Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) mulai diterapkan dan dilaksanakan yaitu dengan penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP terhadap pedagang kaki lima. Kondisi Jalan Raya Ragunan saat ini sudah terbilang cukup bersih dari kalangan pedagang kaki lima. Kemacetan yang sering terjadi di Pasar Minggu, saat ini sudah mulai menurun dan masih bisa dikendalikan oleh aparat Kepolisian maupun petugas Dinas Perhubungan (Dishub). Berdasarkan pemaparan di atas, maka dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu?
2. Bagaimana keberterapan para pedagang kaki lima setelah adanya penertiban dan pembinaan tersebut?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jakarta”, adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana suatu peraturan dilaksanakan melalui penertiban di jalan. Pertama, Peneliti akan memaparkan secara deskriptif mengenai proses dari penertiban pedagang kaki lima di Jakarta, tepatnya pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Ragunan yang terbagi dalam tiga tahap yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kedua, Peneliti akan menggambarkan keberterapan pedagang kaki lima setelah adanya penertiban dan pembinaan dari aparat maupun pihak Lokasi Binaan.

Manfaat penelitian ini berfokus pada dua hal. Pertama, secara *teoritik* penelitian ini diharapkan dapat memberikan disiplin ilmu-ilmu sosial dan untuk melengkapi kajian sosiologi ekonomi dan sosiologi pendidikan khususnya pedagang kaki lima. Dalam menangani masalah pedagang kaki lima tidaklah mudah karena jumlah pedagangnya yang relatif banyak dan lokasi berdagang yang kurang strategis.

Kedua, secara *praktis* penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pekerja sosial dan peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian serupa mengenai penertiban pedagang kaki lima di Jakarta agar pedagang kaki lima mendapatkan lokasi yang sekiranya diperizinkan oleh Pemerintah serta mendapatkan pembinaan berupa penyuluhan dan pengarahan. Keuntungan yang diperoleh berupa mengurangi dampak negatif dari keberadaan pedagang kaki lima di trotoar maupun pinggir jalan seperti terhambatnya arus lalu lintas, munculnya tindakan kriminalitas dan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, akan menimbulkan rasa kepedulian dan tanggung jawab masyarakat sekitar terhadap kondisi Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu.

1.4. Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian ini dilakukan dengan bantuan dari beberapa penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang pedagang kaki lima yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka sejenis. Penelitian pertama yaitu penelitian milik

Hayu Ariani yang berjudul “*Strategi Kebertahanan Pedagang Kaki Lima Pujasera Usaha Kecil Mikro (UKM)*”.⁶

Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk dari strategi kebertahanan usaha para pedagang kaki lima Pujasera UKM Jl. Birah 3, Blok S, Kebayoran Baru dalam menjaga kelangsungan usahanya mengingat adanya keterbatasan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap para pedagang kaki lima binaan yang ada di proyek percontohan Pujasera UKM. Dan Hayu Arini juga melihat fokus penelitian yaitu bagaimana implikasi dari strategi kebertahanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap kehidupan sosial ekonomi para pedagang kaki lima Pujasera UKM Jl. Birah 3, Blok S, Kebayoran Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap empat pedagang, satu koordinator pedagang kaki lima Pujasera UKM, dan satu manager Koperasi.

Berdasarkan penelitian Hayu Ariani, maka dapat penulis simpulkan bahwa pedagang kaki lima telah mendapatkan salah satu tempat penampungan di kawasan Kebayoran Baru yaitu di sepanjang trotoar Jalan Birah 3, Blok S, yang diberi nama Pujasera UKM. Namun, setelah diresmikannya Pujasera UKM yaitu pada tahun 2005 oleh Bapak Sutiyoso, kondisi sarana dan prasarana tempat usaha pedagang kaki lima sudah banyak yang mengalami kerusakan, tidak adanya bantuan dana, dan sebagainya. Hal ini membuat para pedagang kaki lima harus berjuang dalam menjaga

⁶ Hayu Ariani, *Strategi Kebertahanan Pedagang Kaki Lima Pujasera Usaha Kecil Mikro (UKM)*, (Skripsi Program Studi Sosiologi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ, 2011).

kelangsungan usahanya dan tidak bergantung lagi pada bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Hayu Ariani adalah dari segi kekurangan maupun segi kelebihan yang bisa terlihat fokus penelitiannya. Dimana kelebihan dari penelitian Hayu Ariani yang tidak terdapat di penelitian penulis adalah penelitian Hayu Ariani hanya memfokuskan terhadap jaringan sosial yang melihat dari segi pemilihan ruang dan aspek bisnis pedagang kaki lima. Selain itu, terdapat implikasi dari strategi keberlanjutan usaha para pedagang kaki lima terhadap kehidupan sosial ekonomi para pedagang kaki lima. Namun, disisi lain terdapat kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya penertiban dari aparaturnya maupun Lembaga Masyarakat untuk menata pedagang kaki lima agar merelokasikan tempat yang memang layak dan sudah mendapatkan izin dari Pemerintah serta dapat menata pedagang kaki lima menjadi lebih rapih dan teratur di tempat penampungan. Di samping itu adanya pembinaan yang diberikan oleh aparaturnya maupun pihak Lokasi Binaan secara teratur yang akan menghasilkan para pedagang mampu bertahan di lokasi penampungan. Sehingga, dapat mencerminkan kota menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

Penelitian kedua yang dijadikan sebagai rujukan yaitu penelitian milik Ayu Amalia Kristin yang berjudul “*Sosialisasi Kewirausahaan Di Keluarga Pedagang Kaki Lima Pasar Malam Jiung*”.⁷ Ayu melakukan penelitian dengan menggunakan

⁷ Ayu Amalia Kristin, *Sosialisasi Kewirausahaan Di Keluarga Pedagang Kaki Lima Pasar Malam Jiung*, (Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ, 2013).

pendekatan kualitatif untuk memahami proses sosialisasi yang terbentuk pada keluarga pedagang kaki lima yang telah lama berjualan di pasar malam Jiung. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu di RW 05 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, karena merupakan arena yang dijadikan pedagang menggelar dagangannya dan juga sebagai tempat tinggal sebagian pedagang Jiung yang disewakan oleh masyarakat. Dari penelitian Ayu Amalia Kristin, maka dapat penulis simpulkan bahwa Jalan Kemayoran Gempol keadaannya selalu ramai pada sore harinya. Sehingga, Jalan Kemayoran Gempol tersebut dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang Jiung untuk membuat dan membuka lapak mereka. Pada pagi dan siang hari, Jalan Kemayoran Gempol ini biasa digunakan untuk perlintasan kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Pada sore harinya, keadaan berubah total menjadi "*Pasar Malam*".

Namun, pada tahun 2005 Jiung pernah mengalami penggusuran dan para pedagang direlokasikan ke tempat baru yaitu di Jalan Dakota. Menurut Ayu, keadaan seperti ini tidak bertahan lama karena tempat relokasi pedagang yang jauh dari lokasi sebelumnya membuat pasar malam ini sepi pengunjung. Hal ini membuat pedagang yang telah direlokasikan kembali ke tempat sebelumnya yaitu di Jalan Kemayoran Gempol atau biasa disebut dengan Pasar Jiung. Dengan bertahannya pasar malam Jiung menyebabkan masyarakat di sekitar Jiung khususnya warga masyarakat RW 05 dapat terbantu secara ekonomi. Selain sebagai hubungan jual beli yang hanya melibatkan para pedagang dan konsumennya. Jiung juga dijadikan sebagai arena sosialisasi dari keluarga pedagang kaki lima yang memiliki peranan penting dalam

hal penanaman pendidikan informal tentang kewirausahaan dalam keluarga. Maka fokus permasalahan yang diambil oleh Ayu adalah bagaimana dinamika pedagang pasar malam Jiung. Dan fokus permasalahan selanjutnya adalah bagaimana implementasi sosialisasi kewirausahaan pada keluarga pedagang kaki lima Jiung.

Perbedaan yang tertera antara penelitian penulis dengan penelitian Ayu Amalia bisa terlihat dari kelebihan dan kekurangan dari kedua penelitian ini. Kelebihan yang tertera dari penelitian Ayu yang tidak terdapat di penelitian penulis adalah implementasi melalui sosialisasi yang diberikan oleh keluarga yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Dimana proses sosialisasi kewirausahaan terjadi dalam lingkup keluarga para pedagang yang mentransferkan nilai, pengetahuan, dan keahlian kepada anggota keluarganya. Pentransferan nilai dan keahlian dari orang tua yang berdagang kepada anak-anak mereka, sehingga hal tersebut menimbulkan regenerasi usaha. Kelebihan yang terdapat di penelitian Ayu ini tidak terdapat di dalam penelitian penulis.

Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat juga kekurangan dari penelitian Ayu yaitu mengenai keberadaan pedagang kaki lima yang sudah di relokasikan ke tempat baru yaitu di Jalan Dakota tetapi kembali lagi ke lokasi terlarangnya yaitu Jalan Kemayoran Gempol atau biasa disebut dengan Pasar Jiung. Dalam hal ini, kekurangannya tersebut sama seperti penelitian Hayu Ariani yaitu tidak adanya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Dimana penertiban tersebut dengan merelokasikan ke tempat penampungan baru dan seharusnya terdapat pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh aparaturnya bersama

dengan jajarannya agar para pedagang tidak kembali lagi ke lokasi lama. Di samping itu, sebaiknya pembinaan diberikan juga kepada pedagang kaki lima agar para pedagang merasakan kenyamanan di lokasi barunya sehingga bertahan dalam jangka waktu panjang.

Penelitian ketiga yang menjadi referensi penulis selanjutnya adalah penelitian milik Khisbiatun Nafilah yang berjudul "*Dilema Ruang Publik Perkotaan: Trotoar Sebagai Arena Ekonomi Informal di Depan PGC Jaktim*"⁸. Khisbiatun melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menyajikan pemberdayaan trotoar menjadi lahan ekonomi. Permasalahan utama dalam penelitian Khisbiatun adalah mengenai banyaknya para migran yang datang ke Jakarta dan mereka tidak terserap oleh sektor formal ataupun industri. Sehingga, pada akhirnya mereka menggunakan ruang publik khususnya trotoar menjadi ruang publik baru yang mempunyai nilai guna ekonomis. Munculnya hal tersebut, membuat para migran akhirnya menjadi kaum yang termarginal yang bergerak di sektor informal perkotaan seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, kuli, dll.

Oleh karena itu, terjadilah dilema dalam penggunaan trotoar oleh para PKL liar yang ada di Jakarta. Hal ini dikarenakan di satu sisi sektor informal dapat menampung tenaga kerja para migran yang akhirnya dapat mengurangi pengangguran. Namun di sisi lain, justru menciptakan masalah baru yaitu penggunaan ruang publik menjadi lahan ekonomi perkotaan. Dalam kajian

⁸ Khisbiatun Nafilah, *Dilema Ruang Publik Perkotaan: Trotoar Sebagai Arena Ekonomi Informal di Depan PGC Jaktim*. (Skripsi Program Studi Sosiologi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ, 2011).

Khisbiatun menjelaskan bahwa adanya perebutan lahan trotoar oleh pejalan kaki dan para pedagang kaki lima. Sebagian besar trotoar yang di Jakarta kondisinya rusak atau diokupasi banyak kepentingan. Salah satu kepentingan yang ada di trotoar ialah kepentingan para PKL yang kemudian menimbulkan berbagai masalah. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan oleh PKL selain telah merebut hak para pengguna jalan juga masalah kebersihan, keindahan, ketertiban umum, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas. Keadaan tersebut di satu sisi dianggap mengganggu, namun di sisi lain kegiatan PKL memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi kaum migran yang bekerja di sektor informal yang umumnya tergolong ekonomi lemah.

Lokasi penelitian yang diambil oleh Khisbiatun yaitu sepanjang trotoar depan PGC di Jalan Mayjend Soetoyo, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur. Lokasi ini dipilih oleh Khisbiatun, karena adanya fenomena sosio ekonomi yang akhirnya mampu menyerap banyak tenaga kerja dari para migran itu sendiri serta adanya masalah baru yang ditimbulkan dari fenomena tersebut yaitu kemacetan yang terjadi di daerah depan PGC Jaktim. Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik penggunaan trotoar oleh para migran menjadi lahan ekonomis sehingga menimbulkan suatu dilema ruang. Khisbiatun juga melihat fokus penelitian selanjutnya yaitu bagaimana PKL memaknai ruang publik sehingga mereka dapat bertahan dalam usahanya menguasai ruang publik tersebut.

Berdasarkan penelitian Khisbiatun Nafilah, maka dapat penulis simpulkan bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang ada di kota-

kota besar yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta. Adanya pembangunan yang dilakukan di Jakarta mendorong para migran untuk melakukan urbanisasi. Para migran tersebut berharap akan mendapatkan pekerjaan, namun karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, pada akhirnya membuat migran tersebut tidak terserap oleh sektor informal perkotaan. Dengan demikian, membuat para migran akhirnya menjadi kaum yang termarginal yang bergerak di sektor informal perkotaan seperti: pedagang kaki lima, tukang ojek, kuli dll. Hal inipun yang akan menyebabkan kawasan cililitan tepatnya di depan PGC Jakarta Timur akan mengalami kemacetan pada setiap harinya dan harus disegerakan untuk mengatasi permasalahan seperti ini.

Perbedaan yang tertera antara penelitian penulis dengan penelitian Khisbiatun Nafilah bisa terlihat dari kelebihan kedua penelitian ini. Kelebihan yang tertera dari penelitian Khisbiatun yang tidak terdapat di penelitian penulis adalah PKL memaknai ruang publik sehingga dapat bertahan dalam usahanya menguasai ruang publik. Selain itu, Khisbiatun juga membahas tentang konflik yang terjadi akibat keberadaan PKL di trotoar. Konflik tersebut meliputi: konflik antar sesama pedagang, konflik antara pedagang dengan organisasi keamanan, dan konflik antara pedagang dengan pemerintah. Namun, adanya kekurangan dari penelitian Khisbiatun dengan penelitian penulis yaitu tidak adanya lokasi sebagai tempat penampungan pedagang kaki lima yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah sehingga penertiban kurang terlaksana dengan baik. Hal demikian bermanfaat untuk meminimalisir tingkat kemacetan yang terjadi di wilayah PGC Jakarta Timur. Selain itu, kurang adanya

pembinaan yang diberikan dari aparaturnya maupun organisasi terkait agar para pedagang dapat bertahan di lokasi barunya.

Penelitian keempat yang menjadi referensi penulis selanjutnya adalah jurnal Warta Penelitian Perhubungan Besar Setyabudi, Subaryata yang berjudul "*Kajian Evaluasi Keberadaan Usaha Dagang Di Pinggir Jalan Dan Trotoar Terhadap Kemacetan Lalu Lintas*".⁹ Jurnal ini membahas mengenai kehadiran usaha dagang non formal di pinggir jalan dan trotoar yang menyebabkan terjadinya kemacetan di Jalan Otista, Jakarta Timur. Upaya yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dalam mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas yaitu dengan penertiban usaha dagang di pinggir jalan dan trotoar. Namun, dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala dan sering terjadi kontak fisik antara petugas dengan para pedagang. Sudah bertahun-tahun pedagang menekuni profesi ini sebagai mata pencaharian yang dijadikan sebagai sandaran hidup, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk modal, prasarana, dan sarana usaha.

Beberapa saat kemudian telah terjadi kegiatan penertiban atau penggusuran di wilayah Otista, Jakarta Timur. Pada saat terjadi penertiban ini pedagang tidak mendapatkan pesangon seperti layaknya pekerja yang di-PHK dari perusahaannya, tidak mendapatkan ganti rugi yang setimpal dengan modal usaha yang telah dikeluarkan dan usahanya cenderung semakin sulit. Hal itulah yang menyebabkan para pedagang sulit untuk ditertibkan oleh aparat setempat. Maka dapat diajukan

⁹ Besar Setyabudi, Subaryata, 2007, "*Kajian Evaluasi Keberadaan Usaha Dagang Di Pinggir Jalan Dan Trotoar Terhadap Kemacetan Lalu Lintas*", "Jurnal, Warta Penelitian Perhubungan Volume 19 Nomor 1, Tahun 2007".

langkah-langkah melakukan penertiban yang lebih baik, antara lain: mendata para pelaku usaha dagang di pinggir jalan dan trotoar, khususnya non formal, agar diketahui golongan para pedagang. Bagi pelaku usaha golongan ekonomi lemah yang diberikan prioritas untuk direlokasi ke tempat yang dianggap strategis, dan kepada yang bermodal menengah keatas (mampu) agar menyewa atau membeli lahan.

Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah pertama, pengamatan terhadap usaha dagang di pinggir jalan dan trotoar dilakukan hanya pada kawasan Jl. Otista, Jakarta Timur. Kedua, inventarisasi peraturan perundangan yang terkait seperti PP Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan dan PP Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan. Ketiga, inventarisasi peraturan perundangannya yang terkait dengan usaha dagang di pinggir jalan dan trotoar di wilayah DKI Jakarta. Keempat, identifikasi opini pengguna jasa usaha dagang di pinggir jalan dan trotoar. Kelima, identifikasi opini pelaku usaha dagang di pinggir jalan dan trotoar. Keenam, identifikasi opini petugas yang menangani kemacetan lalu lintas. Terakhir, penataan dan upaya penertiban usaha dagang di pinggir jalan dan trotoar dalam mengurangi kemacetan lalu lintas.

Dalam penelitian Besar Setyabudi dan Subaryata memiliki kelebihan maupun kekurangan jika dibandingkan dengan penelitian penulis. Kelebihan dari penelitian Besar Setyabudi dan Subaryata adalah evaluasi dan upaya penanganan dari keberadaan pedagang kaki lima di pinggir jalan dan trotoar. Namun, dalam evaluasi dan penanganan dari keberadaan pedagang kaki lima di trotoar maupun pinggir jalan tidak terdapat pembinaan yang dilakukan seperti isi dari penelitian penulis.

Pembinaan yang dilakukan berupa penyuluhan dan pengarahan melalui sosialisasi yang diberikan oleh aparaturnya maupun pihak lokasi penampungan terhadap pedagang kaki lima. Selain itu, memberikan kenyamanan terhadap para pedagang di lokasi penampungan agar mereka bertahan dan tidak berusaha kembali ke lokasi terlarang seperti trotoar dan pinggir jalan. Hal ini termasuk ke dalam segi kekurangan dari penelitian Besar Setyabudi dan Subaryata.

Selanjutnya, terdapat penelitian yang menjadi referensi penulis selanjutnya adalah jurnal internasional milik Rodrigo Meneses Reyes yang berjudul "*Crime, Street Vendors and the Historical Downtown in PostGiuliani Mexico City*" atau kejahatan, pedagang kaki lima dan sejarah post-giuliani pusat kota di Mexico City¹⁰. Pembahasan dalam penelitian ini adalah dengan banyaknya masalah yang terjadi di kota Mexico mulai dari kriminalitas, keberadaan pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah berjalan berkeliling kota dengan menerapkan Giuliani untuk membersihkan jalan dan konsekuensi yang akan dijalankan adalah konsekuensi inisiatif dalam upaya untuk pembersihan daerah perkotaan. Selain itu, bertujuan juga untuk membahas mengenai cara yang digunakan dalam upaya mengendalikan kebijakan yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan toleransi yang diberikan polisi terhadap pedagang kaki lima.

¹⁰International journal of criminology and sociology, 2013 Vol.2, tersedia di: <http://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/viewFile/1089/pdf>, diakses pada 6 Mei 2015 pukul 19.30 WIB.

Penelitian ini Rodrigo mengambil data dari seorang penjual jalanan atau pedagang kaki lima dan laporan mengenai kegiatan kriminal. Masalah yang terjadi dari keberadaan pedagang kaki lima di kota Mexico ini adalah pihak yang berwenang berpikir dan menuduh bahwa barang dagangan yang diperjual-belikan oleh pedagang kaki lima di Mexico berupa obat-obatan dan senjata yang merupakan produk ilegal. Namun, pihak yang berwenang pun tidak bisa menemukan apapun dari yang mereka tuduhkan tersebut. Menurut pihak yang berwenang, pada akhir dekade 2000, inti dari sejarah kota Mexico yang dinilai dari beberapa aspek, yaitu: nilai tertinggi pada kasus kejahatan sebesar 24,5; pekerja seks komersial sebanyak 3,000 orang; pedagang kaki lima sebanyak 30,559 orang; 3,050 pejalan kaki (terdiri atas pembawa pasokan pedagang, penjual tiket, sepatu shiners dan musisi) yang bekerja sehari-hari di jalanan diantara yang belum ditentukan, namun jumlah gelandangan yang tinggal di jalanan juga cukup banyak. Program guiliani ini dilakukan sebagai upaya untuk melawan kejahatan yang terjadi di Mexico dan Amerika Latin.

Oleh sebab itu dibuatlah rencana Giuliani untuk menangani masalah yang ada di Mexico City. Rencana Giuliani ini dilaksanakan dengan adanya kerjasama, yaitu sebuah kelompok pengusaha di daerah Mexico City, bergabung dengan SSPDF polisi setempat [Secretaría de Keamanan Pública del Distrito Federal] yang disewa oleh Rudolph Giuliani sebagai konsultan keamanan internasional. Alasan untuk hal ini adalah karena dia akan merancang suatu inovatif strategi keamanan dan pihak kepolisian yang melaksanakan prakteknya dengan tujuan untuk memberikan solusi agar kejahatan yang terjadi di Mexico dapat teratasi dengan baik.

Dengan demikian, Giuliani menandatangani kontrak senilai 43 US dollar untuk menyarankan pejabat Mexico City dalam upaya untuk menurunkan angka kriminalitas. Laporan Giuliani di Mexico City menunjukkan bahwa orang harus dihapus dari lingkungan masyarakat jika mereka hidup atau berpenampilan yang tidak sewajarnya, mereka bisa tampil sebagai “Urban Problems”, namun demikian dapat menimbulkan ancaman yaitu mendorong kejahatan yang lebih serius karena kehadiran mereka. Hal ini juga membuat referensi eksplisit untuk seluruh alam semesta sosial yang 'menggunakan ruang publik sebagai tempat untuk tinggal dan bekerja. Lingkup ini akan mencakup PSK, petugas parkir ilegal, pedagang kecil, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pengemis yang tinggal di jalanan Mexico City.

Strategi penegakan hukum dibuat dalam upaya untuk membersihkan ruang publik. Dibentuklah bentuk-bentuk baru sesuai dengan saran dari Giuliani Group untuk Mexico City. Tujuan dari pemecahan masalah perkotaan yaitu keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang jumlahnya lebih dari 30.000 orang di kota Mexico City. Strategi-strategi yang dilakukan untuk menghapus jalan perdagangan dari pusat kota terstruktur dalam tiga langkah: *Pertama*, Pemerintah memutuskan untuk membatalkan izin untuk semua kota yang digunakan sebagai tempat kegiatan komersial pada jalan-jalan di pusat kota. Ini memiliki anggapan bahwa semua perdagangan yang terjadi di jalan-jalan pusat kota adalah ilegal. *Kedua*, sebanyak 2.000 petugas kepolisian dikerahkan ke pusat kota jalan dengan tujuan untuk mencegah pedagang kaki lima yang berusaha menyiapkan barang dagangannya ke jalanan. *Ketiga*, pembatalan izin untuk perdagangan di pusat kota, dalam

hubungannya dengan penyebaran polisi di jalan-jalan yang berdampak pada peningkatan substansial dalam pengarahannya terhadap pedagang kaki lima yang bekerja di daerah. Meskipun, berbagai upaya dan strategis digunakan oleh pihak berwenang dalam upaya untuk mengakhiri terorganisirnya perdagangan di jalan-jalan di pusat kota seperti halnya pedagang kaki lima yang mempertahankan untuk tetap di jalanan dengan menggunakan trotoar untuk bertahan hidup.

Hasil pemaparan jurnal diatas dapat dijelaskan dan disimpulkan bahwa maraknya kasus pedagang kaki lima di pinggir jalan memang sangat berpengaruh negatif bagi lingkungan disekitar, apalagi bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan karena hal tersebut sangat mengganggu konsentrasi dari pengguna jalan tersebut. Jika dibandingkan antara penelitian penulis dengan penelitian Rodrigo dapat dilihat dari aspek kelebihan maupun aspek kekurangan. Kalau dilihat dari aspek kelebihannya tersebut yaitu dalam penelitian Rodrigo untuk mengatasi permasalahan di Mexico City dengan menggunakan penasehat Giuliani sebagai pemberi nasehat guna mencari solusi yang tepat. Terdapat juga pengendalian kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan toleransi. Selanjutnya, terdapat tiga strategi yang dilakukan oleh penasehat Giuliani dengan pihak yang berwenang untuk mengakhiri terorganisirnya perdagangan di jalan-jalan pusat kota.

Namun, kalau dilihat dari aspek kekurangannya yang tidak berbeda jauh dengan ketiga penelitian diatas yaitu tidak adanya pembinaan yang dilakukan secara sosialisasi persuasif maupun preventif terhadap pedagang kaki lima seperti pembinaan yang terletak di penelitian penulis. Pembinaan dilakukan secara terus

menerus dan bertahap yang bertujuan untuk membentuk pola pikir dan sikap dari pedagang kaki lima agar memahami bahwa berdagang di trotoar dan pinggir jalan merupakan langkah yang salah dan harus segera dihentikan. Pembinaan diberikan juga di tempat penampungan dengan tujuan agar para pedagang kaki lima menerima dan bertahan di lokasi yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah setempat. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah kerjasama yang terjalin untuk keberhasilan dari sebuah program baik dari Pemerintah, aparatur dan masyarakat sekitar.

Maka kelima penelitian sejenis yang penulis gunakan ada kaitannya dengan penelitian peneliti yaitu membahas mengenai pedagang kaki lima. Dimana kehadiran pedagang kaki lima inilah yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar maupun pengguna jalan raya. Oleh karena itu, membutuhkan suatu tindakan untuk merubah kondisi buruk akibat kehadiran pedagang kaki lima di pinggir jalan. Melalui program penertiban yang dilakukan aparatur untuk merelokasikan pedagang kaki lima ke tempat penampungan. Di samping itu, adanya pembinaan yang dilakukan oleh aparatur maupun pihak Lokasi Binaan melalui penyuluhan dan pengarahan. Penertiban dan pembinaan dilakukan secara rutin dan teratur pada setiap hari. Hal ini mampu dibuktikan dengan keberhasilan program penertiban yaitu para pedagang kaki lima yang bersedia untuk direlokasikan ke tempat penampungan yaitu Lokasi Binaan dan PD Pasar Jaya. Serta adanya pembinaan yang diberikan oleh aparatur maupun pihak Lokasi Binaan yang membuat para pedagang kaki lima merasa nyaman untuk bertahan di tempat penampungan. Dengan meninjau beberapa hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan penelitian terlebih dahulu, maka secara ringkas penulis akan

mendeskripsikan perbedaan dan persamaannya dengan penelitian lainnya pada tabel

1.1. berikut ini:

Tabel 1.1.
Perbandingan Penelitian Sejenis

Nama Penulis	Jenis Studi	Judul Penelitian	Perbedaan Studi	Persamaan Studi
Hayu Ariani	Skripsi	Strategi keberthanan pedagang kaki lima Pujasera UKM: Studi tentang Pedagang Kaki Lima binaan di Pujasera UKM Jalan Birah 3, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Fokus penelitian adalah pedagang kaki lima di Pujasera UKM Blok S. Selain itu fokus penelitiannya dilihat juga dari segi jaringan sosial, segi pemilihan ruang dan aspek bisnis pedagang kaki lima.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pedagang kaki lima dan membahas mengenai keberthanan para pedagang kaki lima dalam mempertahankan eksistensinya
Ayu Amalia Kristin	Skripsi	Sosialisasi kewirausahaan di keluarga pedagang kaki lima pasar malam Jiung	Fokus penelitian adalah Implementasi sosialisasi kewirausahaan pada keluarga pedagang kaki lima	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pedagang kaki lima dan membahas mengenai dinamika pasar serta keberthanan pedagang agar tetap eksis hingga saat ini
Khisbiatun Nafilah	Skripsi	<i>Dilema Ruang Publik Perkotaan: Trotoar Sebagai Arena Ekonomi Informal di Depan PGC Jaktim</i>	Fokus penelitian yang ambil yaitu PKL yang memaknai ruang publik sehingga dapat bertahan dalam usahanya menguasai ruang publik tersebut	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pedagang kaki lima., serta praktik penggunaan trotoar dan pinggir jalan sebagai tempat berdagang
Besar Setyabudi, Subaryata	Jurnal	Kajian evaluasi keberadaan usaha dagang di pinggir jalan dan trotoar terhadap kemacetan lalu lintas	Fokus penelitian yang pertama adalah inventarisasi peraturan perundangan yang terkait seperti PP Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan dan PP Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan. Selanjutnya yang ketiga adalah inventarisasi peraturan perundangannya yang terkait dengan usaha dagang di pinggir jalan dan trotoar.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang keberadaan usaha dagang atau pedagang kaki lima yang berdagang di pinggir jalan dan trotoar, melakukan pengamatan terhadap usaha dagang di pinggir jalan dan trotoar, selain itu juga mengidentifikasi opini petugas atau aparaturnya yang menangani kemacetan lalu lintas
Rodrigo Meneses Reyes	Jurnal	<i>Crime, Street Vendors and the Historical Downtown in PostGiuliani Mexico City</i> atau kejahatan , pedagang kaki lima dan sejarah postgiuliani pusat kota di Mexico City	Fokus penelitiannya adalah tindakan yang dilakukan Pemerintah dengan berjalan berkeliling untuk menerapkan Giuliani saran dalam upaya membersihkan jalan, mengendalikan kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan toleransi,	Penelitian sama-sama membahas tentang keberadaan pedagang kaki lima di trotoar maupun pinggir jalan, melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima namun tidak dengan cara pembinaan
Devi Tri Liana	Skripsi	Pola Penertiban pedagang kaki lima di Jakarta	Fokus permasalahannya adalah proses penertiban pedagang kaki lima. serta adanya pembinaan yang dilakukan aparaturnya dan pihak Lokasi Binaan sebagai upaya untuk keberthanan pedagang kaki lima di tempat penampungan	Penelitian sama-sama membahas tentang keberadaan pedagang kaki lima di lokasi terlarang

Sumber: Diolah dari penelitian sejenis, 2015

1.5. Kerangka Konsep

1.5.1. Penertiban dan Pembinaan Dalam Bingkai Pendidikan

Sebelum adanya kebijakan baru, Jalan Raya Ragunan sudah dipadati oleh pedagang kaki lima disertai dengan kendaraan yang melintasi. Pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk sektor informal yang menyumbangkan peranan dalam mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri. Menurut Chris Manning, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai orang yang berkecimpung dibidang jasa perdagangan yang muncul dari akibat adanya ketidakmampuan sektor formal menampung tenaga kerja.¹¹ Oleh karena itu, banyak para pedagang yang berani untuk keluar dari arena pasar dan terjadilah ketidaktertiban. Di dalam peraturan daerah tentang ketertiban umum menjelaskan bahwa pedagang kaki lima merupakan seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah daerah maupun yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, bawah jembatan, jembatan penyebrangan.¹²

Padahal sudah tertera jelas adanya peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pada pasal 25 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang atau

¹¹ Chris Manning. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm

¹² Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8, dari Kantor Kelurahan Pasar Minggu. hlm 3

badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya.¹³ Seharusnya peraturan daerah dapat dijalankan dengan baik agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Karena peraturan daerah itu sendiri adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁴

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan jaminan tempat usaha yang layak serta menjadikan sektor usaha pedagang kaki lima sebagai suatu usaha yang lebih produktif dalam membangun perekonomian daerah. Dengan demikian pedagang kaki lima, masyarakat, dan Pemerintah Daerah dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Peraturan daerah ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Kota untuk memfasilitasi, membina, mengatur, dan menertibkan pedagang kaki lima.

Sekitar tahun 2013 muncullah tindakan dari Gubernur DKI Jakarta yang dahulunya dipimpin oleh Jokowi, Walikota dan Lembaga Masyarakat Pasar Minggu seperti Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu, Ketua PD Pasar Jaya Pasar

¹³ Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, *Op. Cit.*, Hal: 8.

¹⁴ Atmaja, I Dewa Gede dkk. 1996. Sistem dan prosedur dalam cara menilai, menguji dan mengesahkan peraturan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Denpasar: universitas udayana. Hlm: 1.

Minggu, Ketua Lokasi Binaan, dan beberapa aparat. Tindakan yang dilakukan berupa melakukan penertiban dan merelokasikannya. Hal ini merupakan suatu penataan lingkungan yang bertujuan agar keberadaan pedagang kaki lima tidak mengganggu hak-hak publik, seperti trotoar yang dipergunakan untuk pejalan kaki dan jalan raya untuk lalu lintas kendaraan.

Di samping itu, adanya pembinaan yang diberikan oleh aparat maupun pihak lokasi binaan terhadap pedagang kaki lima. Pembinaan diberikan agar para pedagang mendapatkan pendidikan dan arahan secara jelas. Dalam hal ini pendidikan bukan hanya di sektor formal saja seperti sekolah, namun pendidikan juga dibutuhkan untuk pedagang kaki lima agar bisa mendapatkan pendidikan secara informal. Menurut sifatnya pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, keluarga, dan organisasi.¹⁵

Tugas dari pendidikan masyarakat yaitu (1) menyusun program kegiatan dan memberi petunjuk serta pengarahan kepada orang yang bergerak di bidang masyarakat. (2) mengendalikan dan menilai tenaga teknis serta menggunakan sarana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. (3) membimbing dan mengendalikan kegiatan usaha dibidang pendidikan masyarakat¹⁶. Dari pernyataan tugas di atas, didapatkan pula fungsi dari pendidikan masyarakat yaitu (1) membina program

¹⁵ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm: 97.

¹⁶ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Op. Cit.*, Hlm: 165.

kegiatan dan kurikulum latihan masyarakat. (2) mengurus dan membina tenaga tehnis pendidikan masyarakat. (3) mengurus dan membina sarana pendidikan masyarakat.¹⁷

Keberadaan pedagang kaki lima di trotoar maupun pinggir jalan merupakan suatu ketidaktertiban karena tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Oleh karena itu, pedagang kaki lima harus belajar agar dapat memahami lokasi dimana saja yang sekiranya dilarang atau diperbolehkan untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif)¹⁸.

Dengan dilaksanakannya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang bertujuan untuk terciptanya perubahan sikap dari pedagang kaki lima. Hal ini diperkuat didalam teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan lingkungan.¹⁹ Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Teori ini mengutamakan

¹⁷ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. *Op. Cit.*, Hlm: 165.

¹⁸ Eveline Siregar dan Hartini Nara. 2011. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm: 3.

¹⁹ Eveline Siregar dan Hartini Nara, *Op. Cit.*, Hlm: 25.

pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut.²⁰

Teori belajar behavioristik ini juga diperkuat oleh Edwin Ray Guthrie atau Edwin Guthrie yang lahir pada tahun 1886 dan wafat pada tahun 1959 merupakan salah satu professor psikologi di university Washington dari 1914 dan pensiun pada 1956. Guthrie berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah, tingkah laku baik dapat diubah menjadi buruk dan sebaliknya, tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Teori Guthrie berdasarkan atas model penggantian stimulus satu ke stimulus yang lain. Respons atau suatu situasi cenderung diulang, bilamana individu menghadapi situasi yang sama. Inilah yang disebut asosiasi. Menurut Guthrie, stimulus harus berbentuk kebutuhan biologis, karena hubungan antara stimulus dan respons cenderung bersifat sementara. Karena itu, diperlukan pemberian stimulus yang sering, agar hubungan itu menjadi lebih langgeng. Suatu respons akan lebih kuat dan menjadi kebiasaan bila respons tersebut berhubungan dengan berbagai macam stimulus. Setiap stimulus belajar merupakan gabungan berbagai stimulus dan respons.²¹

Dalam situasi tertentu, banyak stimulus yang berasosiasi dengan banyak respons. Asosiasi tersebut bisa jadi benar, namun dapat juga salah. Guthrie termasuk mempercayai bahwa hukuman memegang peran penting dalam proses belajar, sebab

²⁰ Mohammad Jauhar. 2011. *Implementasi Paikem Dari Behavioristik Sampai Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Hlm: 9.

²¹ Mohammad Jauhar, *Op. Cit.*, Hlm: 26.

jika diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan seseorang. Tiga metode perubahan tingkah laku yang dikemukakannya adalah sebagai berikut metode respons bertentangan, metode membosankan, dan metode mengubah lingkungan²².

Dalam kasus yang terjadi di Pasar Minggu hanya 2 metode yang cocok digunakan yaitu metode membosankan dan metode mengubah lingkungan. Metode membosankan berupa melakukan penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima secara terus-menerus hingga bosan, setelah bosan karena sering ditertibkan oleh petugas, para pedagang yang akan nantinya berhenti dan sadar untuk tidak berdagang kembali di lokasi terlarang. Selain itu, metode mengubah lingkungan yaitu jika para pedagang kaki lima tidak merasa nyaman pindah di lokasi barunya, maka ubahlah lingkungan dagangnya dengan suasana yang lebih nyaman lagi. Sehingga membuat para pedagang menjadi bertahan di lokasi barunya.

Dilihat dari permasalahan di Pasar Minggu yaitu keberadaan pedagang kaki lima yang jumlahnya terlalu banyak menyebabkan kondisi jalan raya menjadi lumpuh total dan secara otomatis kendaraan pun sulit bergerak yang mempengaruhi konsentrasi dari pengendara kendaraan yang melintasi Jalan Raya Ragunan ini. Seperti halnya yang terjadi di Mexico, yaitu sebagai berikut:

²² Mohammad Jauhar, *Op. Cit.*, Hlm: 26–27.

“On the one hand, street vending has taken the form of a public problem largely determined by the urban elites who frequently identify street trade as a primary urban issue having implications on traffic and sanitation (Illy, 1986; Bromley, 2000); in other words: “since street vendors are not evenly spread across the city, but concentrated in specific locations typically characterized as ‘hot-spots’ of pedestrian and vehicular congestion, the argument is that both the number of street vendors and levels of congestion are expected to further increase. This type of concentration would then cause traffic accidents, increase the levels of vehicle-generated air pollution and impede police efficiency” (Bromley, 2000:7)”²³

“Di satu sisi jalan, penjual telah mengambil bentuk suatu masyarakat perkotaan, sebagian besar ditentukan oleh elite yang sering melihat perdagangan adalah jalan utama perkotaan memiliki masalah terhadap lalu lintas dan sanitasi (illy, bromley; tahun 1986, 2000). Dengan kata lain, karena PKL tidak merata tersebar di seluruh kota, tetapi terkonsentrasi di lokasi tertentu biasanya ditandai sebagai “hot-spot” dari pejalan kaki dan kendaraan yang terjadinya kemacetan, argumen tersebut menyatakan bahwa kedua jumlah pedagang kaki lima dan tingkat kemacetan diharapkan dapat berkurang. Karena berpengaruh terhadap konsentrasi si pengendaranya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, meningkatnya polusi udara dari kendaraan yang dihasilkan dan menghambat efisiensi dari polusi tersebut”.

1.5.3. Perspektif Struktural Fungsional Kebertahanan Pedagang Kaki Lima

Masalah sosial yang terjadi di Pasar Minggu merupakan salah satu faktor keberadaan pedagang kaki lima di trotoar maupun pinggir jalan. Dalam hal ini, para pedagang kaki lima telah menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan oleh Pemerintah, namun disalahgunakan oleh mereka. Oleh sebab itu, terjadilah disfungsi karena fungsi dari fasilitas umum tidak digunakan sesuai dengan fungsinya tersebut. Hal ini diperkuat oleh Robert K. Merton (1968) yang merupakan salah seorang

²³International journal of criminology and sociology, 2013 Vol.2, tersedia di: <http://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/viewFile/1089/pdf> , diakses pada 6 Mei 2015 pukul 19.30 WIB. Hlm 188.

mahasiswa dari Talcott Parsons ketika Parsons baru mengawali karier mengajarnya di Harvard.²⁴

Kenyataan menunjukkan bahwa fungsionalisme struktural cenderung menjadi suatu teori sosial yang bersifat konservatif. Dengan menggunakan kekuatannya yang bersifat deskriptif, pendekatan ini memusatkan diri pada struktur masyarakat. Fungsionalisme struktural tidak hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat, tetapi juga memantulkan asumsi-asumsi tertentu tentang hakikat manusia. Di dalam fungsionalisme, manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur-struktur sosial.²⁵

Tokoh sosiologi modern ini melakukan rincian lebih lanjut dalam analisis fungsionalis dengan memperkenalkan konsep fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan fungsi manifest.²⁶ *Fungsi* menurut Merton, didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang disadari dan yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian suatu sistem. Merton pun mengemukakan gagasan tentang *nonfungsi*, yang ia definisikan sebagai konsekuensi yang tidak relevan bagi sistem tersebut. Merton juga memperkenalkan fungsi *manifest* dan fungsi *laten*, kedua istilah juga merupakan tambahan bagi analisis fungsional. Secara sederhana, *fungsi manifest* adalah yang dikehendaki, sementara *fungsi laten* adalah yang tidak dikehendaki.²⁷

²⁴ George Ritzer. 2011. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana. Hlm: 255.

²⁵ Margaret M. Poloma. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm: 43.

²⁶ George Ritzer, *Op. Cit.*, Hlm: 217.

²⁷ George Ritzer, *Op. Cit.*, Hlm: 269–272.

Merton menjelaskan bahwa akibat yang tak diharapkan tak sama dengan fungsi yang tersembunyi. Fungsi tersembunyi adalah satu jenis dari akibat yang tak diharapkan, satu jenis yang fungsional untuk sistem tertentu. Tetapi ada dua tipe lain dari akibat yang tak diharapkan: “yang disfungsional untuk sistem tertentu dan ini terdiri dari disfungsi tersembunyi” dan yang tak relevan dengan sistem yang dipengaruhinya, baik secara fungsional atau disfungsional atau konsekuensi non fungsionalnya.²⁸

Melihat kondisi Pasar Minggu yang tidak adanya keteraturan di dalamnya karena ketidaktertiban pedagang kaki lima yang menempati jalan hingga menggunakan satu jalur jalan untuk berdagang. Hal ini menimbulkan arus jalan raya menjadi terhambat dengan terjadinya kemacetan lalu lintas. Namun demikian, kondisi inipun dapat dirubahnya tergantung struktur sosial yang dianutnya. Seperti yang dikatakan oleh Robert Merton, Merton menjelaskan bahwa tidak semua struktur sosial tidak dapat diubah oleh bekerjanya sistem sosial. Dengan mengakui bahwa beberapa struktur dapat diubah, fungsionalisme membuka jalan bagi perubahan sosial penuh makna.²⁹

Merton mendefinisikan kebudayaan sebagai “serangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku yang diberlakukan sama kepada seluruh anggota masyarakat atau kelompok tertentu” dan struktur sosial sebagai “serangkaian hubungan sosial teratur yang memengaruhi anggota masyarakat atau kelompok

²⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Hlm: 141-142.

²⁹ George Ritzer. 2011, *Op. Cit.*. Hlm: 273.

tertentu dengan satu atau lain cara”. Anomie terjadi “ketika terdapat disfungsi akut antara norma-norma dan tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan kemampuan anggota kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut.”³⁰

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.³¹ Penulis memilih pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai penertiban pedagang kaki lima di Jakarta. Hal ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk melihat bagaimana proses penertiban yang dilakukan oleh aparaturnya dalam upaya menertibkan pedagang kaki lima di pinggir jalan, khususnya pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain itu, penulis juga ingin melihat bagaimana keberlanjutan pedagang kaki lima setelah adanya penertiban dan pembinaan tersebut. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa langkah yang menjadi bagian dari metode penelitian, seperti penentuan waktu dan lokasi penelitian yang tepat, penentuan yang pantas menjadi subjek (informan), dan teknik pengumpulan data yang diperlukan. Komponen-komponen

³⁰ George Ritzer. 2011, *Op. Cit.*, Hlm: 273.

³¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm: 167.

tersebut sangat diperlukan dalam penelitian agar tidak terjadi permasalahan dalam penelitian.

1.6.2. Peran Peneliti

Penulis merupakan warga asli DKI Jakarta, yang bertempat tinggal di Jalan Raya Ragunan Asrama Polsek Pasar Minggu, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam hal ini penulis mengetahui secara jelas tentang kondisi Pasar Minggu dahulu sebelum adanya penertiban dan pembinaan yang dilakukan saat ini. Penelitian ini dipilih karena melihat kondisi Pasar Minggu dahulu yang sangat buruk dengan penumpukan pedagang kaki lima dimana-mana mulai dari depan Beacukai sampai depan Pusat Perbelanjaan Robinson, disertai juga penumpukan kendaraan yang melintasi jalan raya ini. Kondisi demikian sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar, khususnya pengguna jalan karena terhambatnya arus jalan yang berdampak pada kemacetan lalu lintas.

Melihat perubahan yang terjadi di Jalan Raya Ragunan inipun membuat penulis bertanya-tanya dan melakukan pengamatan lebih rinci. Dengan mengamati langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dipilih. Selain itu, penulis juga mengumpulkan serta menganalisa data yang telah didapatkan.

1.6.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengamati Pasar Minggu, tepatnya di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Secara spesifik penulis melakukan penelitian di dua lokasi penting yaitu Lokasi Binaan dan PD Pasar Jaya. Kedua lokasi ini dipilih untuk mengetahui kondisi tempat penampungan dan kondisi para pedagang kaki lima..

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap tindakan. Observasi dilakukan dengan melakukan kunjungan ke lokasi penelitian pada akhir tahun 2014. Tindakan penulis selanjutnya ialah melakukan wawancara mendalam dengan beberapa subjek penelitian. Pada tahapan pertama, penulis melakukan wawancara mendalam beserta observasi selama lima bulan. Tahapan kedua dilakukan selama sebulan guna memperkaya data penelitian dengan metode yang sama pada tahapan pertama. Apabila diakumulasikan secara keseluruhan, penelitian ini berlangsung sejak awal November 2014 sampai Juni 2015.

1.6.4. Subjek Penelitian

Untuk mengetahui penertiban dan pembinaan yang dilakukan aparatur dan pihak terkait lainnya terhadap pedagang kaki lima di Jakarta tepatnya di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Maka dibutuhkan beberapa informan dari berbagai kalangan diantaranya pedagang kaki lima, masyarakat, Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu, Kasatgas Satpol PP di Kelurahan Pasar Minggu, Anggota Satpol PP, POLRI, Dishub, Ketua Lokasi Binaan

dan Ketua PD Pasar Jaya Pasar Minggu. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yang diperoleh dari empat pedagang kaki lima yang dahulunya berdagang di sepanjang Jalan Raya Ragunan dan saat ini sudah direlokasikan ke Lokasi Binaan ataupun PD Pasar Jaya Pasar Minggu. Keempat pedagang kaki lima ini merupakan pedagang yang sudah berjualan lama dengan jenis barang yang diperjual-belikan berbeda-beda. Dari keempat pedagang dapat diketahui informasi mengenai keberuntungan para pedagang setelah adanya penertiban dan pembinaan tersebut serta alasan memilih berdagang di lokasi terlarang seperti trotoar, halte, bahu atau pinggiran jalan, jembatan penyebrangan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, terdapat dua orang petugas Satpol PP dan Camat Pasar Minggu yang memberikan informasi kunci dalam penelitian ini. Camat Pasar Minggu selaku pemimpin dalam program penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu bernama Drs. Heryanto dan kemudian dikoordinasikan juga ke Lurah Pasar Minggu bernama Suhanto. MA.P. Namun, dalam melakukan wawancara dengan Camat Pasar Minggu diwakili oleh staff bagian Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pasar Minggu bernama Ariefuddin. Begitupula, wawancara dengan Lurah Pasar Minggu yang diwakili juga oleh staff bagian Kasi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat bernama Upiek Mardhawathy.

Penertiban dilakukan dengan mekanisme yang sudah terstruktur dengan baik, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada dasarnya, Camat dan Lurah Pasar Minggu yang lebih berkuasa dalam perencanaan program penertiban pedagang kaki lima. Tidak hanya itu, Pak Heryanto dan Pak Suhanto juga telah

menentukan pedagang kaki lima berhak dipindahkan ke lokasi mana saja dan mereka juga ikut dalam proses pengawasan meskipun tidak secara intensif seperti petugas Satpol PP.

Selanjutnya, terdapat dua petugas Satpol PP yang terdiri dari Kasatgas Satpol PP di Kelurahan Pasar Minggu bernama Muhidin (40 Tahun) yang merupakan pemimpin dari petugas Satpol PP di wilayah Kelurahan Pasar Minggu dan Suryadi merupakan salah satu anggota dari petugas Satpol PP. Kedua petugas Satpol PP ini yang dapat memberikan informasi seputar pelaksanaan penertiban dan pengawasan yang dilakukan seperti apa saja. Khusus Kasatgas Satpol PP, beliau bertugas untuk mengatur pos penjagaan para Satpol PP yang akan berjaga di lokasi yang sudah tersudutkan sebagai tempat berdagang para pedagang kaki lima.

Selain itu, terdapat pula informan pendukung tentang pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu yaitu Ketua PD Pasar Jaya Pasar Minggu bernama Maskut (54 Tahun). Beliau informan tambahan yang berguna untuk mendapatkan informasi seputar pedagang yang berada di kios PD Pasar Jaya Pasar Minggu. Informasi yang didapat berupa asal mula pedagang (warga asli DKI Jakarta atau pendatang), tata tertib yang terdapat di PD Pasar Jaya Pasar Minggu dan jumlah uang sewa yang harus dikeluarkan oleh pedagang. Selanjutnya, Suryaman selaku korlap atau ketua Lokasi Binaan. Informasi yang didapatkan berupa pembinaan seperti apa yang diberikan terhadap pedagang kaki lima, jumlah data pedagang, tata tertib Lokasi Binaan, biaya yang dikeluarkan dan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin berdagang di Lokasi Binaan.

Untuk memperkaya data didapatkan pula informasi tambahan dari aparat Kepolisian Polsek Metro Pasar Minggu bernama Miratno. Beliau adalah anggota kepolisian yang dinas di Polsek Metro Pasar Minggu dan sekaligus ayahanda penulis. Sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi berupa opini mengenai keberadaan pedagang kaki lima serta tugas beliau dalam membantu melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Informan tambahan selanjutnya adalah anggota Dinas Perhubungan (Dishub) bernama Hadi. Beliau merupakan anggota Dishub Golongan 3A yang bertugas di kawasan Terminal Pasar Minggu. Informasi yang akan didapatkan serupa dengan anggota kepolisian.

Berikutnya, informasi tambahan dari pengunjung PD Pasar Jaya bernama Ibu Sri. Informasi tambahan ini diperoleh agar bisa menanyakan opini dari Ibu Sri terkait keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dan bahu atau pinggir jalan serta apa saja dampak positif maupun dampak negatif dari keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Terakhir terdapat informan kunci bernama Bu Hj. Neneng, beliau merupakan warga asli sini yang sudah sejak lama tinggal di Jalan Raya Ragunan Gang Bima Jaya 1 RT 005/RW 04 No.9, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Informasi yang didapat berupa sejarah Pasar Minggu dan awal mula munculnya pedagang kaki lima di Pasar Minggu. Dibawah ini merupakan tabel yang menjadi informan pada penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Nama Informan Penelitian

No.	Nama	Status	Informasi yang diperlukan
1.	Drs. Heryanto (informan kunci)	Camat Pasar Minggu	Mekanisme pelaksanaan program penertiban
2.	Suhanto. MA. P (informan kunci)	Lurah Pasar Minggu	Mekanisme pelaksanaan program penertiban
3.	Muhidin (informan kunci)	Kasatgas Satpol PP di Kelurahan Pasar Minggu	Langkah-langkah pelaksanaan penertiban dan pengawasan
4.	Suryadi (informan kunci)	Anggota petugas Satpol PP di Pasar Minggu	Langkah-langkah pelaksanaan penertiban dan pengawasan
5.	Miratno (Informan Tambahan)	Aparat Kepolisian Metro Polsek Pasar Minggu	Opini terkait keberadaan pedagang kaki lima dan tugasnya dalam membantu Satpol PP
6.	Hadi (informan Tambahan)	Petugas Dinas Perhubungan Golongan A	Opini terkait keberadaan pedagang kaki lima dan tugasnya dalam membantu Satpol PP
7.	Maskut (informan kunci)	Asisten Usaha & Pengembangan PD Pasar Minggu	Jumlah pedagang yang berada di PD Jaya Pasar Minggu
8.	Suryaman (Informan kunci)	Korlap atau ketua Lokasi Binaan	Jumlah pedagang kaki lima di Lokasi Binaan Pasar Minggu
9.	Endang (informan kunci)	Pedagang Sayuran	Kebertahanan nilai usaha pedagang kaki lima sebelum dan setelah adanya penertiban pembinaan.
10.	Muhammad (Informan kunci)	Pedagang Kelapa Parut	Kebertahanan nilai usaha pedagang kaki lima sebelum dan setelah adanya penertiban dan pembinaan.
11.	Siti (Informan kunci)	Pedagang Sarung, Mukena, Handuk dll.	Kebertahanan nilai usaha pedagang kaki lima sebelum dan setelah adanya penertiban dan pembinaan.
12.	Agus (Informan kunci)	Pedagang Buah Pepaya	Kebertahanan nilai usaha pedagang kaki lima sebelum dan setelah adanya penertiban dan pembinaan.
13.	Sri (Informan tambahan)	Pengunjung PD Jaya Pasar Minggu	Opini dari pengunjung tentang keberadaan pedagang kaki lima di pinggir jalan atau bahu jalan
14.	Hj. Neneng (Informan Kunci)	Warga asli Pasar Minggu	Sejarah terbentuknya kota Pasar Minggu

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki langkah-langkah dalam pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.³² Prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis terdapat dua teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer tersebut didapatkan penulis melalui wawancara yang mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui foto-foto atau dokumentasi langsung ke sepanjang Jalan Raya Ragunan, PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Lokasi Binaan, Kelurahan Pasar Minggu dan Kecamatan Pasar Minggu.

Pertama, penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan beberapa informan, baik informan kunci maupun informan tambahan. Selanjutnya, melakukan wawancara secara mendalam dengan bertatap muka langsung disertai dengan membawa pedoman wawancara. Wawancara pertama dilakukan dengan datang ke PD Pasar Jaya Kantor Unit Besar Pasar Minggu yang berada di lantai 2 dengan tujuan untuk menemui dan mewawancarai Ketua PD Pasar Jaya Pasar Minggu yang bernama Maskut (54 Tahun). Dengan mewawancarai beliau, penulis mendapatkan informasi tambahan mengenai pedagang kaki lima yang dipindahkan di kios PD Pasar Jaya Pasar Minggu guna lebih menguatkan data-data yang sudah

³² John W. Creswell, *Op. Cit.*, Hlm: 266.

diperoleh. Selanjutnya, penulis datang ke kios-kios yang berada di PD Pasar Jaya untuk mencari dua informan kunci yaitu dua pedagang yang dahulunya berdagang di trotoar atau pinggir jalan.

Dilanjutkan datang ke Lokasi Binaan dengan bertemu dan mewawancarai Suryaman selaku Ketua atau Korlap di Lokasi Binaan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah pedagang di Lokasi Binaan, persyaratan untuk berdagang di Lokasi Binaan dan pembinaan apa saja yang diberikan kepada pedagang kaki lima. Setelah itu, penulis pun mencari dua informan kunci yaitu 2 pedagang yang berada di Lokasi Binaan untuk melakukan wawancara secara mendalam guna mendapatkan informasi mengenai keberuntungan pedagang kaki lima setelah adanya pembinaan tersebut.

Penulis juga mewawancarai Kasatgas Satpol PP dan anggota Satpol PP yang sedang bertugas dan berjaga di samping PD Pasar Jaya untuk mendapatkan informasi terkait penertiban yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima. Perjalanan selanjutnya yaitu ke Terminal Pasar Minggu dengan mendatangi kantor Dinas Perhubungan di Pasar Minggu untuk melakukan wawancara dengan salah satu petugas bernama Hadi, yang merupakan petugas Dishub Golongan 3A. Informasi yang akan didapatkan berupa opini mengenai keberadaan pedagang kaki lima dan langkah-langkah yang dilakukan dalam membantu Satpol PP melakukan penertiban.

Terakhir, penulis datang ke rumah salah satu warga bernama Hj. Neneng yang tinggal di Jalan Raya Ragunan Gang Bima Jaya 1 RT 005/RW 04 No. 9. Beliau merupakan warga asli dan sudah sejak lama menetap di Pasar Minggu. Informasi yang diperoleh berupa sejarah terbentuknya Pasar Minggu dan awal mula pedagang

datang untuk memadati Jalan Raya Ragunan. Tak lupa, penulis juga mewawancarai ayahnya selaku aparat kepolisian Metro Polsek Pasar Minggu dan informasi yang diperoleh serupa dengan Dinas Perhubungan (Dishub).

Kedua, observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.³³ Observasi pertama dalam penelitian ini dilakukan di sekitar Jalan Raya Ragunan guna mengamati secara langsung kondisi Pasar Minggu setelah adanya penertiban dan pembinaan. Selanjutnya, observasi dilakukan di PD Pasar Jaya dan Lokasi Binaan guna melihat proses pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur terhadap pedagang kaki lima serta melihat proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan aparatur maupun pihak Lokasi Binaan. Terakhir, observasi dilakukan di Kantor Kelurahan Pasar Minggu guna melihat koordinasi sebelum dilaksanakannya penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Ketiga, dokumentasi dan studi pustaka adalah salah satu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen-dokumen kualitatif ini bisa berupa dokumen publik (seperti makalah atau Koran), dokumen privat (seperti diary, buku harian, atau surat) dan foto atau video tape atau objek-objek seni atau software computer atau film.³⁴ Dokumen pertama berupa data-data pedagang kaki lima di Lokasi Binaan dan PD Pasar Jaya. Kedua, data-data mengenai persyaratan berdagang di Lokasi Binaan dan PD Pasar Jaya. Selanjutnya, data-data mengenai surat perintah

³³ John W. Creswell, *Op. Cit.*, Hlm: 267.

³⁴ John W. Creswell, *Op. Cit.*, Hlm: 269–270.

untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Terakhir, dokumentasi berupa foto-foto dalam pelaksanaan penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

1.6.6. Triangulasi Data

Metode yang tepat bagi penelitian kualitatif adalah campuran berbagai sumber data dan berbagai metode. Sumber data dapat berupa manusia, benda, situasi, kejadian atau peristiwa, dan berbagai bentuk tulisan, gambar, grafik, serta bentuk-bentuk grafis lainnya. Dengan adanya sumber data tersebut maka metode yang digunakan juga harus bermacam-macam yaitu angket, wawancara, pengamatan, pencermatan dan lain sebagainya.³⁵

Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu primer (secara langsung) dengan melakukan observasi dan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan yang telah dipilih. Sedangkan, teknik secara tidak langsungnya dengan pengambilan data dari studi-studi pustaka dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kondisi Pasar Minggu, data para pedagang kaki lima, penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima serta data sekunder lainnya. Dengan demikian, penulis pun membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Penulis juga membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang

³⁵ Suharsini Arikunto. 2010. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*". Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm: 25.

dikatakan secara pribadi. Hal ini berkisar pada kondisi Pasar Minggu, aktivitas para pedagang kaki lima, dan aparat yang melakukan penertiban.

Terakhir, penulis membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan. Hasil wawancara yang diperoleh dari Camat Pasar Minggu yang diwakili oleh Ariefuddin selaku staff bagian Kasi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketertiban., Lurah Pasar Minggu yang diwakili oleh staffnya bernama Upiek Mardhawathy, Kasatgas Satpol PP di Kelurahan Pasar Minggu, Anggota Satpol PP, aparat Kepolisian, anggota Dishub, ketua atau korlap di Lokais Binaan dan ketua PD Pasar Jaya serta pedagang kaki lima yang telah dibina. Pada dasarnya kepekaan sangatlah penting dalam pengamatan untuk menguji objektivitas data dengan mencocokkan atau membandingkan antara data yang diperoleh dari kondisi Pasar Minggu dahulu dengan kondisi saat ini setelah adanya penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan memiliki beberapa sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab yaitu Bab I Pendahuluan yang memiliki enam subbab. Subbab pertama adalah latar belakang masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Subbab kedua adalah perumusan masalah yang menjadi fokus dari masalah tertera dalam bentuk beberapa pertanyaan. Subbab ketiga adalah tujuan dan manfaat dari penelitian yang telah diambil oleh penulis. Subbab keempat adalah tinjauan penelitian sejenis yang memaparkan beberapa penelitian sejenis lainnya yang

memiliki kesamaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Subbab kelima adalah kerangka konseptual yang merupakan beberapa konsep yang cocok untuk penelitian ini. Subbab keenam adalah metode penelitian yang terdiri atas pendekatan penelitian, peran peneliti, lokasi & waktu penelitian, subjek penelitian, dan teknik pengumpulan data. Subbab terakhir adalah sistematika penulisan. Bab yang menjadi isi pembahasan dari kajian ini terdiri dari bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat.

Pada Bab II, penulis akan memaparkan mengenai “Dinamika Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Raya Ragunan Pasar Minggu”. Bab ini terdiri dari tiga subbab. Subbab pertama menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya Pasar Minggu. Subbab kedua adalah lokasi keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu. Subbab ketiga adalah latar belakang terbentuknya penertiban pedagang kaki lima. Selanjutnya, pada Bab III dijelaskan mengenai hasil temuan penulis di lapangan yaitu “Proses Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Minggu” yang terdiri atas proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada bab ini juga akan menjelaskan hasil pelaksanaan program penertiban pedagang kaki lima Pasar Minggu dan pembinaan yang diberikan oleh pihak Lokasi Binaan terhadap pedagang kaki lima.

Berikutnya, pada Bab IV berisikan mengenai penertiban pedagang kaki lima Pasar Minggu. Secara lebih rinci menjelaskan tentang penertiban dan pembinaan pedagang dalam bingkai pendidikan behavioristik. Di bab ini juga akan menjelaskan tentang keberterapan pedagang kaki lima dalam struktural fungsional dari perspektif Robert Merton. Pada Bab V sebagai bab penutup akan membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Tidak lupa peneliti juga memberikan

saran sebagai bentuk evaluasi agar program penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima bisa diperbaiki jika terdapat kekurangan dan mampu dijadikan contoh untuk seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia agar bisa menata kotanya lebih baik.

BAB II

DINAMIKA PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN

RAYA RAGUNAN PASAR MINGGU

Pada bab ini, penulis akan menggambarkan mengenai deskripsi umum pedagang kaki lima di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu. Pembahasan ini akan melalui beberapa bagian pertama, yaitu sejarah Pasar Minggu. Penulis akan memaparkan mengenai mengapa Kota yang ada di Jakarta Selatan ini dinamakan Pasar Minggu. Kedua, lokasi keberadaan pedagang kaki lima Pasar Minggu dan ketiga membahas mengenai latar belakang terbentuknya program penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu.

2.1. Sejarah Pasar Minggu

Pasar di Kecamatan Pasar Minggu pada saat lampau, menurut keterangan salah satu penduduk yang merupakan warga asli bertempat tinggal di Jalan Raya Ragunan Gang Bima Jaya 1 RT 005/RW 04 No.9 bernama Hj. Neneng³⁶. Beliau merupakan cucu dari Alm.Hj. Bigul yang dahulunya memiliki banyak kebun di sekitar Pasar Minggu. Pada awalnya Pasar Minggu merupakan pasar buah-buahan yang diperoleh dari kebun-kebun penduduk yang berada di sekitarnya. Gedung-gedung yang saat ini telah berdiri Pusat Perbelanjaan Borobudur, Pusat Perbelanjaan Ramayana, Pusat Perbelanjaan Ananda, Bank BRI, dan Pusat Perbelanjaan sembako

³⁶ Wawancara dengan Hj. Neneng (Warga Asli Pasar Minggu), Maret 2015.

dahulunya hanya perumahan penduduk saja namun di depan halaman rumahnya banyak terdapat pepohonan buah. Berbagai macam pepohonan buah yang ditanami mulai dari rambutan, sawo, kelapa, durian, kecap dan lain sebagainya.

Lokasi awal dari Pasar Minggu tepat berada di Jalan yang saat ini telah berdiri Pusat Perbelanjaan yang diberi nama Robinson yaitu di sebelah timur Stasiun Kereta Api Pasar Minggu. Dahulu Pasar ini dilalui oleh satu-satunya jalan aspal yang menghubungkan Manggarai dengan Depok sebagai ranah perdagangan. Karena para pedagang yang berasal dari Senen, Kemayoran dan sekitarnya memanfaatkan Pasar Minggu sebagai tempat berdagang pakaian, perhiasan, dan barang pecah belah. Sementara itu, pedagang yang berasal dari Condet dan Depok menggelar dagangannya di pinggir jalan seperti layaknya pedagang kaki lima di Pasar Minggu. Pada masa itu, aktivitas perdagangan dilakukan setiap hari, namun keramaian muncul hanya di hari minggu saja. Oleh karena itu, wilayah ini diberi nama dengan Pasar Minggu, yang kemudian digunakan juga sebagai nama Kelurahan dan Kecamatan.

Kegiatan jual beli ini berlangsung seminggu sekali dan dimulai dari sholat subuh (Pukul 04.30 WIB) sampai selesai sholat zhuhur (Pukul 13.00 WIB). Mayoritas pedagang di Pasar Minggu merupakan penduduk di sekitar Pasar Minggu, namun ada beberapa orang yang berasal dari luar. Para pedagang yang berasal dari luar itupun tidak dari luar kota, melainkan berasal dari Depok, Pondok Labu, Ciganjur dan Jagakarsa. Dengan berjalannya waktu dan adanya pemekaran wilayah Jakarta menjadi 5 Kotamadya berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 25 Tahun 1978 yang menetapkan “Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Wilayah Kota dan

Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta”³⁷. Munculnya peraturan baru yang menimbulkan terjadinya perubahan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) 1965—1985. Dengan begitu, Pasar Minggu yang semula sebagai kawasan hijau dan resapan air berubah menjadi kawasan pemukiman penduduk, disamping itu masih tetap dipertahankan sebagai daerah resapan air. Perubahan yang tampak menimbulkan terjadinya penggusuran kawasan pemukiman dan pusat kota kearah pinggiran diantaranya wilayah Pasar Minggu.

Pembangunan pemukiman yang terjadi membawa dampak tersendiri bagi penduduk sekitar. Perubahan pemanfaatan lahan, yang semula dipergunakan sebagai kebun buah menjadi daerah pemukiman penduduk. Hal ini menyebabkan lahan kebun menjadi berkurang dan buah-buahan yang dihasilkan juga ikut berkurang. Selain itu, bertambahnya penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Pasar Minggu secara tidak langsung akan menimbulkan kepadatan penduduk dan hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu, dalam memenuhi semua kebutuhan, pasar yang semulanya hanya berjualan buah saja saat ini sudah merangkap menjadi berjualan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Semakin bertambahnya jumlah pedagang mengakibatkan lahan yang semula hanya berlokasi di Pusat Perbelanjaan Robinson menjadi melebar sampai ke lokasi yang sekarang menjadi gedung PD Pasar Jaya Pasar Inpres serta lahan jalan yang digunakan untuk keluar masuk terminal angkutan umum dan lokasi

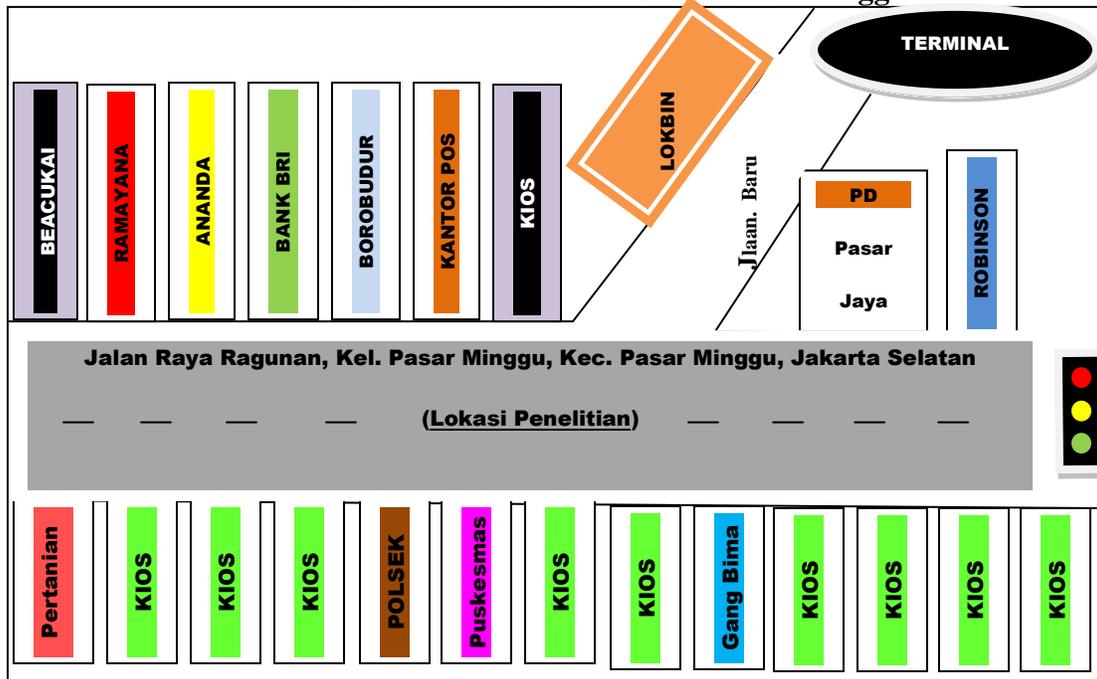
³⁷ Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tersedia di: http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_25_1978.pdf diakses pada 16 Maret 2014 pukul 12.07 WIB.

yang semula hanya digunakan sebagai arena pasar akhirnya dimanfaatkan sebagai Terminal Pasar Minggu. Para pedagang tidak hanya berdagang di lokasi PD Pasar Jaya maupun terminal, tetapi di sepanjang Jalan Raya Ragunan dan Jalan Raya Pasar Minggu para pedagang tetap menggelar dagangannya tersebut. Hal seperti mengakibatkan kondisi di wilayah Pasar Minggu menjadi semakin buruk karena penumpukan pedagang kaki lima dan kendaraan di lokasi yang sama

2.2. Lokasi Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Kecamatan Pasar Minggu merupakan salah satu wilayah yang termasuk Kotamadya Jakarta Selatan yang di dalamnya memiliki Pasar yang terletak di RW 03, Kelurahan Pasar Minggu. Pasar tersebut terbagi menjadi 2, yaitu Pasar Inpres dan Pasar Non-Inpres atau biasa disebut dengan PD Pasar Jaya, lokasinya berada di sudut perempatan Jalan Raya Ragunan dan Jalan Raya Pasar Minggu. Serta terdapat pula pasar yang terbentuk oleh adanya perkumpulan pedagang kaki lima yang berjualan di luar area bangunan pasar tepatnya di trotoar dan pinggir jalan. Para pedagang yang membentuk pasar tidak resmi memang sudah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (1) dan (2). Seperti gambar 2.1. merupakan denah lokasi Pasar Minggu yang tertera dibawah ini:

Gambar 2.1. Denah Lokasi Pasar Minggu



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015

Lokasi-lokasi tersebut mulai dari depan Beacukai sampai dengan depan Pusat Perbelanjaan Robinson. Para pedagang berjualan dari atas trotoar hingga ke badan jalan raya sampai memenuhi satu jalur jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran berlalu lintas. Sepanjang Jalan Raya Ragunan merupakan jalan untuk keluar masuk Terminal dan pedagang kaki lima pun memadatnya sampai jalur kearah masuk Terminal Pasar Minggu. Selain itu, pedagang kaki lima berjualan mulai dari depan pertokoan, saluran air yang telah ditutup dengan papan, di atas trotoar dan di badan jalan hingga memenuhi satu jalur jalan raya. Hal ini menyebabkan jalan yang menuju kearah Terminal menjadi padat dan kesulitan bagi angkutan umum yang ingin masuk kearah Terminal. Disisi lain, terdapat pula

pedagang yang menggelar dagangannya tersebut mulai dari depan Beacukai sampai Pusat Perbelanjaan Robinson dan dari depan Pusat Perbelanjaan Robinson sampai dibawah jembatan penyebrangan. Seperti gambar 2.2. yang tertera dibawah ini:

Gambar 2.2.
Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015

Kondisi demikian memang sangat tidak teratur, para pedagang yang bebas berjualan dimanapun merupakan faktor dari belum adanya ketegasan dari Pemerintah untuk menata Pasar Minggu. Kegiatan perdagangan bebas dilakukan di sepanjang Jalan Raya Ragunan memang terjadi sudah sejak lama seperti yang diungkapkan oleh salah satu penduduk yang sudah sejak lama tinggal di Pasar Minggu yaitu Hj. Neneng:

“Lah saya tinggal disini mah udeh lama banget de, alm engkong saya aje orang sini. Nah kalo pedagang kaki lima mah emang udeh rame disini, dari jaman saya lahir aje udeh rame banget.”³⁸

³⁸ Wawancara dengan Hj. Neneng (penduduk asli Pasar Minggu), Maret 2015.

Perdagangan bebas terjadi di sepanjang Jalan Raya Ragunan dan Jalan Raya Pasar Minggu tepatnya di trotoar dan pinggir jalan. Peristiwa seperti ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat karena fungsi lahan jalan yang disalahgunakan oleh para pedagang. Di sisi lain, kehadiran pedagang di trotoar dan pinggir jalan memberikan dampak positif bagi masyarakat pada umumnya yaitu kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perdagangan bebas yang semakin dibiarkan dan berlanjut lebih lama, tanpa adanya sikap yang tegas dari Pemerintah untuk menangani persoalan ini. Maka akan menimbulkan semakin bertambahnya pendatang dari daerah yang mengadu nasib di Jakarta khususnya Pasar Minggu. Beragam pendatang hadir untuk ikut berdagang dengan menggelar lapak dagangannya di trotoar maupun pinggir jalan. Seperti pedagang lainnya yang berdagang di sepanjang Jalan Raya Ragunan agar tetap bertahan hidup di Jakarta. Perdagangan bebas yang terjadi di Pasar Minggu dahulu, memang dikatakan agak rawan dan mengerikan. Penjelasan ini diungkapkan langsung oleh penduduk asli Pasar Minggu yang tinggal di Jalan Raya Ragunan Gang Bima Jaya 1 RT 005/RW 04 No. 9 Jakarta Selatan, yaitu Hj. Neneng:

“Pedagang kaki lima sebelumnya bebas dek, dulu ade orang yang dagang di Pasar dulu-dulunya agak rawan banget umpamanya ngga boleh ini itu atau dilarang macem-macem sama keamanan di lingkungan PD juga. Pasti 2 ampe 3 hari petugasnya entuh langsung sakit parah kaya muntah darah gitu dek”³⁹.

³⁹ Wawancara dengan Hj. Neneng (penduduk asli Pasar Minggu), Maret 2015.

2.3. Latar Belakang Terbentuknya Program Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Dahulu kala kondisi Pasar Minggu sungguh memprihatinkan, penyebabnya adalah karena penumpukan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Ragunan. Pedagang kaki lima tidak hanya warga asli DKI Jakarta saja, namun ada beberapa yang berasal dari daerah untuk mengadu nasib di Jakarta. Penumpukan pedagang yang terlalu banyak seperti ini menyebabkan kondisi Pasar Minggu menjadi semakin tidak tertib dan sulit untuk diaturnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pedagang buah semangka dan melon:

“Pasar Minggu dulu, yaa... Kalo dulu mah Pasar Minggu yaa begitulah, macet, berantakan. Kan dimana-mana banyak orang dagang sampe ke depan-depan, nyebar sampe kemana-mana. Full dulu mah, dari Ramayana sampe Robinson, depan taman pertanian, lampu merah di sebelah kanan kiri penuh pedagang semua. Pedagangnya juga banyak banget, lebih dari seratus orang, seribu orang lebih ada kali tiga ribu orang.”⁴⁰

Kondisi demikian dikarenakan masih diberikan kebebasan untuk berdagang di lokasi manapun. Di samping itu, belum ditetapkannya kebijakan baru dari Pemerintah untuk merubah ketidakteraturan dari pedagang kaki lima, serta belum adanya tindakan tegas dari aparaturnya untuk melakukan pengusuran terhadap pedagang kaki lima. Hal ini menimbulkan pedagang kaki lima merasa bebas untuk berdagang di lokasi terlarang dengan memanfaatkan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat mereka menggelar dagangannya.

⁴⁰ Wawancara dengan Khoiri (pedagang buah semangka dan melon), Februari 2015.

Kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima memang sangat menarik perhatian masyarakat sekitar Pasar Minggu. Tidak hanya itu, banyak pengunjung dari wilayah lain yang ikut terlena dengan dagangan yang di perjual-belikan. Berbagai jenis dagangan yang telah di perjual-belikan antara lain: celana jeans, kemeja, kaos oblong, pakaian dalam pria dan wanita, sepatu, sandal, gesper dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, berbagai jajanan makanan tersedia di sini seperti pedagang roti, pedagang gorengan, pedagang es dawet, pedagang ketoprak, pedagang nasi goreng, pedagang bubur ayam, pedagang buah, pedagang sayuran dan masih banyak lagi.

Setiap hari banyaknya pedagang kaki lima yang berlomba-lomba untuk berdagang di lokasi ini dan banyaknya volume kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang melintasi wilayah Pasar Minggu. Hal inipun menimbulkan kepadatan yang berdampak pada kemacetan lalu lintas karena adanya ketidakseimbangan antara luas jalan raya dengan pengguna jalan . Pada sabtu malam atau sering disebut dengan malam minggu, kemacetan justru semakin meningkat dari hari biasa. Karena banyaknya kendaraan yang melintasi dan pedagang kaki lima yang semakin berkembang, sehingga lokasi berdagang menjadi semakin melebar sampai ke badan jalan.

Keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dan pinggir jalan memang sangat mengganggu masyarakat sekitar dan kendaraan yang melintasi. Apalagi di wilayah ini terdapat “Terminal Pasar Minggu” menyebabkan berbagai macam angkutan umum melintasi wilayah ini seperti Metromini, Kopaja, Miniarta, dan Mikrolet. Banyaknya

jumlah kendaraan yang melintasi dan sekumpulan pedagang kaki lima yang memadati bahu jalan membuat jalanan menjadi semakin padat merayap. Keadaan demikian menyebabkan masyarakat merasa dirugikan, karena terjadinya kemacetan total di Pasar Minggu berdampak pada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Meskipun, perjalanan yang ditempuh sudah lebih awal, namun tetap saja mengalami kemacetan.

Sejak pukul 00.00 WIB pedagang kaki lima sudah mulai memadati jalan Raya Ragunan, tepatnya pedagang kaki lima dari depan Beacukai sampai dengan depan Stasiun Pasar Minggu. Mereka membuka lapak dagangannya sampai pukul 06.00 WIB. Jenis pedagang yang ada pada dini hari adalah pedagang sayur-mayur saja. Ketika pukul 07.00 WIB, Jalan Raya Ragunan sudah mulai ditertibkan oleh petugas Satpol PP dan dibersihkan oleh petugas kebersihan yang mengangkut sampah. Selanjutnya, pada siang hari operasi jual-beli tetap dilakukan pedagang kaki lima yang tak kunjung berhenti. Berderetan pedagang buah sudah berada di wilayah ini dan siap untuk memperjual-belikan dagangannya.

Tidak hentinya para pedagang kaki lima memadati Jalan Raya Ragunan, kehadiran pedagang kaki lima dilanjutkan kembali pada sore hingga malam hari. Kehadiran pedagang kaki lima mulai dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB. Berbagai jenis barang dagang yang diperjual-belikan, seperti: celana jeans, kemeja, kaos oblong, pakaian dalam pria dan wanita, sepatu, sandal, gesper dan lain sebagainya. Jalan Raya Ragunan ketika malam hari terjadilah “Pasar Kaget”. Dimana pedagang kaki lima menjual dagangannya dengan harga yang relatif lebih murah.

Kegiatan jual-beli yang dilakukan pedagang kaki lima dengan cara mengobrol dagangannya membuat masyarakat yang tinggal di sekitar maupun di luar Pasar Minggu menjadi tergiur untuk melihat dan membeli barang dagangannya. Pada Sabtu malam, kemacetan semakin tidak terkendali dengan banyaknya kendaraan yang melintasi wilayah Pasar Minggu. Di samping itu semakin bertambahnya pedagang kaki lima yang terus berdatangan untuk menggelar barang dagangannya hingga memenuhi ke badan jalan. Kegiatan perdagangan seperti ini berlangsung setiap hari meskipun pedagang kaki lima selalu mengalami pengrusakan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Namun demikian, tidak membuat para pedagang merasa jera, justru tetap berani dan nekat berdagang di trotoar maupun pinggir jalan. Semua ini dilakukan atas dasar tuntutan ekonomi guna mendapatkan penghasilan yang maksimal dan pelanggan yang lebih banyak.

Seiring berjalannya waktu, Gubernur DKI Jakarta yang dipimpin oleh Pak Jokowi membuat perubahan di Pasar Minggu. Dengan diadakannya sebuah tindakan sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007 mengenai ketertiban umum yang kemudian diterapkan dan dilaksanakan oleh aparaturnya terkait. Dengan berawal dari melakukan musyawarah yang dihadiri oleh beberapa pihak terkait seperti Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu, Kasatgas Satpol PP di Kecamatan Pasar Minggu, Kasatgas Satpol PP di Kelurahan Pasar Minggu, POLRI, TNI, Dishub, Ketua Lokasi Binaan, dan Ketua PD Pasar Jaya.

Setelah diadakan musyawarah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Pasar Minggu, maka dibuatlah sebuah solusi dengan menciptakan suatu program

penertiban yang terpacu dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2). Penertiban dilakukan atas dasar membersihkan jalan raya dari tumpukan pedagang kaki lima di trotoar maupun pinggir jalan, agar terciptanya kelancaran dalam berlalu lintas dan pemandangan di Pasar Minggu terlihat lebih indah. Selain itu, adanya pembinaan dari aparaturnya maupun pihak Lokasi Binaan sehingga pedagang kaki lima dapat tertata rapih dan akan bertahan di Lokasi Binaan. Tercapainya hasil maksimal dengan cara melakukan perencanaan yang sangat matang agar pelaksanaan program penertiban dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan demikian, membutuhkan jumlah aparaturnya yang cukup banyak dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima meliputi: Satpol PP, TNI, POLRI dan Dinas Perhubungan (Dishub). Selanjutnya, pelaksanaan penertiban dilaksanakan sesuai dengan pembagian jadwal yang telah diatur sebelumnya. Terakhir, proses pengawasan harus tetap dilaksanakan setelah dilaksanakannya penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Pelaksanaan pengawasan diharapkan agar wilayah Pasar Minggu tetap terpantau dengan baik. Hal ini berdampak positif yaitu para pedagang kaki lima dapat merasa jera dan tidak akan kembali lagi ke lokasi terlarang seperti: trotoar, halte, taman, jembatan penyebrangan, jalan raya dan tempat umum lainnya. Setelah semua terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2), maka terciptalah hasil yang telah diharapkan oleh berbagai pihak yaitu kondisi Pasar Minggu terlihat lebih baik dan indah serta pedagang kaki lima tertata rapih di tempat penampungan.

BAB III

PROSES PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

PASAR MINGGU

Program penertiban pedagang kaki lima memiliki suatu proses sosial dalam pelaksanaannya. Proses sosial tersebut diikuti oleh para pedagang kaki lima dan aparaturnya yang melaksanakan program penertiban. Pada bab ini, penulis akan mendeskripsikan bagaimana bentuk interaksi dan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya menciptakan kota yang bersih, indah dan nyaman di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bab ini akan menjelaskan mekanisme program penertiban pedagang kaki lima yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu terdapat pula hasil yang diperoleh setelah program penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan.

3.1. Mekanisme Program Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Minggu

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, program penertiban pedagang kaki lima merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan dibantu beberapa aparat terkait sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Program penertiban pedagang kaki lima dilakukan dengan memiliki mekanisme dalam penerapan maupun pelaksanaannya. Mekanisme tersebut terdiri atas perencanaan sebelum program

penertiban dilaksanakan, proses pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dan pengawasan setelah penertiban dilaksanakan. Mekanisme pelaksanaan ini menjadi sebuah pola terstruktur dalam pelaksanaan program penertiban pedagang kaki lima di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu.

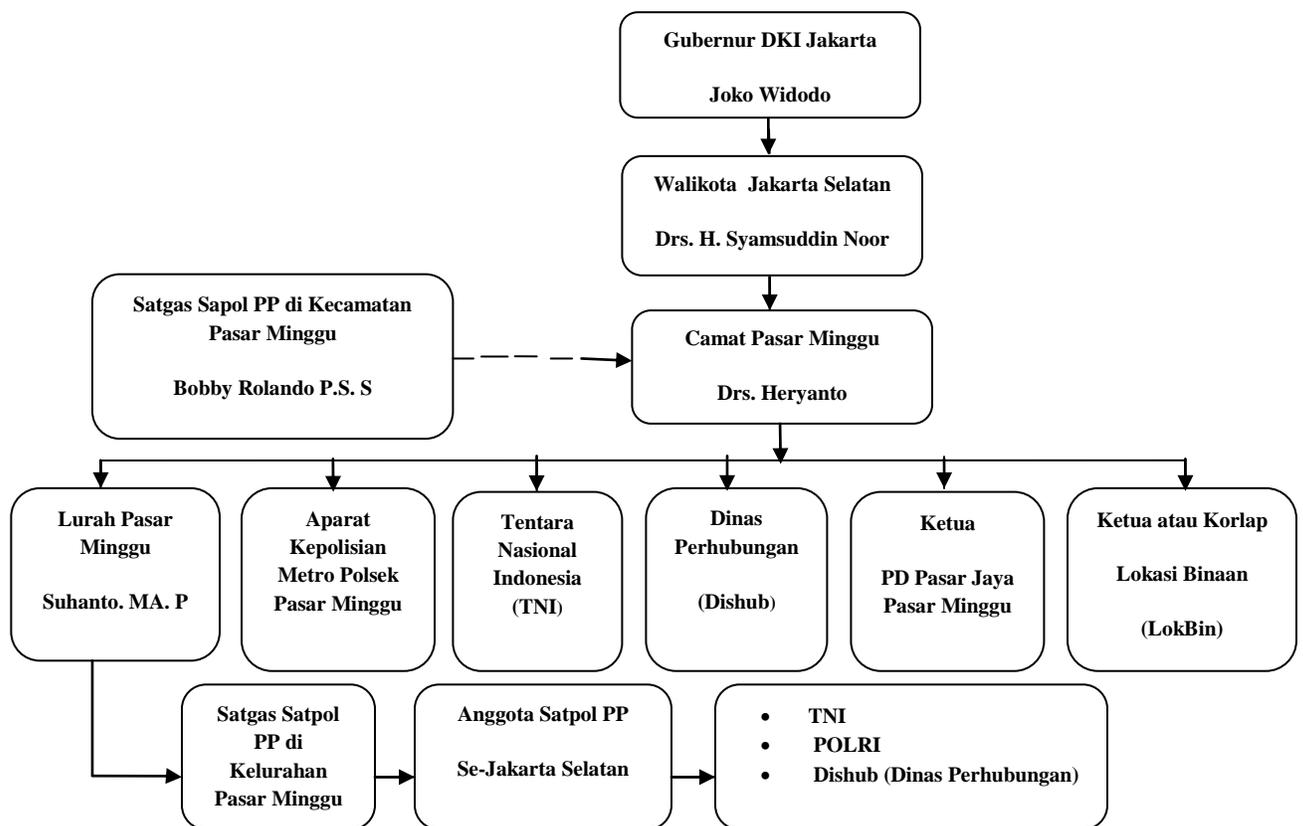
3.1.1. Proses perencanaan program penertiban

Jika dilihat kondisi Pasar Minggu dahulu tepatnya di Jalan Raya Ragunan Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memang sangat tidak teratur dan tertib. Kondisi yang semberawut dengan tumpukan beribu pedagang yang memadati Jalan Raya Ragunan dan tumpukan sampah-sampah yang berserakan di jalan membuat wilayah Pasar Minggu terlihat lebih kotor, kumuh dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ditambah lagi dengan puluhan kendaraan yang selalu melintasi wilayah Pasar Minggu mulai dari kendaraan pribadi hingga berbagai angkutan umum. Peristiwa seperti ini membuat kondisi Pasar Minggu menjadi padat merayap dan kendaraan sulit bergerak. Setiap hari pengguna jalan maupun masyarakat sekitar merasakan kemacetan yang terjadi di wilayah ini.

Kondisi demikian membuat Gubernur DKI Jakarta yang dahulu dipimpin oleh Jokowi bergerak cepat mencari solusi dari permasalahan pedagang kaki lima di Pasar Minggu yaitu melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Perencanaan dilaksanakan dalam upaya menciptakan kota yang bersih, indah, nyaman dan aman. Selain itu, perencanaan juga dapat mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi di wilayah Pasar Minggu. Hal ini dilaksanakan dengan koordinasi beberapa pihak terkait

dalam perencanaan penertiban pedagang kaki lima. Pihak-pihak terkait terdiri atas: Walikota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pasar Minggu, Ketua PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Ketua Lokasi Binaan dan Suku Dinas (Kasatgas Satpol PP, Petugas Satpol PP, Aparat Kepolisian Metro Polsek Pasar Minggu, TNI, Dinas Perhubungan atau Dishub). Seperti bagan 3.1. mengenai struktur organisasi dalam program penertiban pedagang kaki lima di bawah ini:

Bagan 3.1.
Struktur Organisasi Dalam Program Penertiban Pedagang Kaki Lima



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015

Program penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu dipimpin oleh Drs. Heryanto, beliau merupakan Camat Pasar Minggu. Selain itu terdapat Lurah Pasar Minggu yang dipimpin oleh Suhanto. MA. P, beliau termasuk seseorang yang ikut bertanggung jawab dalam program penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu. Sebelum program penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan, terlebih dahulu mengadakan rapat yang di musyawarahkan dengan beberapa pihak terkait meliputi: Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu, Satgas Kecamatan Pasar Minggu, Satgas Kelurahan Pasar Minggu, Ketua PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Ketua Lokasi Binaan, dan perwakilan dari salah satu masyarakat. Setelah rapat tersebut dilaksanakan dan di musyawarahkan, maka langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan pendataan terlebih dahulu dengan cara mengumpulkan data pedagang kaki lima di lokasi asal, jumlah dagangan dan jenis dagangan. Setelah itu, mengambil tindakan dengan pencarian lokasi strategis sebagai tempat penampungan yang sekiranya cukup untuk menampung seluruh pedagang kaki lima dan lokasinya sudah mendapatkan izin dari Pemerintah.

Sekitar tahun 2002, maka ditemukanlah lahan yang cukup luas dan lokasinya terbilang cukup strategis yaitu di belakang Pasar yang berdekatan dengan Terminal Pasar Minggu. Lahan tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah untuk dibangunnya sebuah tempat penampungan pedagang kaki lima. Hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir keberadaan pedagang kaki lima dan mengurangi dampak buruk dari kehadiran pedagang kaki lima di pinggir jalan . Setelah lahan tersebut diizinkan oleh Pemerintah, maka sekitar tahun 2003 dibangunlah sebuah tempat penampungan

pedagang kaki lima yang diberi nama Lokasi Binaan atau Lokbin. Lokasi Binaan dipimpin dan diketuai oleh H. Suryaman dengan dibantu oleh Hendra yang berjabat sebagai Bendahara di Lokasi Binaan dan Burhan yang berjabat sebagai Sekretaris di Lokasi Binaan. Seperti gambar 3.1. merupakan tempat penampungan pedagang kaki lima yang diberi nama Lokasi Binaan, sebagai berikut:

Gambar 3.1. Lokasi Binaan Pasar Minggu (LokBin)

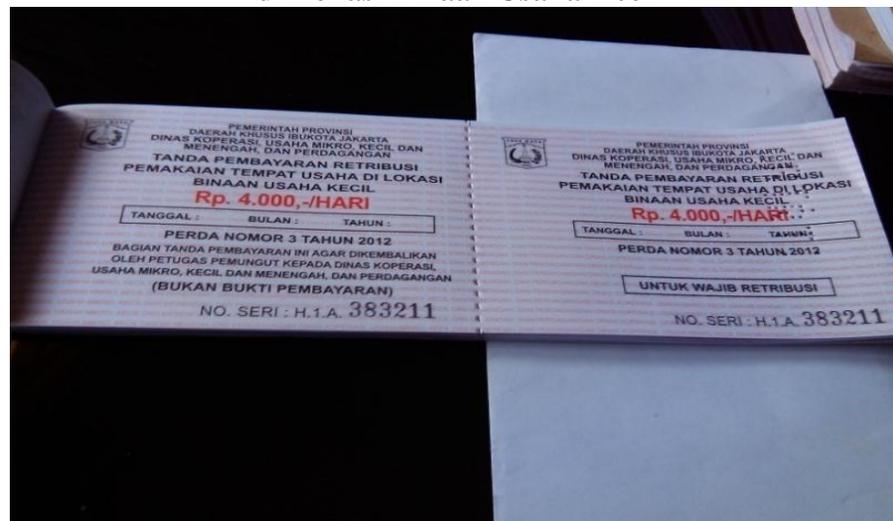


Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015

Proses pembangunan Lokasi Binaan berjalan kurang lebih selama satu tahun. Sekitar tahun 2003, maka Lokasi Binaan mulai dioperasikan dan tahun 2004 sudah mulai ditempati oleh pedagang kaki lima. Namun, pedagang kaki lima di pinggir Jalan Raya Ragunan belum seluruhnya masuk ke dalam Lokasi Binaan. Masih banyak pedagang yang nakal untuk tetap berdagang di pinggir jalan. Karena letak Lokasi Binaan terlihat sangat jauh, membuat pedagang kaki lima tidak menerima untuk direlokasikan. Oleh sebab itu, para pedagang masih berani untuk menggelar dagangan di pinggir jalan, walaupun setiap hari harus mengalami pengusuran dari petugas Satpol PP.

Lokasi binaan memang sengaja dibangun oleh Pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari keberadaan pedagang kaki lima di trotoar maupun pinggir jalan. Lokasi binaan dibangun bertujuan untuk penempatan pedagang kaki lima ke lokasi yang diperbolehkan dan sesuai dengan aturan. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan Lokasi Binaan sepenuhnya dari Pemerintah tanpa pungutan liar dari pedagang kaki lima. Hal ini berlangsung hanya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 saja, namun mulai tahun 2012 sampai akhir tahun 2014 para pedagang sudah harus dipunguti uang sebesar Rp 4000,00 per-harinya. Pungutan uang ini digunakan untuk biaya kebersihan dan keamanan (satpam). Jumlah dari petugas kebersihan sebanyak tujuh orang dan petugas keamanan (satpam) sebanyak empat orang. Seperti gambar 3.2. yang tertera dibawah ini:

Gambar 3.2.
Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pemakaian Tempat Usaha
di Lokasi Binaan Usaha Kecil



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015

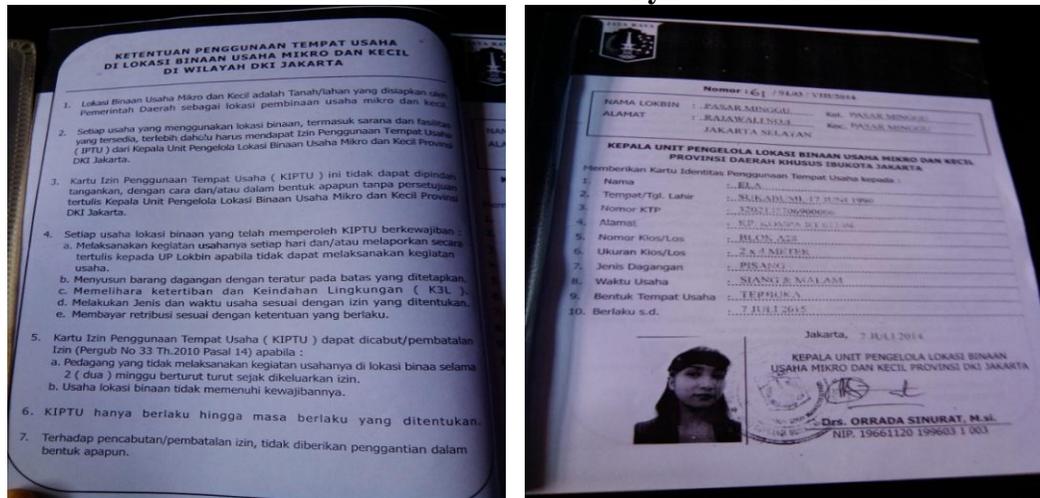
Seiring berjalannya waktu, sekitar awal bulan Januari 2015 maka ditetapkan peraturan baru yang menyatakan bahwa para pedagang kaki lima harus memiliki auto debet seperti peraturan di PD Pasar Jaya. Para pedagang kaki lima diwajibkan membuka rekening tabungan pada salah satu Bank yang ditunjuk yaitu Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank OCBC NISP, Bank BTN Syariah, dan Bank BCA. Para pedagang kaki lima diwajibkan membayar uang sewa kios di Lokasi Binaan melalui auto debet yang telah dibuatnya sebesar Rp127.000,- setiap bulan.

Para pedagang kaki lima yang ingin menempati kios yang berada di Lokasi Binaan harus memenuhi beberapa persyaratan, meliputi fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP, foto berukuran 4x6. Lokasi Binaan memang sangat ketat, oleh karena itu pedagang diwajibkan memenuhi persyaratan diatas jika ingin berdagang di Lokasi Binaan. Sebab, pedagang yang merupakan warga pendatang atau yang tidak memiliki KTP asli DKI Jakarta, awalnya tidak diperbolehkan berdagang di Lokasi Binaan karena Lokasi Binaan lebih memprioritaskan pedagang yang memiliki KTP asli DKI Jakarta. Namun, setelah dimusyawarahkan dan diizinkan oleh Pemerintah maka pedagang yang tidak memiliki KTP asli DKI Jakarta tetap diperbolehkan berdagang di Lokasi Binaan tetapi harus domisili terlebih dahulu ke RT, RW dan Kelurahan setempat.

Di Lokasi Binaan terdapat pula peraturan yang diterapkan yaitu pedagang yang telah menempati Lokasi Binaan diwajibkan untuk satu KK (Kartu Keluarga) mendapatkan satu kios saja, tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu kios. Bagi pedagang yang tidak berdagang selama tiga bulan berturut-turut maka akan

digantikan oleh pedagang lain karena dianggap sudah tidak berjualan lagi. Seperti gambar 3.3. yang tertera dibawah ini:

Gambar 3.3. Ketentuan Penggunaan Tempat Usaha Di Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil Di Wilayah DKI Jakarta.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015

Di sisi lain terdapat tempat penampungan yang digunakan untuk pedagang kaki lima yaitu Perusahaan Daerah Pasar Jaya (PD Pasar Jaya) di wilayah Pasar Minggu. PD Pasar Jaya diketuai oleh Maskut (54 Tahun), beliau merupakan Asisten Usaha dan Pengembangan.PD Pasar Jaya di Pasar Minggu. PD Pasar Jaya memiliki tiga struktur organisasi terdiri atas seksi keuangan, seksi usahan dan pengembangan, serta seksi teknik. PD Pasar Jaya di Pasar Minggu memiliki lima Blok yang terdiri dari Blok B, Blok C, Blok D, Blok E dan Blok F. Namun, Blok yang dipergunakan untuk pedagang kaki lima hanya kios yang berada di Blok B dan Blok C. Seperti Gambar 3.4. dan 3.5. yang tertera dibawah ini:

Gambar 3.4.
PD Pasar Jaya Pasar Minggu



Gambar 3.5.
Denah Tempat Penampungan PD Pasar Jaya Pasar Minggu



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015

Persyaratan yang harus dipenuhi pedagang jika ingin berdagang di dalam kios PD Pasar Jaya Pasar Minggu tidak berbeda jauh dengan persyaratan di Lokasi Binaan. Persyaratan tersebut berupa pedagang harus menyerahkan fotokopi KTP, foto berukuran 2x3, dan mengisi surat izin pemakaian tempat usaha serta ditandatangani diatas materai. Pengguna kios yang ada di PD Pasar Jaya Pasar Minggu diwajibkan membayar uang sewa sesuai dengan luas kios yang ditempati. Dahulu setiap pembayaran sewa kios di PD Pasar Jaya menggunakan karyawan untuk meminta uang sewa kepada seluruh pedagang. Namun, penggunaan karyawan sebagai pengambil uang sewa kios tersebut tidak berjalan selamanya.

Mulai tanggal 17 Desember 2014, para pedagang yang memiliki kios di PD Pasar Jaya diwajibkan memiliki atau membuka rekening tabungan disalah satu Bank yang sudah tertera di surat pemberitahuan. Surat tersebut dibuat oleh Manager UPB (Unit Pasar Besar) Pasar Minggu. Hal ini digunakan untuk mempermudah

pedagang ketika ingin membayar uang sewa kios. Sehingga, karyawan yang biasa bertugas mengambil uang sewa kios tidak harus berkeliling ke setiap kios yang ada di PD Pasar Jaya Pasar Minggu.

Pelaksanaan auto debet pembayaran biaya pengelola pasar di PD Pasar Jaya Pasar Minggu memiliki beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi: *Pertama*, pedagang di PD Pasar Jaya membuka rekening tabungan di salah Bank yang ditunjuk seperti Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank OCBC, Bank BTN Syariah dan Bank BCA. *Kedua*, bagi Para pedagang yang sudah memiliki nomor rekening disalah satu Bank diatas, agar mendaftarkan nomor rekening yang dimiliki dengan melampirkan copy buku rekening dan KTP. *Ketiga*, para pedagang menyerahkan copy buku tabungan (hanya lembar yang tertera nomor rekening) kepada kepala pasar dan menandatangani Surat Kuasa Pemotongan Rekening Tabungan (Pendebetan) senilai kewajiban BPP. *Keempat*, setiap pedagang wajib mengisi tabungan, agar jumlah uang cukup pada saat dilakukan pemotongan rekening tabungan. *Kelima*, pemotongan rekening tabungan (Pendebetan) dilakukan setiap tanggal 20. *Keenam*, jika pada saat pemotongan rekening tabungan uang tidak cukup, maka pedagang akandikenakan sanksi sesuai ketentuan PD Pasar Jaya. *Ketujuh*, untuk menghindari pembatalan, agar pedagang mengisi kembali rekening tabungan. *Terakhir*, jika rekening tabungan tidak bisa dipotong kembali, maka tempat usaha akan dilakukan penutupan sementara sampai dengan pembatalan sesuai ketentuan PD Pasar Jaya. Seperti gambar 3.6.; 3.7.; dan 3.8. yang tertera dibawah ini:

Gambar 3.6. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha



Gambar 3.7. Surat Pemberitahuan Pembuatan Rekening Baru



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015

Gambar 3.8. Pelaksanaan Auto Debet Pembayaran Pengelolaan Pasar (BPP) di Pasar-pasar PD Pasar Jaya



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015

Untuk penempatan lokasi bagi para pedagang kaki lima yang dipindahkan ke PD Pasar Jaya maupun Lokasi Binaan dilakukan secara adil. Langkah yang dilakukan untuk penempatan lokasi yaitu dengan pengambilan undian. Dimana undian dibuat sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkan dan setiap pedagang diwajibkan

untuk mengambil undian agar mengetahui lokasi yang akan dipakainya. Pembagian penempatan dilakukan agar tidak ada kecurangan dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara pedagang yang satu dengan pedagang lainnya.

Dengan tersedianya tempat penampungan untuk para pedagang kaki lima diharapkan dapat membuat kondisi Pasar Minggu terlihat lebih tertib dan indah. Penertiban dilakukan agar munculnya kesadaran dari pedagang kaki lima akan peraturan yang melarang berdagang di tempat umum. Dengan demikian dapat mengurangi dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat maupun bagi pengguna jalan raya. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya kemacetan lalu lintas saja, melainkan dapat terjadi kejahatan dan kecelakaan lalu lintas.

Pelaksanaan program penertiban pedagang kaki lima ditargetkan dapat membersihkan jalan Raya Ragunan dari ribuan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Raya Ragunan tepatnya dari depan Beacukai sampai Pusat Perbelanjaan Robinson, dari depan warung pempek Pak Jenggot sampai pintu masuk kearah terminal, dari depan Pusat Perbelanjaan Robinson sampai lampu merah di Jalan Raya Pasar Minggu bisa mencapai 3000 orang pedagang. Keberadaan pedagang kaki lima yang sangat banyak inilah membutuhkan ratusan petugas untuk menertibkan dan membina pedagang kaki lima di Pasar Minggu.

Oleh karena itu, diturunkan 150 petugas Satpol PP yang tergabung ke dalam kelompok Satpol PP se-Jakarta Selatan. Ditambahkan dengan aparat Kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan yang masing-masing diturunkan sebanyak 10 orang. Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, sebenarnya yang bekerja lebih keras

adalah Satpol PP. Karena beberapa aparaturnya yang lain seperti TNI, POLRI dan Dinas Perhubungan (Dishub) hanya sekedar membantu Satpol PP dan berada di belakang Satpol PP untuk memantau dan menjaga Satpol PP apabila terjadi keriuhan dan perlawanan dari pedagang kaki lima.

3.1.2. Proses Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima

Program penertiban pedagang kaki lima mulai dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun, dalam pelaksanaan masih belum sepenuhnya 100% berhasil. Karena kurangnya kesadaran dari para pedagang menyebabkan mereka bertahan di lokasi terlarang. Di satu sisi, aparaturnya juga belum bertindak tegas dalam upaya melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Akibatnya, pedagang kaki lima tetap berani menggelar dagangannya dan keluar masuk di kawasan Jalan Raya Ragunan tepatnya dari depan Beacukai sampai depan Pusat Perbelanjaan Robinson. Seperti yang dikatakan oleh H. Suryaman selaku Korlap atau Ketua Lokasi Binaan Pasar Minggu:

“Iya pedagang mah dulu kalo ngga ada petugas langsung maju, pada gelar dagangannya mba. Tapi kalo ada petugas yang lagi jaga atau keliling-liling nih langsung dah pada mundur semua, pasti langsung buru-buru ngerapihin dagangan terus kabur”⁴¹

Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, setiap pagi hari tepatnya pukul 06.00 WIB penertiban hanya sekedar melakukan pengusuran terhadap pedagang kaki lima di trotoar maupun pinggir jalan. Ketika pukul 07.00 WIB tiba, Jalan Raya Ragunan mulai dibersihkan oleh petugas kebersihan sampai pengangkutan sampah ke

⁴¹ Wawancara dengan Korlap atau Ketua Lokasi Binaan Pasar Minggu, pada Februari 2015.

truk Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Namun, kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima masih tetap berlangsung. Karena tibanya pedagang kaki lima dan menggelar dagangannya sekitar pukul 08.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Kemudian dilanjutkan lagi dari pukul 22.00 sampai pukul 08.00 WIB. Ketika kondisi Pasar Minggu yang semakin hari semakin tidak teratur dengan penumpukan kendaraan dan penumpukan pedagang kaki lima membuat Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Jokowi geram akan permasalahan di Pasar Minggu. Dengan permasalahan yang semakin kompleks mengenai ketidaktertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan, membuat Gubernur DKI Jakarta bergerak cepat dan segera turun tangan untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima agar keberadaannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Sekitar tahun 2013 tepatnya pada bulan Agustus, kebijakan yang sudah ditetapkan yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) pun mulai diterapkan dan dilaksanakan dengan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Penertiban yang dilakukan membutuhkan beberapa pihak terkait guna keberhasilan dalam program ini. Dengan diturunkannya 150 petugas Satpol PP se-Jakarta Selatan dengan dibantu oleh aparat Kepolisian, TNI dan Dinas Perhubungan (Dishub) yang masing-masing berjumlah sepuluh orang. Semua aparat yang terlibat dalam penertiban berkumpul secara bersamaan di Kelurahan Pasar Minggu, sebelum turun ke lapangan untuk melaksanakan apel pagi. Seperti Gambar 3.9 yang tertera dibawah ini:

Gambar 3.9.
Pelaksanaan Apel Pagi di Kelurahan Pasar Minggu



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015

Proses pelaksanaan penertiban dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima dengan merelokasikan pedagang kaki lima ke Lokasi Binaan. Di samping itu, penertiban dilakukan dengan terpacu ke dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum yang tercantum lebih rinci didalam Pasal 25 Ayat (2) yang berbunyi “*setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberang orang dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1)*”. Dimana pasal sebelumnya tersebut yaitu ayat (1) yang berbunyi “*Gubernur menunjuk atau menetapkan bagian-bagian jalan atau trototar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima*”.⁴²

Para pedagang yang masih nakal berdagang di trotoar maupun pinggir jalan akan segera ditindaklanjuti oleh petugas Satpol PP. Apabila dengan memberikan

⁴² Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta, Op. Cit., Hlm 8.

teguran pertama dan teguran kedua terhadap pedagang kaki lima, namun tidak mengalami perubahan. Dalam arti, pedagang kaki lima masih berdagang di trotoar maupun pinggir jalan maka petugas Satpol PP akan mengambil tindakan yaitu mengambil barang dagangan milik pedagang kaki lima secara paksa dan membawanya ke Kantor Kecamatan Pasar Minggu. Seperti gambar 3.10. yang tertera di bawah ini:

Gambar 3.10.
Pedagang Berjualan di Pinggir Jalan Akan Diangkut Dagangannya ke Kantor Kecamatan Pasar Minggu



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015

Pelaksanaan penertiban dilakukan dengan menurunkan 150 Satpol PP yang terbagi menjadi dua shift, yaitu shift pertama dan shift kedua. Shift pertama dilakukan pada siang hari berjumlah 75 Satpol PP. Shift keduanya dilakukan pada malam hari berjumlah 75 Satpol PP. Dari kedua shift tersebut ditambahkan dengan Polisi, TNI, dan Dinas Perhubungan (Dishub) yang masing-masing berjumlah 10 orang. Beberapa aparaturnya yang terlibat dalam proses penertiban dilakukan hanya

sekedar membantu Satpol PP saja, apabila pedagang kaki lima berusaha untuk memberontak atau memberikan perlawanan terhadap Satpol PP.

Pemberontakan dilakukan pedagang kaki lima bisa membahayakan petugas Satpol PP. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah kerjasama yang terjalin bersama TNI, POLRI dan Dinas Perhubungan (Dishub). Dalam proses penertiban pedagang kaki lima memang terbilang tidak mudah, karena prosesnya secara bertahap dan membutuhkan waktu. Kebiasaan masyarakat dahulu yang sering membeli kebutuhan pokok di trotoar dan pinggir jalan berpengaruh besar terhadap mental dan psikologis dari para pedagang kaki lima. Sehingga, membuat para pedagang enggan dan sulit untuk pindah ke Lokasi Binaan maupun ke PD Pasar Jaya Pasar Minggu. Seperti yang dikatakan oleh Satgas Satpol PP di wilayah Kelurahan Pasar Minggu, beliau merupakan pelaksana dari program pembinaan pedagang kaki lima:

“Awalnya mba, pedagang-pedagang nggak mau di tempatin di Lokbin, soalnya jauh dari jalan raya mba. Jadi bikin dagangan mereka nggak laku dijual. Nah kalo pedagang yang nggak mau dibina atau istilahnya ngebrontak mba yaa itu sekitar sepuluh sampe lima belas orang lah. Soalnya kenapa mba?ada propokator dibelakangnya mba, kaya preman-preman di pasar yang ngompor-ngomporin pedagang supaya tetep dagang di jalan”⁴³.

Penertiban berlangsung selama 1X24 jam setiap harinya dan petugas berjaga mulai dari pagi hari sampai malam hari. Kegiatan penjagaan berlangsung secara terus-menerus sampai kondisi Pasar Minggu terlihat bersih dari keberadaan pedagang kaki lima di trotoar maupun pinggir jalan. Pelaksanaan penertiban dan pembinaan memiliki pembagian jadwal penjagaan. Dimana jadwal penjagaan tersebut dibagikan

⁴³ Wawancara dengan Satgas Satpol PP di wilayah Kelurahan Pasar Minggu, pada Februari 2015.

secara merata antara shift siang dengan shift malam. Pada saat penertiban berlangsung, jika terjadi pemberontakan dari salah satu pedagang kaki lima seperti berusaha menolak untuk direlokasikan ke tempat penampungan (Lokasi Binaan dan PD Pasar Jaya) dan berusaha keras bertahan di trotoar maupun pinggir jalan. Maka, aparat akan mengambil tindakan berupa memberikan sanksi terhadap pedagang tersebut. Sanksi yang diberikan seperti sanksi penindakan atau penilangan. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan mengikuti sidang ringan yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketika sudah mendapatkan pelanggaran, maka harus mengikuti sidang ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi, pedagang tetap kembali lagi berdagang di trotoar maupun pinggir jalan. Hal ini mencerminkan suatu pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang. Maka akan mendapatkan sanksi selanjutnya berupa mengikuti sidang kedua, sidang ketiga dan seterusnya. Secara otomatis, pedagang yang melakukan pelanggaran dan mengikuti sidang secara terus-menerus. Akhirnya akan dikenakan denda yang cukup besar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berikut ini tabel 3.1. yang merupakan jadwal dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh aparat setempat terhadap pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Ragunan pada setiap harinya selama 1x24 jam, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

No.	Setiap Hari (Senin—Minggu)	Jumlah Aparatur		Kegiatan
		Satpol PP	TNI, POLRI dan Dishub	
1.	Shift Pagi Pukul 05.00—19.30 WIB	60—100 aparatur	Masing- masing berjumlah 10 orang	Melakukan penggusuran terhadap pedagang secara perlahan-lahan dan memberikan penyuluhan secara persuasif mengenai Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2).
2.	Shift Malam Pukul 19.30—05.00 WIB	30—60 aparatur	Masing- masing berjumlah 10 orang	Melakukan penggusuran terhadap pedagang secara perlahan-lahan dan memberikan penyuluhan secara persuasif mengenai fungsi fasilitas umum.

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015

3.1.2.1 Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Tempat Penampungan

Melihat kondisi Pasar Minggu yang tidak tertib dan teratur memang membutuhkan suatu tindakan dan kerjasama dalam proses merubah kondisi yang semula buruk menjadi lebih baik. Penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh aparaturnya secara teratur membuahkan hasil yang cukup baik. Dimana para pedagang kaki lima bersedia untuk direlokasikan ke tempat penampungan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih memuaskan harus adanya pembinaan di tempat penampungan tersebut. Tempat penampungan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Lokasi Binaan dan PD Pasar Jaya yang dapat menampung seluruh pedagang kaki lima dengan jumlah yang relatif banyak. Tujuannya agar para pedagang yang telah direlokasikan merasa nyaman berdagang di Lokasi Binaan sehingga mampu bertahan dalam jangka waktu lebih lama.

Merelokasikan ribuan orang pedagang kaki lima tidaklah mudah, harus saling bekerja sama dan kerja keras antara aparaturnya maupun pihak-pihak lain yang terkait. Pelaksanaan penertiban dilakukan selama 1X24 jam, disertai dengan pengawasan yang diberikan oleh aparaturnya membuat para pedagang menerima untuk direlokasikan. Pada saat penertiban berlangsung, aparaturnya juga memberikan pengarahan terhadap pedagang kaki lima agar mempergunakan sarana dan prasarana umum sesuai dengan fungsinya. Seperti contoh: fungsi trotoar yang benar adalah tempat untuk berjalan kaki dan fungsi jalan raya adalah tempat perlintasan kendaraan. Fungsi sarana dan prasarana umum inilah harus digunakan sesuai dengan aturan, agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

Pihak dari Lokasi Binaan terdiri atas Pak Suryaman yang berjabat sebagai Ketua atau Korlap, Pak Hendra yang berjabat sebagai Bendahara dan Pak Burhan yang berjabat sebagai Sekretaris. Ketiga orang tersebut saling bekerjasama untuk menjadikan Lokasi Binaan sebagai tempat berdagang yang nyaman dan ramai pengunjung. Disisi lain, ketiga orang tersebut yang akan menentukan lokasi untuk para pedagang kaki lima yang telah direlokasikan. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lokasi Binaan berlangsung selama setiap hari dengan berkeliling di sekitar Lokasi Binaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan sedikit materi berupa cara berdagang yang baik dan benar. Dalam arti dapat memberikan pelayanan terhadap konsumen atau pembeli dengan cara yang ramah tanpa adanya kata kasar yang terucapkan ataupun tindakan kekerasan yang dikeluarkan. Seperti yang dikatakan oleh Suryaman selaku Ketua atau Korlap di Lokasi Binaan:

“jadi kita di lokbin ini juga ngebina mba, kalo ada pedagang yang kasar sama pembeli. Kalo di tawar malah marah-maraha sama pembeli. Nah kita disini meluruskan orang-orang yang istilahnya belum paham. Dengan memberikan pengarahannya secara perlahan-lahan bagaimana cara berdagang yang baik, seperti kalo ditawar dagangannya sama pembeli jangan marah-maraha, harus ramah juga sama pembeli. Kurang lebih seperti itu mba”⁴⁴

Pada saat pembinaan berlangsung terkadang mengalami sedikit hambatan, dimana beberapa dari pedagang kaki lima tidak bertahan di Lokasi Binaan dan memilih untuk mencari tempat lain. Oleh sebab itu, pihak Lokasi Binaan yang terdiri atas Korlap, Sekretaris dan Bendahara mencari solusi untuk mengatasinya agar pedagang kaki lima bertahan di Lokasi Binaan dan tidak ikut keluar dari tempat penampungan. Dengan memberikan tempat yang nyaman dan fasilitas yang cukup seperti ukuran lokasi binaan yang cukup luas, adanya musholah, adanya toilet umum dan adanya kantor Lokasi Binaan di dalamnya.

Dibangunnya Kantor Lokasi Binaan berfungsi sebagai tempat berkeluh kesah dan pengaduan dari para pedagang, jika terjadi kerusakan atau munculnya permasalahan. Para pedagang bisa langsung menemui Pak Suryaman yang bertugas sebagai Korlap Lokasi Binaan ataupun Pak Hendra dan Pak Burhan. Selain itu, pihak Lokasi Binaan juga melakukan kerjasama dengan para pedagang dalam upaya mengelola dan menjaga Lokasi Binaan. Seperti yang dikatakan oleh Hendra selaku Bendahara di Lokasi Binaan:

⁴⁴ Wawancara dengan Hj. Suryaman (Korlap Lokasi Binaan), pada Februari 2015.

“iyaa dek, kalo di Lokbin ada kerusakan misalkan gentengnya bocor. Nah si pedagang bisa ngelapor ke saya atau ke pak Suryaman yang menjadi Korlap di Lokbin. Biar nanti saya atau Korlap yang ngelapor ke Pemda, nah sebelumnya saya atau Korlap minjem uang dulu biar segera dibetulkan gentengnya biar pedagangnya pun merasa nyaman dan ngga berpikiran kalo kita hanya pintain uang aja ke pedagang dek, tapi di sini kita juga ikut ngebantu pedagang di Lokbin dengan memberikan pelayanan supaya pedagang yang di Lokbin juga ngerasa nyaman. Kalo kata istilah jangan maunya manisnya aja yang ditelen tapi paitnya pun juga harus ditelen dek.”⁴⁵

Menurut hasil pendataan di Kantor Lokasi Binaan menyatakan bahwa jumlah pedagang kaki lima yang terdaftar hanya sebanyak 142 orang. Namun, pedagang yang mengumpulkan buku tabungan auto debet ke bendahara Lokasi Binaan (Pak Hendra) hanya berjumlah 118 orang saja. Sisa dari jumlah keseluruhan sebanyak 24 orang yang terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu *pertama*, sebanyak 13 orang telah dinyatakan sudah keluar dari Lokasi Binaan dan memilih untuk berdagang di tempat lain. *Kedua* yaitu sisa terakhir sebanyak 11 orang yang telah terdaftar, namun belum mengumpulkan buku tabungan auto debet, dikarenakan uangnya belum mencukupi untuk membayar sewa melalui auto debet tersebut .

Pihak Lokasi Binaan juga memberikan suatu perencanaan untuk ke depannya nanti agar Lokasi Binaan menjadi lebih baik dan membuat para pedagang merasa nyaman sehingga para pedagang dapat bertahan di Lokasi Binaan. Perencanaan dilakukan berupa membuat spanduk atau slogan yang menarik agar para pembeli (konsumen) merasa sadar akan dampak yang ditimbulkan jika masih

⁴⁵ Wawancara dengan Hendra (Bendahara Lokasi Binaan), April 2014.

membeli kebutuhan di trotoar maupun pinggir jalan. Spanduk atau slogan akan diletakkan pada tembok-tembok di sepanjang jalan buntu kearah Kantor Lokasi Binaan serta diletakkan di depan jalan kearah Terminal Pasar Minggu. Dengan begitu, dapat menumbuhkan suatu kesadaran terhadap pembeli (konsumen) akan hal terlarang tersebut. Pada akhirnya, kesadaran yang telah muncul akan mencerminkan perilaku dan sikap yang baik. Dalam hal ini, para pedagang kaki lima akan bertahan lebih lama di Lokasi Binaan dan kemungkinan besar tidak akan kembali ke lokasi terlarang.

3.1.3. Proses Pengawasan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima

Masalah sosial mengenai ketidaktertiban pedagang kaki lima yang membuat Kota DKI Jakarta khususnya Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi wilayah yang penuh dengan pedagang kaki lima dan kendaraan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta selaku pembuat kebijakan, Camat Pasar Minggu dan Lurah Pasar Minggu selaku pemimpin dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu.

Terdapat pula petugas Satpol PP dengan dibantu oleh beberapa aparat terkait yang memiliki fungsi sebagai pengendalian sosial untuk mengatasi permasalahan ini. Karena pada dasarnya sistem pengendalian sosial (*social control*) sering kali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya

pemerintah beserta aparaturnya.⁴⁶ Dalam hal ini, aparaturnya yang terlibat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Pasar Minggu adalah petugas Satpol PP dan gabungan dari beberapa aparat terkait seperti TNI, POLRI dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Program penertiban pedagang kaki lima merupakan bentuk kerjasama yang terjalin antara petugas Satpol PP dengan aparat Kepolisian, TNI, dan Dishub. Kerjasama yang dilakukan berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusuhan ketika proses pelaksanaan penertiban. Karena pada dasarnya psikologis pedagang kaki lima yang emosinya masih sulit dikendalikan, sehingga mendorongnya untuk melakukan pemberontakan kepada petugas Satpol PP. Selain itu adanya pihak tersebut yang memprovokasikan pedagang, membuat para pedagang pun terprovokasi dan membuat para pedagang melawan aparaturnya yang telah melakukan penertiban.

Petugas Satpol PP melakukan pembinaan dengan memberikan materi yaitu mensosialisasikan mengenai Peraturan Daerah yang melarang pedagang kaki lima untuk berdagang di trotoar maupun pinggir jalan. Pelaksanaan penertiban berlangsung selama 1X24 jam setiap harinya dan dibagi menjadi dua shift yaitu shift siang dan shift malam. Sehingga dapat terkoordinasikan secara baik dan teratur, guna memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dibuatlah hasil dari penertiban tersebut dengan cara dokumentasi pada saat proses pelaksanaan berlangsung. Kemudian dari hasilnya tersebut akan dilaporkan ke Kelurahan Pasar

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm: 179.

Minggu dan Kecamatan Pasar Minggu, selanjutnya akan dilaporkan juga ke Walikota Jakarta Selatan dan Pemerintah DKI Jakarta.

Perubahan yang terjadi di Pasar Minggu tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya sampai saat ini. Pengawasan dilakukan oleh petugas Satpol PP, POLRI, dan Dishub merupakan sebuah bentuk tindakan dengan cara mengontrol keberadaan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di tempat terlarang yang telah mengganggu ketertiban umum. Pengawasan dilakukan untuk menilai program penertiban dan pembinaan yang telah dilaksanakan dapat berhasil sepenuhnya atau tidak. Apabila dalam pelaksanaan tidak sepenuhnya berhasil, maka disegerakan mencari solusi untuk melakukan perbaikan guna menciptakan keberhasilan pada program selanjutnya.

Proses pengawasan masih tetap dilaksanakan sampai saat ini sejak diturunkannya Surat Perintah Bongkar (SPB) agar penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima tetap berlangsung sampai saat ini. Sehingga keberhasilan pun dapat diraihinya yaitu para pedagang kaki lima tidak kembali lagi ke lokasi terlarang. Dimulai dari petugas Satpol PP yang melakukan pemantauan di jalan baru kearah terminal dan berjaga di Pos Penjagaan Satpol PP yang berada di samping PD Pasar Jaya. Aparat Kepolisian yang turut membantu untuk menjaga keamanan wilayah Pasar Minggu dengan melakukan penjagaan di Pos Penjagaan Kepolisian yang berada di samping Pusat Perbelanjaan Robinson. Terakhir, Pos Penjagaan Dinas Perhubungan yang berada di perempatan lampu Pasar Minggu untuk membantu dalam melancarkan arus lalu lintas. Seperti gambar 3.11. yang merupakan pos

penjagaan yang diperuntukan Satpol PP untuk melakukan pengawasan di sekitar Jalan Baru.yang tertera dibawah ini:

Gambar 3.11. Pos Penjagaan Satpol PP



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015

Pengawasan dilakukan setelah semua pedagang sudah dipindahkan ke tempat penampungan. Pengawasan masih berlangsung dilaksanakan hingga saat ini agar pedagang yang telah direlokasikan tidak kembali lagi ke jalanan. Dalam waktu 1X24 jam pada setiap harinya petugas Satpol PP berjaga di pos penjagaan. Aparatur yang lain seperti Polisi dan Dishub juga memiliki pos penjagaan yang akan berjaga di pos penjagaan masing-masing. Secara keseluruhan penertiban pedagang kaki lima sudah terstruktur dengan rapih, seperti bagan 3.2. yang tertera dibawah ini:

Bagan 3.2.
**Mekanisme Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima
di Pasar Minggu**



Sumber: Hasil temuan penulis, 2015.

3.2. Hasil Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Ragunan.

Masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan ketertiban umum mengenai larangan untuk berdagang di trotoar dan pinggir jalan membuat wilayah Pasar Minggu masih dipadati oleh pedagang kaki lima. Fungsi fasilitas umum berupa trotoar yang seharusnya digunakan sebagai tempat berjalan kaki dan jalan raya yang digunakan sebagai tempat perlintasan kendaraan, namun dalam permasalahan ini justru disalahgunakan oleh masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari masyarakat asli Jakarta dan masyarakat pendatang yang secara langsung memanfaatkan satu jalur jalan raya menjadi jalur perdagangan. Para pedagang kaki lima berani untuk menggelar barang dagangannya dengan memenuhi satu jalur di Jalan Raya Ragunan. Pelaksanaan yang berjalan selama kurang lebih dua tahun berfungsi untuk

memberikan penilaian mengenai ketertiban umum di Pasar Minggu. Akibatnya berbagai bentuk sikap mulai dari menerima, mengabaikan bahkan menolak. Berbagai bentuk sikap inilah merupakan respon dari serangkaian proses pelaksanaan penertiban yang telah dilalui.

Terdapat empat pedagang kaki lima yang menjadi informan dalam penelitian ini. Keempat pedagang yang dahulunya berdagang di lokasi-lokasi terlarang mulai dari berdagang di trotoar, pinggir jalan atau bahu jalan dan bahkan di depan lampu merah. Setelah dilaksanakan penertiban dan pembinaan, setiap pedagang memiliki respon yang berbeda-beda. Karena setiap individu memiliki latar belakang pendidikan, pola perilaku, dan pola berpikir yang berbeda-beda. Informan pertama bernama Ibu Siti yang berpendidikan sampai jenjang SD, merupakan pedagang kaki lima yang dahulunya berdagang di pinggir jalan tepatnya di depan Bank BRI sejak tahun 2005. Ibu Siti memilih lokasi di depan Bank BRI dikarenakan mengikuti temannya yang juga berdagang di lokasi tersebut. Di samping itu banyak keuntungan yang diperoleh seperti jumlah pembeli menjadi relatif banyak dan setiap bulannya tidak perlu membayar uang sewa. Jenis dagangan yang dijualkannya berupa pakaian dalam wanita dan laki-laki, kaos kaki dan handuk.

Setelah adanya penertiban, dagangannya pun digabungkan dengan dagangan suaminya berupa sarung, sprai, mukena, peci, sajadah dan lain sebagainya. Respon yang diberikan oleh Ibu Siti berupa menerima perintah untuk segera pindah ke PD Pasar Jaya tanpa adanya perlawanan. Menurutnya, tempat yang sekarang jauh lebih nyaman daripada di pinggir jalan karena di pinggir jalan selalu ada pengusuran yang

dilakukan oleh Satpol PP. Selain itu, pernah mengalami pengusuran ketika baru membuka dagangan di pinggir jalan. Hal demikian, terlihat berbeda dengan berdagang di dalam arena pasar pada saat ini. Munculnya kenyamanan saat berdagang di dalam arena pasar karena tidak merasakan lagi pengusuran secara paksa.

Informan kedua bernama Ibu Endang yang berpendidikan sampai jenjang SMP, merupakan pedagang kaki lima yang semula berdagang di belakang Robinson. Kemudian pindah ke depan lampu merah karena di dalam pasar sedang dilakukan proses penataan oleh Pihak PD Pasar Jaya. Akhirnya, Ibu Endang memilih pindah ke depan lampu merah dengan memiliki beberapa alasan, yaitu (1) mayoritas pedagang memilih berdagang di luar arena pasar, (2) mengikuti jejak teman untuk berdagang di lampu merah, (3) setiap bulan tidak wajib membayar sewa kios, (4) ramai pengunjung sehingga dagangan cepat laku.

Respon yang dihasilkan setelah adanya penertiban yaitu penolakan Ibu Endang yang akan dipindahkan ke dalam arena pasar lantai dua. Karena kurangnya konsumen yang datang sehingga menumbuhkan ketidakpuasan hati. Akhirnya, Ibu Endang mengambil langkah untuk pindah ke lokasi yang justru sangat dilarang oleh petugas yaitu di depan lampu merah. Padahal keberadaannya di lampu merah jelas-jelas melanggar tata tertib yang berlaku. Namun, karena faktor ekonomi yang menuntutnya untuk bertahan di lokasi terlarang. Padahal, sebelumnya sudah ada himbauan dan pemberitahuan bahwa tidak boleh berdagang di trotoar, pinggir jalan, depan lampu merah ataupun tempat umum lainnya. Silahkan untuk para pedagang

kaki lima pindah lokasi ke PD Pasar Jaya atau Lokasi Binaan. Larangan seperti ini berlaku untuk selamanya. Tetapi, tidak dipraktekan oleh para pedagang dan hanya didengarkan begitu saja. Dalam arti “masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri” saja. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Endang yang berdagang sayuran:

“awalnya sih nggak terima, sampe nangis-nangis karena bingung harus dagang dimana, takut dagangannya sepi. Tapi, sebenarnya kalo kita bener yaa salah juga kita udah dibilangin tapi malah bandel tetep dagang di lampu merah, yaa abis gimana yaa kan kita cari duit di jalan. Sebenarnya kita juga tau ada peraturan itu, yaa tapi kita nyari makan dapet dari situ, nanti anak-anak kita mau dikasih makan apa kalo kita nggak dagang di situ.”⁴⁷

Informan ketiga bernama Pak Muhammad yang berpendidikan sampai jenjang SMP, merupakan pedagang kelapa parut yang berdagang sejak tahun 2000 di Terminal Pasar Minggu dari pagi sampai malam hari. Memilih berdagang di Terminal karena lebih ramai, disamping itu tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya diwajibkan membayar Rp2000,00 setiap harinya sebagai uang kebersihan. Namun, karena adanya penertiban inilah membuat pak Muhammad harus berbagi tugas dengan istrinya. Istrinya berdagang di Terminal dari pukul 00.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB, karena pada malam menjelang pagi hari Jalan Baru menuju kearah Terminal masih diperbolehkan untuk berdagang dengan syarat pada pukul 07.00 WIB harus sudah bersih dari pedagang maupun sampah di sekitarnya. Berikut ini Gambar 3.12. mengenai Jalan Baru kearah Terminal Pasar Minggu yang masih diperbolehkan berdagang dari pukul 00.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB dan hanya diperbolehkan berdagang dari pos penjagaan Satpol PP hingga terminal, jika melewati batas tersebut

⁴⁷ Wawancara dengan Endang berdagang sayuran, Februari 2015.

nantinya akan di angkut dan dibawa dagangannya ke Kantor Kecamatan Pasar Minggu, sebagai berikut:.

Gambar 3.12. Jalan Baru Menuju Arah Terminal Pasar Minggu



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015

. Selanjutnya, Pak Muhammad berdagang di Lokasi Binaan dari pukul 07.00 sampai pukul 17.00 WIB. Pada saat pelaksanaan penertiban, tidak ada perlawanan dari pedagang kelapa parut ini dan justru menerima untuk pindah ke Lokasi Binaan. seperti yang dikatakan oleh Pak Muhammad:

“kalo aku sih nggak pernah ngelawan, ngebrontak sama petugas. Dia kan juga tugas, jadi yaa nurut aja kalo disuruh pindah. Toh sama aja kalo menurut saya dagang dimana aja mah, tapi Alhamdulillah sih pindah di sini semua kebutuhan masih bisa terpenuhi mba, itu menurut saya yang paling penting”⁴⁸.

Informan terakhir bernama Pak Khoiri yang berlatar belakang tidak sekolah, merupakan pedagang buah semangka dan melon di depan Pusat Perbelanjaan Borobudur. Pak Khoiri berdagang di pinggir jalan setiap hari tanpa beristirahat (non-stop). Alasan memilih berdagang di pinggir jalan karena dahulu banyak sekali

⁴⁸ Wawancara dengan Pak Muhammad yang berdagang kelapa parut, Februari 2015.

pedagang kaki lima yang menyebar dari depan Pusat Perbelanjaan Ramayana sampai Robinson, di depan taman pertanian, di samping stasiun, di lampu merah sebelah kanan dan kiri, semuanya itu penuh dengan pedagang kaki lima hingga mencapai ribuan orang lebih pada setiap harinya. Namun, hanya 50% yang masih bertahan di Lokasi Binaan. Sisanya pindah ke tempat lain dan pulang ke kampung halamannya.

Dengan pergantian Gubernur baru, program penertiban yang bertujuan untuk menata Pasar Minggu menjadi lebih tertib dan pemandangannya lebih indah dapat terlaksanakan dengan baik. Pak Khoiri juga menerima untuk dipindahkan ke Lokasi Binaan yang berada di belakang terminal. Tidak ada perlawanan ataupun pemberontakan yang di keluarkan. Menurutnya, berdagang di pinggir jalan maupun di Lokasi Binaan sama saja tergantung dari individunya untuk menarik perhatian konsumen. Faktanya memang benar bahwa berdagang di pinggir jalan lebih laku dan keuntungan diperoleh cukup banyak daripada berdagang di Lokasi Binaan. Disamping itu, berdagang di pinggir jalan tidak harus membayar sewa kios perbulannya hanya sekedar pungutan uang untuk preman. Tetapi, kenyamanan yang diperoleh lebih berpihak di Lokasi Binaan karena tidak harus merasakan penggusuran setiap hari. Seperti yang dikatakan oleh Pak Khoiri berikut ini:

“kalo di suruh pindah yaa saya pindah, ngga mau neko-neko kaya orang-orang mah. Tapi sebetulnya mah enakan di sini soalnya kalo di sono kan harus di gotong-gotong dulu dari sini jam 6 pagi sampe jam 6 sore terus nanti di titipin di belakang sana (di dalam Lokasi Binaan paling pojok) cuma bayar lima ribu doang tiap nitipin terus juga kalo ada usir-usiran harus dorong gerobak lagi. Yaa, walaupun nggak bayar sewa cuma bayar preman itu juga kalo saya ada duit, kalo ngga ada yaa nggak bayar. Nah kalo di sini kan enak, nggak perlu diusirin, ngga perlu dorong-dorong, ngga keujanan juga, nyaman pokoknya”.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Khoiri yang berdagang buah semangka dan melon, Februari 2015

Keberhasilan yang dicapai dalam program peneriban pedagang kaki lima terlihat dari kondisi Jalan Raya Ragunan yang sudah kondusif dari kepadatan pedagang kaki lima di trotoar maupun pinggiran jalan. Karena saat ini keberadaan pedagang di pindahkan ke PD Pasar Jaya dan Lokasi Binaan yang letaknya berdekatan dengan Terminal Pasar Minggu. Namun, kondisi ini akan kembali seperti dahulu jika pengawasannya tidak dilakukan dengan efektif dan teratur. Kondusifnya Jalan Raya Ragunan membuat jalanan menjadi lancar dan tidak terjadi kemacetan lagi seperti dahulu. Mengingat kondisi Jalan Raya Ragunan dahulu memang sangat padat karena dipenuhi oleh sekumpulan pedagang kaki lima serta kendaraan yang melintasinya. Perbedaan tampak terlihat jelas antara kondisi lampau dengan kondisi saat ini, seperti pada gambar 3.13. berikut ini:

Gambar 3.13. Perbandingan Jalan Raya Ragunan Dahulu Dengan Saat ini



Sumber: Dokumentasi penulis, 2015

Kemacetan parah yang biasa terjadi, kini sudah mulai berkurang. Artinya kondisi Pasar Minggu mengalami perubahan kearah yang lebih baik . Dimana arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan teratur. Ditambah lagi dengan pembagian jalur yang dibuat oleh Dinas Perhubungan (Dishub) yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Satpol PP, TNI, dan POLRI. Jalur Jalan Raya Ragunan terbagi menjadi tiga jalur, yaitu jalur pertama, digunakan khusus untuk angkutan umum yang ingin masuk kearah Terminal Pasar Minggu. Jalur kedua, untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum yang ingin melintas kearah Depok ataupun Kalibata. Jalur ketiga, untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum yang ingin melintas kearah Mampang ataupun Cilandak.

Terbaginya tiga jalur di Jalan Raya Ragunan memberikan dampak positif yaitu kelancaran arus lalu lintas. Karena sebelumnya di Jalan Raya Ragunan hanya terbagi menjadi 2 jalur saja. Dimana satu jalurnya digunakan oleh pedagang kaki lima sepenuhnya untuk menggelar dagangannya. Jalur lainnya digunakan untuk perlintasan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Hal ini membuat penumpukan kendaraan dalam jumlah banyak yang ditambahkan dengan kehadiran pedagang kaki lima yang terus berkembang pada setiap harinya. Dengan demikian, manfaat dari pembuatan ketiga jalur baru tersebut sangat berpengaruh dan berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan pengguna jalan raya. Seperti gambar 3.14. merupakan gambar Jalan Raya Ragunan yang terbagi menjadi tiga jalur, tertera dibawah ini:

Gambar 3.14. Tiga Jalur Di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu



Sumber: Dokumentasi penulis, 2015

Jalan Raya Ragunan yang telah bersih dari pedagang kaki lima memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar maupun pengguna jalan. Bagi pejalan kaki merasa aman karena tidak ada pedagang kaki lima yang memadati trotoar dan pinggiran jalan. Tidak seperti dahulu, pengguna jalan merasa resah dan gelisah karena padatnya jalan raya membuat tingkat keamanan menjadi berkurang dan menimbulkan kriminalitas yaitu pencopetan atau penjambretan. Selanjutnya, bagi pengendara kendaraan seperti sepeda motor, keselamatan menjadi lebih terjamin karena semenjak penumpukan pedagang kaki lima menyebabkan kemacetan parah di Jalan Raya Ragunan. Sehingga, menimbulkan pengendara kendaraan menjadi tidak bisa mengontrol emosi yang akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun pengendara lain, seperti keributan dan rawan kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, kondisi Jalan Raya Ragunan lebih terlihat bersih karena pada dasarnya pedagang kaki lima yang memadati Jalan Raya Ragunan menyebabkan jalanan menjadi kotor, banyak sampah berserakan dimana-mana dan menimbulkan

bau yang tidak sedap. Setelah adanya penertiban, pemandangan di Jalan Raya Ragunan menjadi terlihat lebih indah daripada kondisi sebelumnya. Disisi lain terdapat dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat pada khususnya. Masyarakat yang biasanya bebas untuk membeli kebutuhan seperti sayuran ataupun buah-buahan langsung di pinggir jalan dan untuk pengguna kendaraan sepeda motor biasanya langsung membelinya ketika masih duduk di sepeda motor. Namun, ketika adanya program penertiban masyarakat merasa kesulitan untuk memperoleh semua kebutuhannya. Saat ini untuk bisa membeli kebutuhan sehari-hari, masyarakat harus pergi ke dalam PD Pasar Jaya atau pergi kearah Terminal Pasar Minggu untuk berbelanja di Lokasi Binaan. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya program penertiban pedagang kaki lima ini. Seperti keluhan yang dirasakan oleh salah satu masyarakat penjual nasi uduk yaitu Ibu Sri yang tinggal di Pasar Minggu:

“kalo sekarang mah susah mba, kalo ada yang kurang cabe atau kurang apa. Hmm sekarang mau belinya jauh banget harus ke ujung sono, yang orang bilang tempat penampungan pedagang. Kumpulnya kan pada di penampungan semua sekarang, beda sama waktu dulu. Mau apa-apa gampang nyarinya, di depan Borobudur udah berjejer tukang dagang semua”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Sri (penjual nasi uduk), pada Februari 2015.

BAB IV

PENERTIBAN DAN KEBERTAHANAN PEDAGANG KAKI

LIMA PASAR MINGGU

Ketidaktertiban merupakan masalah sosial yang sering terjadi di Ibu Kota dan mengalami kesulitan dalam mengatasinya. Salah satu faktor penyebab ketidakteraturan tersebut adalah keberadaan pedagang kaki lima yang menumpuk di trotoar maupun pinggir jalan raya. Hal ini menimbulkan kemacetan di Pasar Minggu tepatnya di sepanjang Jalan Raya Ragunan. Oleh karena itu, membutuhkan sosialisasi yang intensif untuk menghadapi masalah sosial ini. Program penertiban disertai dengan pembinaan secara intensif merupakan salah satu program yang dibuat oleh Lembaga Sosial di masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa aparaturnya guna menata pedagang kaki lima agar menempati lokasi yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah dan menjauhkan diri dari lokasi terlarang. Penertiban pedagang kaki lima dibentuk untuk mengurangi tingkat kemacetan yang sering terjadi di DKI Jakarta akibat ketidaktertiban para pedagang kaki lima khususnya di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Program penertiban terhadap pedagang kaki lima berlangsung melalui mekanisme yang sudah terstruktur, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh sebab itu, mampu untuk dianalisa secara sosiologis.

Pada bab ini, penulis akan menganalisa melalui dua tahap penertiban, yaitu sosialisasi dan pengawasan dengan menggunakan teori Behavioristik dalam

perspektif Edwin Guthrie. Penulis juga akan menganalisa bagaimana kebertahanan pedagang kaki lima setelah adanya program penertiban dan pembinaan dengan menggunakan struktural fungsional dalam perspektif Robert Merton.

4.1. Penertiban dan Pembinaan Pedagang Dalam Bingkai Pendidikan Behavioristik

Penertiban terhadap pedagang kaki lima merupakan satu langkah yang tepat dalam menciptakan perubahan. Penertiban dimaksudkan untuk menjamin tetap terpeliharanya integrasi antara organisasi pertahanan keamanan di luar angkatan bersenjata dan organisasi pertahanan militer dalam rangka sistem pertahanan rakyat semesta.⁵¹ Melihat kondisi Pasar Minggu pada saat itu memang tidak teratur, karena penumpukan pedagang kaki lima di trotoar maupun pinggir jalan.

Hal ini berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar Pasar Minggu, seperti jalanan menjadi kumuh dan bau, terjadinya kemacetan, kriminalitas, kerusuhan dan kemungkinan bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Semua ini terjadi karena adanya ketimpangan antara luas jalan Raya Ragunan dengan jumlah kendaraan yang melintasinya, disertai dengan keberadaan pedagang kaki lima yang memadati jalan raya sampai ke badan jalan. Kondisi demikian memang tidak sesuai dengan peraturan karena di dalam Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) sudah tertera jelas bahwa adanya larangan untuk berdagang di tempat umum seperti: trotoar, halte, taman, jembatan penyebrangan, dan jalan raya.

⁵¹ F. Sugeng Istanto. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil*. Yogyakarta: Andi Offset. Hlm: 161–162

Menanggapi situasi seperti ini, suatu bentuk penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima dirasa sangat perlu diterapkan karena tingkah laku pedagang terus mengalami penarikan ke arah yang buruk atau tidak sesuai dengan nilai dan norma. Hal ini menjadi masalah besar, karena buruknya tingkah laku pedagang menjadi potret buruknya kondisi Pasar Minggu saat itu. Sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan di Pasar Minggu dan memicu munculnya kriminalitas serta kerusuhan yang tak diinginkan. Kebebasan berdagang bagi pedagang kaki lima membuat mereka keluar dari arena pasar dan memilih untuk membuka usaha dagangannya di pinggir jalan. Tentu hal ini bukan kesalahan pedagang kaki lima semata, tetapi adanya sistem sosial yang tidak terinternalisasikan secara baik. Karena sistem sosial memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk para pedagang.

Memberikan pendidikan terhadap pedagang kaki lima bertujuan untuk melakukan perubahan pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Sehingga dapat mencerminkan penataan kota secara tertib dan terstruktur. Pada dasarnya pendidikan bukan hanya di sektor formal saja seperti sekolah. Namun, pendidikan juga dibutuhkan masyarakat khususnya dikalangan masyarakat sektor informal yaitu pedagang kaki lima. Tujuan ini dilaksanakan agar para pedagang mendapatkan pendidikan secara informal. Pemberian pendidikan secara informal bisa berupa pembinaan dengan memberikan pengarahan terhadap seseorang atau sekumpulan orang ke arah lebih baik, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan membentuk tingkah laku para pedagang.

Pembinaan merupakan sebuah langkah kongkrit yang dilaksanakan aparatur setelah penertiban jalan berhasil ditempuhnya. Minimnya budaya tertib dan kesadaran para pedagang akan ketertiban umum sehingga masih ada beberapa pedagang yang nakal berdagang di jalanan. Pembinaan dilakukan untuk menanamkan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Dengan begitu mampu menumbuhkan kesadaran dalam bertindak dan berperilaku di lingkungan. Dalam perspektif Edwin Ray Guthrie, Guthrie menekankan bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah, tingkah laku baik dapat diubah menjadi buruk dan sebaliknya, tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik.⁵² Seperti halnya, ketidakteraturan yang terjadi di Pasar Minggu karena penumpukan pedagang kaki lima yang memenuhi hingga ke badan jalan. Maka dilaksanakan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima melalui pemberian stimulus. Langkah ini bertujuan untuk merelokasikan para pedagang ke tempat yang layak dan sudah mendapatkan izin dari Pemerintah.

Penertiban dilakukan oleh aparatur terhadap pedagang kaki lima merupakan perintah dari pimpinan yang terpacu pada Perda No. 8 Tahun 2007 mengenai ketertiban umum. Penertiban yang dilakukan berupa sosialisasi Perda yang berisi larangan berdagang di trotoar maupun pinggir jalan. Dengan pemberian stimulus yang bermula dari pimpinan atas ke lembaga sosial bawah yaitu Gubernur ke Walikota Jakarta Selatan, karena Gubernur memiliki wewenang tertinggi dan tanggung jawab sepenuhnya di wilayah DKI Jakarta dengan menetapkan dan menerapkan kebijakan baru yaitu Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2).

⁵² Mohammad Jauhar. 2011. *Loc. Cit.*. Hlm: 26.

Masalah ketertiban pedagang kaki lima ini memang tidak akan berakhir dalam waktu cepat dan singkat. Menanggapi masalah seperti ini bukanlah perkara yang mudah untuk merelokasikan dan memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Namun, dengan pemberian stimulus secara bertingkat dan bertahap yang sekiranya mampu membuat lembaga sosial terbawah khususnya pedagang kaki lima dapat mengerti dan memahami lokasi terlarang.

Stimulus selanjutnya diinternalisasikan dari Walikota Jakarta Selatan ke Camat Pasar Minggu karena lokasi yang sudah tersudutkan mengalami kemacetan dengan adanya Pasar tradisional di wilayah Jakarta Selatan, hal ini disebabkan para pedagang yang keluar dari arena pasar. Dengan pemberian stimulus berupa penanaman nilai ketertiban umum pada Perda No. 8 Tahun 2007. Stimulus ini diberikan agar nilai ketertiban umum dapat melekat dan memberikan perubahan dalam segi pola pikir maupun pola perilaku masyarakat khususnya pedagang kaki lima.

Berikutnya, stimulus dari Camat Pasar Minggu ke Lurah Pasar Minggu selaku pemimpin di wilayah Pasar Minggu yang mengetahui secara jelas kondisi Pasar Minggu saat itu. Penumpukan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Ragunan membuat pemandangan terlihat semberawut, kumuh, dan bau. Dengan demikian, kedua lembaga sosial ini saling bekerja sama dalam menciptakan perubahan di Pasar Minggu. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penataan pasar dan kedua penataan jalan raya menjadi jalan perlintasan kendaraan

melalui sosialisasi kepada pedagang kaki lima agar segera pindah ke lokasi penampungan.

Pada akhirnya, kedua lembaga sosial ini saling memberikan stimulus kepada beberapa aparaturnya yaitu: Satpol PP, TNI, POLRI, dan Dinas Perhubungan. Pemberian stimulus tidak terlepas dari menerapkan Perda No. 8 Tahun 2007 kepada seluruh pedagang kaki lima karena stimulus ini diberikan langsung dari pimpinan atas. Terakhir, stimulus diberikan oleh aparaturnya terhadap para pedagang kaki lima dengan memberikan stimulus secara rutin dan setiap hari tanpa adanya kekerasan fisik. Pemberian stimulus selanjutnya berupa mengaplikasikan pengetahuan mengenai Perda No. 8 Tahun 2007. Penertiban pedagang kaki lima dilakukan dengan memberikan penyuluhan terhadap pedagang yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu: dalam bentuk penyuluhan stimulus dan bentuk pengawasan stimulus.

4.1.1. Stimulus Nilai-nilai Ketertiban Melalui Penyuluhan dan Pengawasan

Penyuluhan merupakan upaya merubah tingkah laku dengan penanaman pengetahuan dan nilai-nilai. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan perubahan terhadap sikap dari pedagang kaki lima dan kondisi yang terjadi saat itu. Beragam materi yang disampaikan melalui teori maupun praktik seperti mensosialisasikan mengenai fungsi sarana dan prasarana umum, mensosialisasikan mengenai peraturan daerah yang melarang untuk berdagang di tempat umum dan pengenalan tempat penampungan baru yaitu PD Pasar Jaya dan Lokasi Binaan. Tentu bukan hal yang mudah bagi para pedagang untuk menerima dan memahami materi tersebut. Namun,

penyuluhan yang dilakukan melalui sosialisasi preventif hingga sosialisasi represif yang sekiranya mampu mengatasi permasalahan ini. Tindakan penyuluhan dilakukan dengan tergabungnya aparatur-aparatur terkait, seperti Satpol PP, TNI, POLRI dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Stimulus yang diberikan yaitu penyuluhan pertama yang diberikan aparatur berupa sosialisasi preventif, merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Sosialisasi diberikan secara rutin dan intensif guna mencapai keberhasilan yang maksimal. Materi yang diberikan melalui stimulus secara preventif berupa mensosialisasikan nilai-nilai ketertiban umum khususnya Perda No.8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) yang berisi tentang adanya larangan berdagang di tempat umum seperti trotoar, taman, bahu atau pinggir jalan, halte dan jembatan penyebrangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma yang dilakukan oleh para pedagang. Materi selanjutnya yaitu memberikan pengetahuan mengenai fungsi dari fasilitas umum atau sarana dan umum. Langkah yang dilakukan oleh aparatur merupakan salah satu langkah kongkrit untuk membentuk pola pikir pedagang agar memahami fungsi dari sarana dan prasarana umum sehingga tidak berperilaku menyimpang untuk menyalahgunakan fasilitas yang disediakan.

Setelah melalui sosialisasi preventif, maka dilanjutkan pemberian stimulus melalui sosialisasi persuasif yang merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara mengajak, menasehati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Aparatur bertindak untuk

memberikan bimbingan dan pengarahan dengan menasehati para pedagang bahwa berdagang di trotoar dan pinggir jalan merupakan suatu pelanggaran dan seharusnya segera dihentikan. Kegiatan perdagangan di pinggir jalan menimbulkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas. Terlepas dari penyampaian arahan dan nasehat, aparat mengajak para pedagang kaki lima dengan memberikan stimulus perlahan-lahan agar pedagang bersedia direlokasikan ke tempat penampungan. Kedua penyuluhan inilah yang harus dilakukan secara rutin dan intensif agar tidak ada celah para pedagang untuk kembali lagi ke lokasi terlarang (tempat umum).

Selanjutnya, stimulus diberikan melalui sosialisasi represif yang merupakan pengendalian sosial dengan cara memberikan hukuman atau sanksi. Langkah ini dilakukan aparat, ketika pedagang kaki lima masih berdagang di pinggir jalan meskipun telah dilaksanakan penertiban dan pembinaan. Kesulitan dalam menertibkan dan membina pedagang kaki lima memang sudah menjadi hal sewajarnya. Karena memberikan stimulus secara intensif dan personal pun masih sekiranya kurang untuk membuat pedagang bertahan di tempat penampungan. Padahal tindakan tegas sudah direalisasikan oleh aparat dengan penyitaan KTP dan mengangkut dagangannya ke Kantor Kecamatan atau Pengadilan Negeri. Tindakan seperti ini bertujuan agar pedagang merasa jera untuk tidak kembali lagi ke luar dari arena penampungan.

Pada dasarnya, tugas dari pendidikan masyarakat dalam mengatasi masalah Pasar Minggu, yaitu pertama, aparat dan lembaga masyarakat (terdiri atas Gubernur, Walikota Jakarta Selatan, Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu,

Ketua PD Pasar Jaya, dan Korlap Lokasi Binaan) bermusyawarah untuk menyusun program kegiatan penertiban dan pembinaan dengan cara memberikan petunjuk dan pengarahan kepada orang yang bergerak dibidang masyarakat khususnya Satpol PP, yang memang bertugas untuk menertibkan dan membina pedagang kaki lima agar tidak berdagang di pinggir jalan. Kedua, mengendalikan dan menilai langkah yang telah dilaksanakan oleh aparatur bersama dengan Lembaga Masyarakat dalam membina pedagang kaki lima yaitu penilaian mengenai keberhasilan proman ini, serta memberikan pengarahan agar menggunakan sarana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ketiga, membimbing dan mengendalikan kegiatan usaha seperti berdagang sesuai dengan peraturan atau tidak. Dalam arti tidak berdagang di lokasi yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah.

Selain itu, adanya dukungan dari sebagian besar masyarakat dengan keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dan pinggir jalan. Dimana mayoritas dari masyarakat tersebut sudah terbiasa membeli kebutuhan pokok di pinggir jalan. Seperti hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri, yang mengaku bahwa lebih sering berbelanja kebutuhan di depan Puskesmas pada pukul 04.00 WIB daripada berbelanja di dalam pasar. Menurutnya, dahulu memang dibebaskan jadi sah-sah saja jika berperilaku seperti itu. Namun, tanpa adanya tindakan tegas dari para aparatur seharusnya Ibu Sri sadar akan dampak yang ditimbulkan nanti.

Kebiasaan seperti ini menyebabkan masalah ketidaktertiban semakin meningkat yang berpengaruh besar terhadap mental para pedagang untuk bertahan atau tidaknya berdagang di lokasi terlarang. Tindakan buruk dari Ibu Sri

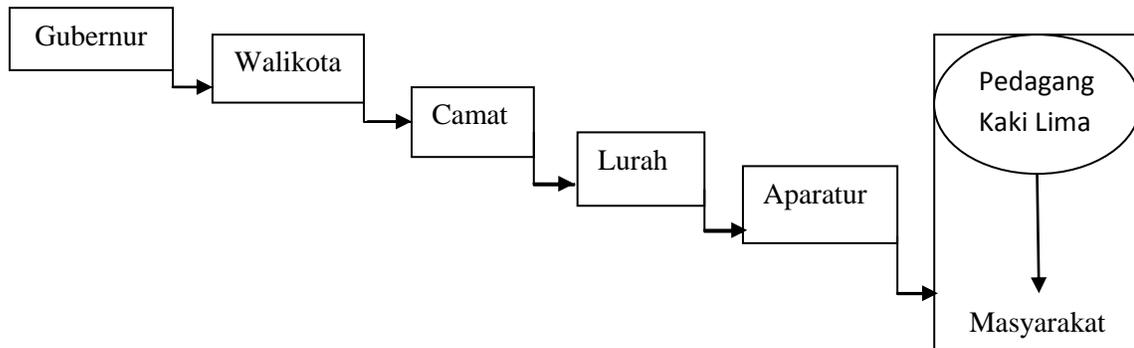
mengakibatkan kerugian materil maupun non-materil. Seharusnya, Ibu Sri dan masyarakat lainnya membiasakan diri untuk berbelanja di dalam arena pasar. Sehingga aparatur yang bertugas melakukan penertiban dan pembinaan tidak mengalami kesulitan.

Perlunya pemberian stimulus untuk masyarakat Pasar Minggu dan sekitarnya dengan pengarahannya untuk tidak berbelanja dan membeli kebutuhan di pinggir jalan. Larangan yang diberikan ini sudah tertera jelas di dalam Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 ayat (3) yang berisi “setiap orang dilarang membeli barang dagangan kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.⁵³ Kenyataannya memang masyarakat Pasar Minggu dan sekitarnya lebih dominan berbelanja di pinggir jalan. Lokasi yang praktis sekaligus menghemat biaya dan waktu merupakan faktor pendukung masyarakat melanggar norma yang ada. Dengan demikian, pola penyuluhan merupakan langkah bijak yang memberikan perubahan kondisi dan perilaku masyarakat. Hal ini dapat mencerminkan kota yang bersih, tertib dan rapih.

Stimulus diberikan secara bertingkat dari Gubernur yang kemudian diinternalisasikan ke Walikota Jakarta Selatan, Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu, dan Aparatur untuk saling bekerjasama dalam upaya mengatasi masalah Pasar Minggu. Pemberian stimulus tersebut dilakukan pada saat merundingkan secara bermusyawarah untuk membahas ketidakteraturan pedagang Pasar Minggu yang menimbulkan terjadinya kemacetan. Berikut ini bagan 4.1. mengenai stimulus yang diberikan dari lembaga tertinggi hingga terkecil secara bertingkat:

⁵³ Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta, *Loc. Cit.*, Hlm 8

Bagan 4.1.
Stimulus Lembaga Tertinggi Hingga Terkecil Secara Bertingkat

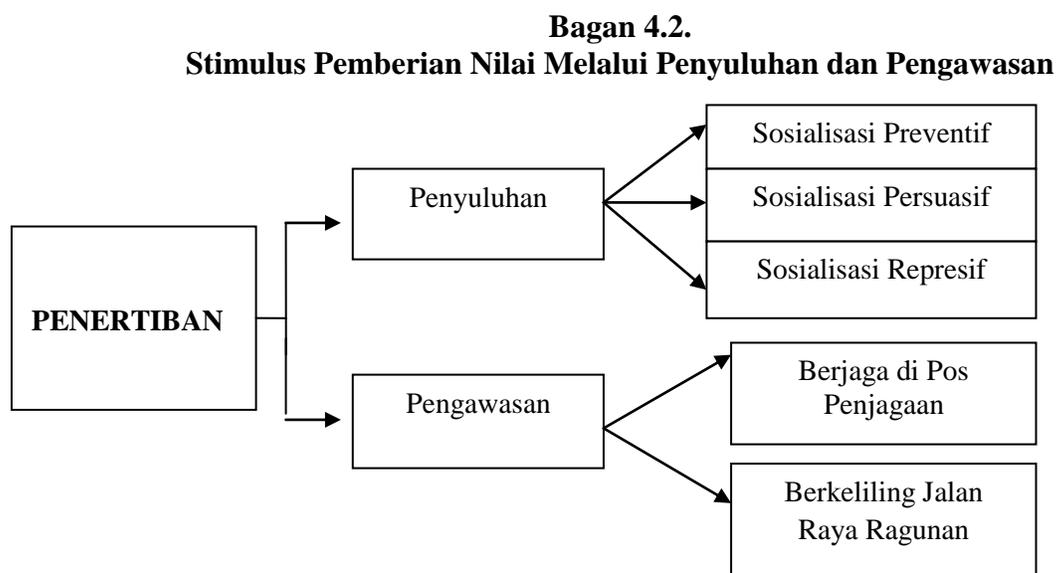


Sumber: Analisis Penelitian, 2015.

Perubahan demikian tidak akan terwujud, jika penyuluhan yang diberikan aparatur terhadap para pedagang hanya berjalan singkat dan sementara saja. Tanpa adanya langkah penyuluhan yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu panjang. Bentuk pengawasan yang minim dari aparatur maupun dari Lurah dan Camat Pasar Minggu juga membuat keberhasilan program inipun semakin sulit terwujud. Oleh karena itu, setelah dilaksanakannya penyuluhan melalui sosialisasi preventif hingga represif maka harus ada pengawasan sebagai pelengkap dari sebuah penertiban dan pembinaan.

Pengawasan merupakan suatu tindakan untuk memantau dan mengontrol suatu kejadian agar mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Pengawasan dilakukan selama dua hari sekali, tiga hari sekali atau seminggu sekali. Namun, terlihat lebih efektif jika pengawasan dilakukan setiap hari selama 1x24 jam. Pengawasan dilakukan secara rutin dan intensif yang berfungsi untuk mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan penertiban dan pembinaan, yang akan diperbaiki

untuk ke depannya nanti. Jika pengawasan tidak dilaksanakan dalam jangka panjang maka secara tidak langsung kondisi dahulu akan terwujud kembali dan kemungkinan besar dapat berdampak lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Berikut ini adalah bagan 4.2. mengenai stimulus penyuluhan dan pengawasan yang tertera dibawah ini:



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2015

Dengan stimulus yang diberikan seperti yang dijelaskan diatas, namun tidak terdapat perubahan maka dilakukan tindakan lebih tegas dengan pemberian hukuman atau sanksi. Dengan melakukan penyitaan dagangan yang kemudian di angkut dan di bawa ke Pengadilan Negeri. Secara tidak langsung pedagang yang melanggar tersebut akan dikenakan sanksi yang semakin meningkat tergantung dari jumlah kesalahannya. Di samping itu, sanksi dan hukuman seharusnya juga diberikan untuk masyarakat yang masih berbelanja kebutuhan di pinggir jalan.

Dengan demikian, dapat tercipta kemudahan dalam proses pelaksanaan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima. Seperti halnya yang dikatakan oleh Guthrie bahwa hukuman memegang peran penting dalam proses belajar, sebab jika diberikan pada saat yang tepat mampu merubah kebiasaan seseorang.⁵⁴ Jadi, hukuman yang diberikan berupa sanksi memang perlu dalam pelaksanaan pembinaan ini. Karena sanksi atau hukuman merupakan suatu upaya untuk menegakkan tata tertib di masyarakat. Dengan begitu dapat menghasilkan efek jera bagi pedagang maupun masyarakat yang ikut berkontribusi dalam ketidaktertiban. Apabila kegiatan perdagangan di pinggir jalan tidak segera mendapatkan tanggapan dalam upaya mengendalikan kegiatan yang salah ini, maka masalah ketidaktertiban akan menghampiri dan semakin berkembang.

4.1.2. Respons Secara Behavior Pedagang di Dalam Pembinaan

Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan.⁵⁵ Belajar tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan lingkungan. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang mendukung adanya ketertiban dan keteraturan. Pembinaan yang dilaksanakan oleh aparaturnya terhadap pedagang kaki lima guna terciptanya perubahan kearah positif. Dengan demikian, lingkungan yang tergolong adanya ketertiban maka akan mencerminkan masyarakat yang tertib. Terbukti setelah adanya penertiban

⁵⁴ Eveline Siregar dan Hartini Nara. 2011. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm: 26.

⁵⁵ Eveline Siregar dan Hartini Nara. *Op. Cit.*, Hlm: 25.

,pemandangan Pasar Minggu terlihat lebih teratur dan tertib. Namun, tak terlepas dari respon para pedagang yang diberikan stimulus juga ikut mendukung keberhasilan penertiban ini.

Keempat pedagang yang dipilih menjadi informan memiliki respon yang berbeda setelah pelaksanaan penertiban. Karena setiap individu memiliki karakter berbeda yang akan mencerminkan dirinya. Begitupula latar belakang pendidikannya, individu yang memiliki latar belakang rendah maka pola berpikirnya akan mengikutinya. Namun hal ini tidak terjadi pada keempat pedagang kaki lima. Latar belakang pendidikan yang tergolong menengah dengan bersekolah sampai jenjang SMP saja, justru mengalami kesulitan pada saat ditertibkan dan dibina.

Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Endang pedagang sayuran, yang mengaku bahwa sudah mengetahui adanya peraturan untuk tidak berdagang di lampu merah dan sudah dihimbau juga oleh petugas Satpol PP. Namun, tetap berdagang di lampu merah dan tidak ingin pindah ke dalam arena pasar dengan alasan takut tidak ada konsumen. Pendidikan yang tergolong menengah seharusnya mampu merubah pola berpikir pedagang. Memiliki konsumen yang relatif banyak memang sangat dibutuhkan oleh para pedagang. Tetapi hal itu, tidak seharusnya menutup diri untuk tidak menaati peraturan. Padahal sudah disediakan lahan yang diperuntukan pedagang kaki lima oleh Pemerintah. Lahan yang cukup luas layak inilah yang mampu menampung pedagang kaki lima karena tidak mengganggu kelancaran jalan. Meskipun lokasi yang dipilih kurang strategis karena berada di belakang pasar.

Beda halnya dengan pedagang lain yang justru pendidikannya lebih rendah dari Ibu Endang. Hal ini mengejutkan lainnya ialah seperti hasil wawancara Peneliti dengan Pak Khoiri yang berdagang buah dan berpendidikan hanya sampai tamatan SD saja. Beliau mengaku bahwa bersedia jika mendapat perintah untuk pindah ke Lokasi Binaan karena tidak ingin melawan seperti temannya yang sesama pedagang. Sikap dari Pak Khoiri ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa berdagang di pinggir jalan merupakan suatu pelanggaran yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Tidak dipungkiri memang berdagang di pinggir jalan lebih enak jika dibandingkan dengan Lokasi Binaan, tetapi di Lokasi Binaan jauh lebih baik dikarenakan lebih praktis dan lebih nyaman. Kenyataannya juga lebih banyak pelanggan ketika berada di pinggir jalan, tidak menutup kemungkinan di lokasi barupun akan mendapatkan pelanggan juga meskipun pelanggan lama.

Pedagang selanjutnya juga mengikuti peraturan yang ada tanpa melakukan perlawanan. Seperti hasil wawancara dengan Pak Muhammad yang berdagang kelapa parut. Latar belakang pendidikannya sama seperti Ibu Endang sampai jenjang SMP dan tergolong pendidikan menengah. Beliau mengatakan bahwa tidak ingin melawan ataupun memberontak karena pada dasarnya satpol pp dan petugas yang lain hanya menjalankan tugasnya untuk menertibkan pedagang di trotoar maupun pinggir jalan. Menurutnya pun berdagang di terminal ataupun Lokasi Binaan tidak ada perbedaan yang mencolok walaupun harus membayar sewa.

Tak berbeda jauh dengan pak Muhammad dan Pak Khoiri yang bersedia untuk pindah di lokasi baru yaitu Ibu Siti pedagang handuk dan perlengkapan solat.

Keuntungan berdagang di pinggir jalan cukup banyak karena tidak diwajibkan membayar sewa, selain itu dapat menambah pelanggan baru. Hal ini tidak membuat Ibu Siti melakukan pemberotakan meskipun memiliki latar belakang pendidikan hanya sampai jenjang SD saja. Keempat pedagang kaki lima memiliki respon yang berbeda-beda, tetapi yang tampak jelas perbedaannya hanya pada Ibu Endang yang melakukan perlawanan saat berlangsungnya penertiban dan pembinaan. Seperti tabel 4.1. mengenai perbandingan antara keempat pedagang tadi yang sebelum dan setelah dibina berikut ini:

Tabel 4.1
Sebelum dan Setelah Pembinaan

No.	Perilaku dan Respons Pedagang Sebelum ditertibkan dan dibina	Perilaku dan Respons Pedagang Setelah ditertibkan dan diibina
1.	Adanya kebebasan untuk berdagang dimanapun, seperti: trotoar, halte, taman, bahu atau pinggir jalan, di depan lampu merah, dan jembatan penyebrangan. Sehingga pedagang di Pasar Minggu mencapai 3000 pedagang.	Tidak langsung menerima, tetapi menolaknya dengan cara mengeluarkan air matanya (menangis) dan tetap bertahan untuk berdagang di lokasi terlarang.
2.	Kebebasan berdagang terjadi karena belum adanya ketegasan dari pimpinan untuk mencari solusi mengenai permasalahan di Pasar Minggu.	Pergantian Gubernur yang dipimpin oleh Pak Jokowi, saat itu Pak Jokowi langsung turun ke jalan untuk mengelilingi pasar dengan berjalan kaki untuk sosialisasi persuasif dengan mengajak pedagang untuk direlokasikan ke tempat penampungan. Para pedagang pun tanpa perlawanan langsung menuruti anjuran yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan pindah ke dalam PD Pasar Jaya atau Lokasi Binaan meskipun belum seluruhnya.

No.	Perilaku dan Respons Pedagang Sebelum ditertibkan dan dibina	Perilaku dan Respons Pedagang Setelah ditertibkan dan diibina
3.	Pedagang sulit untuk dipindahkan ke tempat penampungan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat yang ikut berkontribusi besar dalam mendukung keberadaan pedagang kaki lima di lokasi terlarang, seperti membeli kebutuhan di pinggir jalan.	Menerima penertiban dan pembinaan dengan bersedia pindah ke dalam PD Pasar Jaya dan Lokasi Binaan walaupun hanya sebagian besar pedagang. Tetapi tidak seluruhnya pindah ke tempat penampungan karena ada yang pindah kios ke daerah lain dan ada juga yang pulang ke kampung halamannya.

Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2015

Minimnya budaya tertib dan rendahnya pengetahuan mengenai fungsi dari fasilitas umum menjadi dua faktor utama pentingnya menanamkan aturan dan pengetahuan mengenai fungsi fasilitas umum. Penanaman nilai-nilai ketertiban umum dilakukan dengan berbagai cara, terutama menyiapkan tenaga yang maksimal untuk melakukan interaksi langsung dalam proses penertiban dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan saat pembinaan. Hal ini dilakukan agar penertiban yang dilaksanakan dapat bermakna, sehingga para pedagang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai fungsi fasilitas umum, seperti trotoar, taman, jalan raya, jembatan penyebrangan dan halte. Selain itu, pedagang diharapkan mampu menerima adanya ketertiban ini dengan mengaplikasikan peraturan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari yang akan mencerminkan kepribadian yang tertib. Saat melakukan aktivitasnya sebagai pedagang akan berusaha untuk mencari lokasi yang tidak melanggar norma-norma dan akan bersedia untuk pindah ke tempat penampungan yaitu PD Pasar Jaya dan Lokasi Binaan.

Latar belakang pendidikan mempengaruhi pola berpikir dan perilaku. Seseorang yang berpendidikan rendah akan menghasilkan pemikiran rendah dan perilaku yang minus. Artinya, pedagang yang memiliki latar belakang rendah akan sulit untuk diatur dan dibinanya karena berpikiran tidak akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang berpendidikan menengah atau tinggi akan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Artinya, penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki akan menyadarkan pedagang bahwa lokasi berdagang yang tepat adalah lokasi yang tidak mengganggu masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Namun, hal ini sangat bertolak belakang, dimana latar belakang pendidikan yang rendah justru mencerminkan perilaku yang baik seperti mengikuti dan menaati peraturan. Sebaliknya, latar belakang pendidikan yang menengah justru menolak adanya penertiban dan pembinaan. Padahal sudah tertera jelas adanya peraturan yang melarang berdagang di trotoar maupun pinggir jalan. Pelanggaran yang sudah diketahui hanya diabaikan dan dibiarkan begitu saja. Berbagai cara yang ditempuh untuk tetap bertahan di lokasi terlarang meskipun banyak hambatan yang ditempuh, mulai dari dagangan di ambil hingga dagangannya dibuang oleh petugas Satpol PP.

Untuk mendapatkan respons yang positif maka stimulus yang diberikan harus secara rutin, selain itu stimulus yang diberikan harus bermacam-macam cara guna keberhasilan program ini. Seperti yang dikatakan oleh Guthrie, Guthrie mengatakan bahwa suatu respons akan lebih kuat dan menjadi kebiasaan bila respons

tersebut berhubungan dengan berbagai macam stimulus.⁵⁶ Hal inipun seperti yang diberikan oleh Satpol PP bersama dengan Gubernur DKI Jakarta dahulu yaitu Pak Jokowi. Stimulus yang diberikan berbagai macam seperti kesediaan Gubernur untuk hadir dan datang ke Pasar Minggu dengan memberikan stimulus agar para pedagang bersedia pindah ke Lokasi Binaan. Kedatangan Pak Jokowi ke Pasar Minggu tidak hanya sekali, namun beberapa kali. Kehadirannya bertujuan untuk mengelilingi pasar dengan memberikan sosialisasi persuasif yaitu mengajak dan menasehati para pedagang untuk pindah ke Lokasi Binaan. Pemberian stimulus tersebut mendapat respons yang baik dari para pedagang meskipun masih ada beberapa yang memberikan respon yang buruk seperti kembali berdagang di pinggir jalan.

Hal demikian membuat aparaturnya berjaga lebih maksimal lagi agar tidak ada pedagang lagi yang berdagang di trotoar maupun pinggir jalan. Dengan begitu, terjalinlah kerjasama antara Satpol PP dengan TNI, POLRI dan Dishub untuk keberhasilan program ini. Selain itu, pemberian stimulus yang sering membuat respons yang dihasilkan pun menjadi langgeng. Artinya dengan stimulus yang diberikan selama setiap hari oleh Camat, Lurah dan aparaturnya secara preventif maupun persuasif, maka akhirnya para pedagang pun bersedia pindah dan menetap di PD Pasar Jaya maupun Lokasi Binaan sampai dengan saat ini.

⁵⁶ Mohammad Jauhar. 2011. *Implementasi Paikem Dari Behavioristik Sampai Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustakarya. Hlm: 26.

4.2. Kebertahanan Pedagang dalam Perspektif Robert Merton

Masalah pelanggaran ketertiban sudah cukup kronis dalam kehidupan masyarakat kita. Sistem sosial yang ada sudah terkontaminasi oleh tindakan buruk para oknum dan membentuk kultur negatif. Seperti penumpukan pedagang kaki lima di Pasar Minggu. Jumlah pedagang yang terlampaui batas mencapai ratusan hingga ribuan orang. Ketidakseimbangan antara luas jalan raya dengan pengguna jalan mengakibatkan buruknya kondisi Pasar Minggu. Di samping itu, kurangnya kontrol dan pengawasan dari aparat maupun Pemerintah merupakan faktor penyebab dari ketidaktertiban. Para pedagang menjadi semakin liar dan bertindak sesuai keinginan tanpa adanya kesadaran atas sikap ketidaktertibannya.

Perdagangan bebas yang semakin berkembang inilah yang akan merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitar. Sistem yang bergerak berpengaruh terhadap tertib atau tidaknya suatu wilayah. Jika sistem yang bergerak tidak sesuai dengan aturan, maka dapat menghadirkan suatu permasalahan. Ketidaktertiban merupakan salah satu contoh akibat yang ditimbulkan dari sistem yang tidak berjalan efektif. Akibat dari sistem yang berjalan tidak efektif inilah yang merugikan berbagai pihak. Jika sistem yang salah masih dibiarkan dan berkembang lebih pesat maka semakin memperburuk keadaan dan masalah akan semakin kompleks. Kelalaian dari beberapa aparat yang bekerja tidak maksimal merupakan salah satu faktor pendukung dari tidak efektifnya sistem. Padahal tugas aparat yang lebih berkontribusi besar untuk tercapainya lingkungan yang tertib sesuai dengan

peraturan. Tetapi, justru menyimpang dari aturan yang ada. Mayoritas dari aparaturnya yang bersikap kurang tegas dalam menyikapi pedagang yang melanggar aturan. Akibatnya masalah ketidaktertiban seperti keberadaan pedagang kaki lima di lokasi terlarang masih melekat.

Pada dasarnya, Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang dan kekuasaan penuh di suatu daerah atau wilayah. Karena Pemerintah Daerah atau biasa disebut dengan Gubernur merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁵⁷

Pemerintah sangat berpengaruh besar terhadap kondisi daerah dan sikap masyarakat. Jika Pemerintah tidak berperan aktif dalam menjalankan tugasnya. Maka tidak akan terwujud wilayah yang bersih, indah dan nyaman. Ketidakpedulian dan sikap acuh dari Pemimpin inilah yang menimbulkan masyarakat mengikuti jejaknya. Apabila tindakan seperti ini melekat dan bertahan lama, masalah akan semakin berkembang dan menumpuk. Oleh karena itu, harus terwujudnya sistem baru untuk menciptakan perubahan yang diinginkan. Pembuatan sistem baru sesuai dengan aturan yang akan melahirkan kebijakan baru agar terciptanya perubahan.

⁵⁷ Tim Dosen Kewarganegaraan UNJ. 2010. *Pokok-pokok Materi Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Revisi*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. Hlm: 140–141

Tak hanya itu saja, kerjasama yang terjalin berpengaruh juga terhadap pencapaian hasil yang diharapkan. Pada dasarnya, kerjasama juga harus terjalin dengan masyarakat. Karena masyarakat ikut berkontribusi untuk keberhasilan program yang dijalankan. Minimnya budaya tertib dikalangan masyarakat kita membuat sikap masyarakat masih kurang tertib. Kenyataannya sebagian besar masyarakat lebih asik dan lebih senang berbelanja di pinggir jalan. Hal inipun berpengaruh besar terhadap mental dari para pedagang. Artinya sikap masyarakat yang akan membentuk ketidaktertiban para pedagang. Sikap para pedagang yang akan menciptakan kondisi wilayah menjadi tidak tertib dan teratur.

Berkembangnya suatu zaman yang akan meningkatkan suatu kebutuhan dalam hidup. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi menjadi suatu pendorong untuk mendapatkan penghasilan yang mencukupi. Dilihat dari segi profesi pedagang yang memperoleh penghasilan tidak menentu, tidak seperti pegawai kantoran yang mendapatkan upah gaji setiap bulan. Jumlah pedagang yang relatif banyak menimbulkan persaingan di dalamnya. Berbagai cara yang ditempuh untuk mendapatkan pelanggan yang banyak sehingga meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Pada dasarnya tingkat perekonomian pedagang yang terbatas inilah yang mengharuskan mereka mengambil langkah yang dikehendaki. Maksud dari langkah yang dikehendaki merupakan fungsi manifest, suatu tindakan yang harus dicapai apapun caranya. Melihat kebutuhan hidup yang tidak sedikit, karena perkembangan

suatu zaman yang menuntutnya agar tetap bertahan hidup dalam kondisi dan situasi apapun.

Pencapaian suatu keinginan dengan suatu tindakan yang pasti. Maka dari itu fungsi laten yang merupakan tindakan yang tidak dikehendaki dilaksanakan oleh individu. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima. Para pedagang yang tidak mendapatkan bimbingan dan arahan inilah yang menimbulkan suatu permasalahan. Karena langkah yang ditempuh untuk mencapai keinginannya adalah berdagang di lokasi terlarang. Padahal sudah tertera jelas ada peraturan yang melarang untuk berdagang di tempat umum, seperti: taman, halte, trotoar, jembatan penyebrangan dan lain-lain. Namun, hanya diabaikan demi tercapainya suatu keinginan.

Dengan kehadiran fungsi manifest yang semakin berkembang dan fungsi laten yang diinternalisasikan. Maka kondisi lingkungan menjadi semakin buruk. Hal ini terbukti kondisi Pasar Minggu yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima sejak kurang lebih tiga tahun lalu. Aturan dan tata tertib yang berlaku seolah-olah hanya dipajang didinding saja tanpa adanya pergerakan sedikit pun. Keadaan seperti itu, menimbulkan disfungsi di Pasar Minggu.

Menurut Merton disfungsi merupakan suatu tindakan yang tidak relevan bagi sistem tersebut. Seperti contoh Jalan Raya Ragunan yang berfungsi secara benar sebagai tempat perlintasan kendaraan, namun disalahgunakan oleh pedagang sebagai lapak untuk menggelar dagangannya. Tindakan seperti ini tidak sesuai dengan sistem

yang bergerak. Saran dan prasarana umum yang disediakan oleh Pemerintah tidak dipergunakan sesuai fungsinya. Kegiatan yang bersifat disfungsional inilah yang menyebabkan timbulnya pertentangan dalam sistem sosial. Dampak dari inipun merugikan semua pihak terutama bagi pengguna jalan yang setiap hari melintasi wilayah ini. Seperti bagan 4.3 yang tertera di bawah ini:

Bagan 4.3 Dampak Sistem Yang Tidak Efektif



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015

Suatu bentuk pelanggaran akan ketertiban umum mengenai penggunaan sarana dan prasarana umum menjadi suatu kewajiban yang harus diterima. Kondisi demikian sangat memilukan, karena sesungguhnya banyak sekali yang harus dikorbankan akibat bentuk pelanggaran lalu lintas yang tidak kunjung berhenti. Munculnya sistem baru yang dibuat oleh pemimpin atau Gubernur baru yang akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Pergantian pemimpin yang sekiranya dapat merubah sistem lama menjadi sistem baru yang terorganisir dengan baik. Sistem baru inipun seolah berjuang keras untuk membangun budaya baru dalam sistem sosial masyarakat kita. Budaya tertib berlalu lintas seperti penggunaan jalan raya yang selama ini kurang diperhatikan masyarakat harus terus dibangun oleh para aparatur. Dengan adanya program penertiban pedagang kaki lima dengan merelokasikan pedagang ke tempat penampungan. Agar jalan raya dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, menciptakan kondisi Jalan Raya Ragunan menjadi kondusif dan teratur.

Di sisi lain, para aparat yang terlibat mulai dari Satpol PP, POLRI TNI dan Dishub harus tetap bekerja sama untuk pencapaian hasil yang maksimal. Sikap yang tegas dan professional yang dibutuhkan dalam menertibkan pedagang kaki lima. Selain dari aparat yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pembinaan, masyarakat sekitar juga harus berkontribusi dalam membantu mensukseskan program ini. Dengan mengurangi kebiasaan buruk untuk berbelanja di tempat umum merupakan satu langkah konkret yang bernilai positif. Karena pada dasarnya

mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk bukanlah perkara yang mudah. Tanpa adanya kerjasama yang terjalin tidak akan mampu untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut.

Di samping itu, struktur sosial yang dibuat sebelumnya harus dirubah dengan struktur sosial baru agar ketertiban mampu diraihinya. Karena sebenarnya masyarakat itu dibentuk oleh struktur sosial dimana mereka hidup atau berada. Jika struktur sosial yang dibuat dan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Maka masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut akan bersikap tertib sesuai dengan norma yang berlaku, begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, setelah penertiban dan pembinaan dilaksanakan maka struktur sosial di tempat penampungan harus dibuat dengan baik dan sesuai dengan aturan. Secara otomatis, lingkungan yang di sekitar tempat penampungan akan ikut terbawa dengan struktur dan sistem sosial yang dijelankannya. Tujuan dari hal tersebut adalah agar para pedagang kaki lima menjadi lebih tertib dan teratur di lokasi barunya. Serta merasakan kenyamanan berdagang di lokasi baru dan kemungkinan akan bertahan dalam jangka waktu panjang. Namun, lemahnya pengawasan dari aparaturnya menjadi salah satu jawaban atas ketidakberhasilan program penertiban dan pembinaan yang dilakukan di Pasar Minggu. Hal ini bukan sesuatu yang mengagetkan, karena jika dilihat dari berbagai pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, pola ketertiban para pedagang masih tergolong sangat rendah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Masalah sosial kerap kali terjadi yang bersumber dari lemahnya kesadaran masyarakat mengenai ketertiban umum. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi di Pasar Minggu. Masalah seperti ini kerap berdampak besar bagi kelancaran jalan raya yaitu terhambatnya arus lalu lintas. Jika kondisi demikian terabaikan begitu saja, maka masalah ini akan semakin berkembang dan semakin sulit untuk mengatasinya. Dengan penertiban dan pembinaan tentu akan menguatkan kembali nilai-nilai ketertiban umum dikalangan masyarakat.

Penertiban dan pembinaan adalah hal penting yang harus dilaksanakan, namun bukan perkara mudah dalam melaksanakannya. Melihat kondisi Pasar Minggu yang sangat tidak tertib, kotor, kumuh, dan bau yang disebabkan oleh penumpukan pedagang kaki lima di pinggir jalan hingga mencapai ribuan orang. Kondisi demikian terjadi karena adanya kebebasan yang diberikan dahulu oleh pimpinan atas maupun aparat. Dengan pergantian pemimpin dan kebijakan baru, maka dibentuklah program pembinaan pedagang kaki lima yang diawali dengan penertiban di trotoar dan pinggir jalan. Program ini bertujuan untuk merubah pola pikir dan pola perilaku para pedagang agar sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat.

Dengan melakukan penertiban dan merelokasikan pedagang kaki lima ke Lokasi Binaan, petugas Satpol PP bekerja sama dengan TNI, POLRI dan Dishub

(Dinas Perhubungan). Kerjasama yang terjalin berfungsi untuk menjaga atau *mebackup* Satpol PP saat penertiban berlangsung, jika terjadi perlawanan atau kerusuhan para pedagang. Dalam suatu program dibutuhkan mekanisme pelaksanaan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Mekanisme penertiban dilakukan dengan tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berawal dari proses perencanaan terlebih dahulu, yakni melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima, mencari alokasi tempat penampungan, pembuatan atau pembagian jadwal penjagaan dan materi yang akan disampaikan nanti.

Berlanjut pada proses berikutnya yaitu pelaksanaan penertiban. Dalam pelaksanaan yang paling penting adalah penyuluhan yang dilakukan secara preventif hingga represif dan pemberian materi guna menyerap nilai-nilai ketertiban umum. Terakhir, proses pengawasan yang diberikan oleh aparaturnya bersama dengan Lurah dan Camat Pasar Minggu, yang bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan terhadap para pedagang setelah mengikuti penertiban. Pengawasan yang dilakukan berlangsung setiap hari selama 1X24 jam. Selain itu, untuk meminimalisir proses pengawasan maka dibuatlah pos-pos penjagaan untuk petugas Satpol PP, POLRI dan Dishub (Dinas Perhubungan).

Penertiban yang dilakukan secara demikian diharapkan mampu mendorong perubahan di Pasar Minggu. Di samping itu, adanya pembinaan yang diberikan oleh aparaturnya dan pihak Lokasi Binaan setelah para pedagang direlokasikan. Melalui penertiban dan pembinaan yang dapat memberikan pengaruh terhadap para pedagang kaki lima berupa perubahan tingkah laku pedagang dalam proses berdagang. Karena

pada dasarnya tingkah laku individu terbentuk sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Jika kondisi lingkungannya tertib, maka tercipta individu yang tertib, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, dibutuhkan stimulus yang diberikan guna menghasilkan respons yang positif. Stimulus yang diberikan berupa penerapan nilai-nilai ketertiban yang terpacu dalam Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) dan fungsi-fungsi fasilitas umum. Stimulus yang diberikan dari pimpinan atas ke lembaga sosial terbawah, terlebih khusus untuk pedagang kaki lima. Stimulus diberikan melalui penyuluhan dan pengawasan dengan harapan mampu memberikan perubahan di Pasar Minggu menjadi terlihat lebih tertib dan teratur.

Pemberian stimulus dilakukan dengan tujuan agar fungsi dari fasilitas umum, sarana dan prasarana umum dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena pedagang kaki lima di Pasar Minggu justru memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat menggelar dagangannya dan hal ini merupakan suatu bentuk disfungsi. Seperti yang dikatakan oleh Merton, disfungsi merupakan konsekuensi yang tidak relevan bagi sistem tersebut. Artinya, sistem yang dilaksanakan di Pasar Minggu tidak relevan atau tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Melalui pemberian stimulus yang dilakukan secara rutin dan terus menerus maka respons yang dihasilkan mengarah ke hal positif. Dimana respons dari lembaga terbawah setelah mendapat stimulus dari pimpinan atas berupa suatu dukungan moral untuk keberhasilan pembinaan pedagang kaki lima. Respons lainnya yaitu respons para pedagang yang bersedia direlokasikan di tempat penampungan (PD Pasar Jaya atau Lokasi Binaan). Tidak menutup kemungkinan, ada beberapa

respons pedagang yang sekiranya mempersulit aparaturnya dalam proses pelaksanaan. Dengan alasan berdagang di dalam arena pasar dan Lokasi Binaan sangat sepi pengunjung sehingga pedagang sulit mendapatkan keuntungan. Hal ini menimbulkan para pedagang kaki lima berani untuk bertahan di lokasi terlarang. Namun, kondisi seperti ini tidak menjadikan aparaturnya menyerah dan lepas tangan. Justru menjadi suatu dorongan agar lebih ditingkatkan lagi dalam menertibkan dan memberikan penyuluhan serta pengarahan terhadap para pedagang.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan setiap hari berfungsi untuk memantau dan mengontrol para pedagang agar tidak kembali lagi ke jalanan. Pengawasan diberikan dengan melakukan penjagaan selama 1X24 jam secara bergilir di pos penjagaan Satpol PP (berada di samping PD Pasar Jaya), Polisi (berada di samping Pusat Perbelanjaan Robinson) dan Dishub (berada di sebrang lampu merah Pasar Minggu). Selain itu, pengawasan dilakukan dengan mengelilingi sepanjang Jalan Raya Ragunan tepatnya dari depan Beacukai sampai depan Pusat Perbelanjaan Robinson dan sepanjang jalan baru ke arah terminal.

Dengan adanya penertiban dan pembinaan inilah perubahan sosial di Pasar Minggu terlihat lebih nyata. Padahal, kondisi Pasar Minggu dahulu terlihat sangat tidak teratur dan tidak tertib, karena keberadaan pedagang kaki lima dimana saja dengan jumlah yang relatif banyak. Keberadaan pedagang kaki lima di lokasi terlarang dengan memanfaatkan sarana dan prasarana umum sebagai tempat mereka berdagang. Fungsi laten yang dilakukan oleh pedagang kaki lima inilah semata-mata karena tuntutan perekonomian yang mengharuskannya bertingkah laku seperti

demikian. Dimana hal yang dikehendakinya (fungsi manifest) berupa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya agar dapat bertahan hidup (tidak kekurangan). Oleh karena itu, hal yang tidak dikehendaki (fungsi laten) inipun dilaksanakan seperti penjelasan sebelumnya. Dengan pemberian stimulus secara rutin dan berkepanjanganlah, maka tercipta perubahan di Pasar Minggu dengan tidak adanya pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Ragunan. Karena pedagang kaki lima sudah direlokasikan ke lokasi penampungan dan dibentuknya tiga jalur jalan sebagai upaya mengurangi tingkat kemacetan. Dengan begitu, pemandangan Pasar Minggu terlihat lebih tertib dan indah.

Di samping itu, adanya pembinaan yang diberikan oleh pihak Lokasi Binaan setelah para pedagang direlokasikan. Pembinaan diberikan berupa penyuluhan dan pengarahan agar para pedagang tidak melanggar norma kembali. Selain itu, para pedagang juga diberikan materi oleh pihak Lokasi Binaan berupa cara bertransaksi atau memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Sebaiknya para pedagang bersikap ramah jika ada konsumen yang berusaha untuk menawar harga dagangannya. Dengan begitu dapat mencerminkan suasana yang nyaman dan tenang.

Di sisi lain, sarana dan fasilitas yang tersedia di Lokasi Binaan dapat memberikan kepuasan hati bagi para pedagang. Serta sikap kepedulian dari pihak Lokasi Binaan yang memberikan kenyamanan bagi para pedagang seperti jika ada kesulitan atau kekurangan dapat menyampaikan langsung ke Pak Suryaman selaku Korlap atau Pak Hendra selaku Bendahara ataupun Pak Burhan selaku Sekretaris. Hal

ini menghasilkan keberterapan para pedagang di lokasi barunya, baik di PD Pasar Jaya maupun di Lokasi Binaan

5.2. Saran

Penertiban dan pembinaan menjadi salah satu langkah kongkrit dalam mengatasi masalah ketidaktertiban di kalangan masyarakat khususnya pedagang kaki lima. Akan tetapi, dibutuhkan perencanaan secara matang agar program dapat berjalan sesuai tujuannya. Perencanaan dilakukan dengan memberikan fasilitas yang memadai di PD Pasar Jaya maupun Lokasi Binaan seperti: toilet umum, mushollah, genteng, kios, kantin dan lain-lain. Di samping itu, memberikan suatu tata tertib agar para pedagang bisa berdagang dengan tertib di lokasi barunya dan disertai dengan pembuatan sanksi atau hukuman terhadap pedagang yang berusaha melanggar tata tertib yang telah dibuat. Kemudian, memberikan suatu keamanan dan kebersihan untuk PD Pasar Jaya maupun Lokasi Binaan agar para pedagang merasa nyaman sehingga mampu bertahan lebih lama.

Ada baiknya, program penertiban dan pembinaan dilakukan pengevaluasian agar mengetahui apa saja yang harus dirubah dan dipertahankan. Program penertiban dan pembinaan, sebaiknya tidak dilakukan hanya satu atau dua tahun saja. Tetapi, harus berlangsung dalam jangka waktu lebih lama meskipun nantinya ada pergantian pemimpin baru. Hal ini dilakukan agar tidak memudarnya kembali nilai ketertiban umum yang sekiranya sudah tercipta di Pasar Minggu.

Selain perencanaan yang lebih matang, aparaturnya perlu melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memantau perilaku pedagang yang sekiranya sudah mulai menyimpang agar segera ditegur dan diberikan pengarahan atau penyuluhan. Pengawasan juga harus dilakukan secara rutin dengan berkeliling wilayah Pasar Minggu selama tiga kali dalam sehari, jangan hanya duduk manis saja di dalam “Pos Penjagaan”. Jika ada satu atau dua orang yang nekat berdagang kembali di pinggir jalan, jangan diberikan ampunan dengan memperizinkannya berdagang. Namun, bersikaplah tegas dengan sosialisasi langsung secara represif yaitu mengambil dan mengangkut barang dagangannya ke Kantor Kecamatan atau Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, perlu ditingkatkan kembali kinerja dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, kerjasama yang sudah terjalin antara Satpol PP dengan TNI, POLRI, Dishub harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan kembali. Agar penertiban dan pembinaan yang telah dilakukan tidak berjalan sia-sia dan hanya numpang lewat saja. Selain itu, ada baiknya memberikan pendidikan terhadap para pedagang, meskipun bukan secara formal dan memberikan pengetahuan mengenai nilai dan norma di masyarakat.

Terakhir, seluruh masyarakat juga ikut berpartisipasi secara aktif dengan mengikuti nilai dan norma yang berlaku seperti menghilangkan kebiasaan buruknya berbelanja di pinggir jalan. Karena hal tersebut bisa membahayakan diri sendiri dan berpengaruh besar terhadap pedagang kaki lima yang sulit untuk direlokasikan. Jika masih ada masyarakat yang nakal untuk membeli kebutuhan di pinggir jalan, maka

harus segera diberikan himbauan atau pemberian sanksi agar tidak mengulanginya lagi. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan baik masyarakat maupun para pedagangnya dan membangun kepedulian serta kesadaran bagi keduanya. Minimnya pengawasan berarti minimnya kontrol sosial, sehingga masalah sosial akan terus berkembang. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait untuk melakukan kontrol sosial agar menciptakan ketertiban sosial di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arikunto, Suharsini Arikunto. 2010. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi". Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bungis, H.M. Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eveline Siregar dan Hartini Nara. 2011. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jauhar, Mohammad. 2011. *Implementasi Paikem Dari Behavioristik Sampai Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Ldi, Abdullah dan Safarina. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Manning, Chris. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Poloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ram, Aminuddin dan Tita Sobari. 1984. *Sosiologi Edisi Keenam Jilid Dua*. Jakarta: Erlangga

- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern*
- Ritzer, George. 2011. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Ritzer , George dan Barry Smart. 2001. *Handbook Teori Sosial*. Jakarta: Penerbit Nusa Media.
- Setiadi, Elly.M Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Siahaan, Jokie M. S.. 2009. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*. Jakarta: PT Indeks.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tim Dosen Kewarganegaraan UNJ. 2010. *Pokok-pokok Materi Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Revisi*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta

SKRIPSI:

- Ariani, Hayu. 2011. *Strategi keberterahanan pedagang kaki lima pujasera usaha kecil mikro (UKM)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Sosiologi Pembangunan: Universitas Negeri Jakarta.
- Amalia, Kristin Ayu. 2013. *Sosialisasi Kewirausahaan Di Keluarga Pedagang Kaki Lima Pasar Malam Jiung*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Pendidikan Sosiologi: Universitas Negeri Jakarta.
- Navilah, Khisbiatun. 2011. *Dilem Ruang Publik Perkotaan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Sosiologi Pembangunan: Universitas Negeri Jakarta.

JURNAL:

Subaryata, 2007, "*Kajian Evaluasi Keberadaan Usaha Dagang Di Pinggir Jalan Dan Trotoar Terhadap Kemacetan Lalu Lintas*", "JURNAL, Warta Penelitian Perhubungan Volume 19 Nomor 1, Tahun 2007".

International journal of criminology and sociology, 2013 Vol.2, tersedia di: <http://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/viewFile/1089/pdf>, diakses pada 6 Mei 2015 pukul 19.30 WIB

LAINNYA:

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8, dari Kantor Kelurahan Pasar Minggu.

Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tersedia di : http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_25_1978.pdf diakses pada 16 Maret 2014 pukul 12.07 WIB.

<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=88546> "500 PKL di Kawasan Pasar Minggu Ditertibkan", diakses pada tanggal 18 juli 2015 PKL: 16.00 WIB

INSTRUMENT PENELITIAN

No.	Komponen	Data Primer				Data Sekunder
		PL	WT	WTT	B	SK/J/M-K/I
I	Pendahuluan					
	A. Latar Belakang Masalah	X	X		X	X
	B. Permasalahan Penelitian	X	X	X		
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian		X		X	
	D. Tinjauan Penelitian Sejenis	X				X
	E. Kerangka Konseptual					
	1. Pembinaan Dalam Bingkai Pendidikan	X	X		X	
	2. Perspektif Struktural Fungsional Kebertahanan Pedagang Kaki Lima	X	X		X	
	3. Pembinaan Aspek Perubahan Sosial	X	X		X	
	F. Metodologi Penelitian					
	1. Pendekatan Penelitian				X	
	2. Peran Peneliti	X	X			
	3. Lokasi dan Waktu Penelitian	X	X			
	4. Subjek Penelitian	X	X	X		
	5. Teknik Pengumpulan Data	X	X		X	
	6. Triangulasi Data	X	X		X	
	7. Sistematika Penulisan		X			
II	Dinamika Pedagang Kaki Lima Pasar Minggu dan Pembinaannya					
	A. Sejarah Pasar Minggu	X	X	X	X	
	B. Lokasi Keberadaan Pedagang Kaki Lima	X	X			
	C. Latar Belakang Terbentuknya Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima	X	X			
III	Proses Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasar Minggu					
	A. Mekanisme Program Pembinaan	X	X		X	

	Pedagang Kaki Lima Pasar Minggu					
	B. Hasil Pelaksanaan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasar Minggu	X	X			
IV	Pola Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasar Minggu					
	A. Pendahuluan	X	X			
	B. Pembinaan Pedagang Dalam Bingkai Pendidikan Behavioristik	X	X		X	
	C. Pembinaan Pedagang Dalam Perspektif Merton	X	X		X	
	D. "Wajah Sosial" Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu		X		X	
V.	PENUTUP\					
	A. Kesimpulan	X	X		X	
	B. Saran	X				

Keterangan:

PL : Pengamatan Langsung

WT : Wawancara Tersruktur

WTT : Wawancara Tidak Terstruktur

B : Buku

SK/J/M-K/I : Skripsi/Jurnal/Majalah-Koran/Internet

PANDUAN WAWANCARA

INFORMAN: MASYARAKAT

Nama :

Pekerjaan :

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

Tujuan Wawancara :

BAGIAN PERTAMA: SEJARAH PASAR MINGGU

1. Bagaimana awal mula terbentuknya Pasar Minggu?
2. Bagaimana awal mula terbentuknya perdagangan di pinggir jalan Pasar Minggu?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai program pembinaan pedagang kaki lima?
4. Apa saja keuntungan dan kerugian dengan keberadaan pedagang kaki lima di pinggir jalan?
5. Apa saja dampak yang ditimbulkan setelah adanya program pembinaan terhadap pedagang kaki lima?

PANDUAN WAWANCARA

INFORMAN: MASYARAKAT

Nama :

Pekerjaan :

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

Tujuan Wawancara :

BAGIAN PERTAMA: OPINI SETELAH ADANYA PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi Pasar Minggu dahulu?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai program pembinaan pedagang kaki lima?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi Pasar Minggu saat ini?
4. Apa saja keuntungan dan kerugian yang dirasakan dengan keberadaan pedagang kaki lima di trotoar atau pinggir jalan?
5. Apa dampak yang dirasakan setelah adanya program pembinaan pedagang kaki lima?

PANDUAN WAWANCARA

INFORMAN : KETUA PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR JAYA

PASAR MINGGU

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Tujuan Wawancara :

BAGIAN PERTAMA : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI

LIMA

1. Apa latar belakang pemindahan pedagang di PD Pasar Jaya Pasar Minggu?
2. Berapa banyak kios yang ada di PD Pasar Jaya Pasar Minggu?
3. Berasal dari manakah pedagang-pedagang yang berada di kios PD Pasar Jaya Pasar Minggu?
4. Adakah persyaratan yang dipenuhi pedagang untuk menempati kios di PD Pasar Jaya Pasar Minggu?
5. Berapa uang sewa yang harus dibayar oleh pedagang?
6. Kapan kios-kios di PD Pasar Jaya Pasar Minggu mulai dibuka dan dioperasikan?
7. Bagaimana pembagian lokasi yang ada di PD Pasar Jaya Pasar Minggu?
8. Apa saja dampak yang dirasakan dengan adanya program pembinaan pedagang kaki lima?

PANDUAN WAWANCARA

INFORMAN : KETUA ATAU KORLAP LOKASI BINAAN

PASAR MINGGU

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Tujuan Wawancara :

BAGIAN PERTAMA : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI

LIMA

1. Bagaimana sejarah atau awal mula terbentuknya Lokasi Binaan?
2. Bagaimana pembagian lokasi untuk para pedagang kaki lima?
3. Apa saja materi yang disosialisasikan melalui program pembinaan ini?
4. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk berdagang di Lokasi Binaan?
5. Apakah terdapat uang sewa yang harus di bayar oleh pedagang? Jika iya, berapa jumlah uang sewanya?
6. Adakah kesulitan yang dirasakan saat pemindahan ke Lokasi Binaan?
7. Apa saja keuntungan dan kerugian yang dirasakan setelah adanya Lokasi Binaan?

PANDUAN WAWANCARA

INFORMAN : KASATGAS SATPOL PP

DI WILAYAH KELURAHAN PASAR MINGGU

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Tujuan Wawancara :

BAGIAN PERTAMA : SEJARAH PROGRAM PEMBINAAN

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima ?
2. Siapa yang menjadi pelopor terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?
3. Kapan program pembinaan pedagang kaki lima terbentuk?
4. Apa tujuan dibentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?
5. Berapa banyak pedagang yang menjadi sasaran dari program pembinaan?

BAGIAN KEDUA : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN

6. Berapa banyak petugas satpol pp yang diturunkan untuk membina pedagang kaki lima di Pasar Minggu?
7. Bagaimana pembagian tugas untuk para petugas satpol pp dalam upaya menjaga jalan raya agar tidak ada pedagang kaki lima lagi yang berdagang di pinggir jalan?
8. Berapa lama (waktunya) petugas satpol pp dalam melakukan penjagaan di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu?
9. Siapa saja yang terlibat dalam program pembinaan pedagang kaki lima?
10. Apakah pada saat pembinaan dilaksanakan, bapak ikut turun ke lapangan? atau sekedar memerintahkan saja ke anggota?
11. Apa saja agenda dari program pembinaan pedagang kaki lima?
12. Apa saja materi yang disosialisasikan melalui program pembinaan pedagang kaki lima?

13. Apakah ada kesulitan saat melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima?
14. Apakah sosialisasi program pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilakukan mampu merubah kondisi Pasar Minggu?
15. Apa manfaat yang diperoleh setelah adanya program pembinaan pedagang kaki lima?

PANDUAN WAWANCARA

INFORMAN : SATPOL PP

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Tujuan Wawancara :

BAGIAN PERTAMA: PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI

LIMA

1. Apa latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?
2. Kapan pelaksanaan pembinaan mulai dilaksanakan?
3. Bagaimana agenda pelaksanaan pembinaan tersebut berlangsung?
4. Berapa banyak pedagang yang menjadi sasaran dari program pembinaan?
5. Siapa saja yang ikut terlibat melakukan sosialisasi program pembinaan ke para pedagang?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan pedagang kaki lima?
7. Apa saja materi yang disosialisasikan melalui program pembinaan?
8. Adakah kesulitan dalam mensosialisasikan program pembinaan di PD Pasar Jaya dan Lokasi Binaan?
9. Apakah sosialisasi program pembinaan yang telah dilakukan mampu mengurangi tingkat kemacetan di Pasar Minggu?

PANDUAN WAWANCARA

INFORMAN : APARAT KEPOLISIAN DI POLSEK METRO PASAR MINGGU

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Tujuan Wawancara :

BAGIAN PERTAMA: PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. Apa latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?
2. Bagaimana alur koordinasi dalam pelaksanaan program pembinaan?
3. Apa saja agenda dari program pembinaan?
4. Berapa banyak petugas kepolisian yang diturunkan dalam program pembinaan ini?
5. Adakah kendala saat dilaksanakannya program pembinaan pedagang kaki lima?
6. Apa saja dampak yang dirasakan setelah dilaksanakannya program pembinaan pedagang kaki lima?

PANDUAN WAWANCARA

INFORMAN : DINAS PERHUBUNGAN ATAU DISHUB

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Tujuan Wawancara :

BAGIAN PERTAMA: PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. Apa latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?
2. Bagaimana alur koordinasi dalam pelaksanaan program pembinaan ini?
3. Apa saja agenda dari program pembinaan?
4. Berapa banyak petugas Dishub yang diturunkan dalam program pembinaan ini?
5. Adakah kendala saat dilaksanakannya program pembinaan pedagang kaki lima?
6. Bagaimana proses pembentukan tiga jalur di Jalan Raya Ragunan?
7. Apa saja dampak yang dirasakan setelah dilaksanakannya program pembinaan pedagang kaki lima?

PANDUAN WAWANCARA

INFORMAN : CAMAT PASAR MINGGU

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Tujuan Wawancara :

BAGIAN PERTAMA: SEJARAH PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?
2. Terdapat dimanakah peraturan tentang pembinaan pedagang kaki lima?
(Perda Nomer.....)
3. Kapan program pembinaan pedagang kaki lima mulai dijalankan?
4. Apa tujuan dibentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?
5. Berapa banyak pedagang yang menjadi sasaran dari program pembinaan pedagang kaki lima?

BAGIAN KEDUA: PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

6. Apa saja agenda dari program pembinaan pedagang kaki lima?
7. Siapa saja yang terlibat dalam program pembinaan pedagang kaki lima?
8. Bagaimana alur koordinasi dalam pelaksanaan program pembinaan pedagang kaki lima?
9. Bagaimana peranan bapak Camat Pasar Minggu dalam melaksanakan program pembinaan pedagang kaki lima?
10. Apa saja materi yang disosialisasikan melalui program pembinaan pedagang kaki lima?
11. Apakah terdapat kesulitan dalam mensosialisasikan program pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu?
12. Adakah dampak setelah adanya program pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu?

PANDUAN WAWANCARA

INFORMAN : LURAH PASAR MINGGU

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Tujuan Wawancara :

BAGIAN PERTAMA: SEJARAH PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?
2. Terdapat dimanakah peraturan tentang pembinaan pedagang kaki lima?
(Perda Nomer.....)
3. Kapan program pembinaan pedagang kaki lima mulai dijalankan?
4. Apa tujuan dibentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?
5. Berapa banyak pedagang yang menjadi sasaran dari program pembinaan pedagang kaki lima?

BAGIAN KEDUA: PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

6. Apa saja agenda dari program pembinaan pedagang kaki lima?
7. Bagaimana alur koordinasi dalam pelaksanaan program pembinaan pedagang kaki lima?
8. Apa saja materi yang disosialisasikan melalui program pembinaan pedagang kaki lima?
9. Apakah terdapat kesulitan dalam mensosialisasikan program pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu?
10. Apakah manfaat setelah adanya program pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu?

PANDUAN WAWANCARA

INFORMAN : PEDAGANG KAKI LIMA

Nama :
Asal : Asli DKI Jakarta / Pendatang
Status : Sudah Menikah / Belum Menikah
Jenis Dagangan :
Tanggal Wawancara :
Tujuan Wawancara :

BAGIAN PERTAMA: SEJARAH PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. Sejak kapan anda sudah merintis untuk berdagang?
2. Apa pendidikan terakhir anda?
3. Apakah anda memiliki pekerjaan sampingan selain berdagang?
4. Dimana lokasi anda berdagang dahulu sebelum adanya pembinaan ini?
5. Kapan anda mulai berdagang di pinggir jalan? Dan apa alasan anda memilih di pinggir jalan?
6. Bagaimana kondisi Pasar Minggu dahulu sebelum adanya program pembinaan ini?
7. Bagaimana interaksi anda dengan pedagang-pedagang lain saat berdagang di pinggir jalan atau bahu jalan?

BAGIAN KEDUA: PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN

8. Apakah anda mengetahui dan paham mengenai peraturan yang melarang untuk berdagang di pinggir jalan?
9. Bagaimana pendapat anda mengenai program pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan?
10. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh petugas satpol pp terhadap anda? (materi yang diberikan seperti apa?)

11. Kapan anda mulai dipindahkan ke PD Pasar Jaya atau Lokasi Binaan di Pasar Minggu?
12. Saat pembinaan berlangsung, apakah ada keinginan untuk melawan atau berusaha untuk mempertahankan lokasi anda berdagang? Dan apakah ada rencana untuk kembali berdagang di pinggir jalan?
13. Adakah perbedaan antara lokasi berdagang anda dahulu dengan saat ini?
14. Bagaimana interaksi yang anda jalin dengan pedagang yang lain di lokasi baru?
15. Apa dampak yang anda rasakan setelah adanya program pembinaan ini?

Lampiran I
Transkrip Wawancara Dengan Camat Pasar Minggu
Profil Informan I (dengan panduan wawancara)

Nama : Drs. Heryanto (diwakili oleh Ariefuddin)

Jabatan : Staff Bagian Kasi Pemerintahan Ketentraman & Ketertiban Kec. Pasar Minggu

Tanggal Wawancara : 26 Februari 2015

BAGIAN PERTAMA : SEJARAH PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. P: Bagaimana latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?

A: Latar belakangnya itu karna pedagang kaki lima telah menyalahgunakan fungsi sarana umum seperti trotoar di Jalan Raya Ragunan. Trotoar jalannya itu dialihfungsikan oleh pedagang kaki lima menjadi tempat jualan sayuran, buah-buahan, lauk-pauk, pakaian dan lain-lain. Pedagang juga gelar dagangannya sampe ke bahu jalan dek. Bukan hanya di trotoar aja dek, tapi di halte depan Ramayana juga dimanfaatkan sama pedagang buat berjualan, terus juga di jembatan penyebrangan yang di samping Robinson juga di manfaatkan sama pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di Pasar Minggu itu banyak sekali dek, numpuk sampe satu jalur Jalan Raya Ragunan. Semuanya berdampak bagi masyarakat yang membuat masyarakat di sekitar Pasar Minggu menjadi resah dan banyak mengeluh. Kendaraan jadi susah gerak karna macet total. Soalnya ngga sesuai antara luas jalan sama jumlah pedagang dan jumlah kendaraan yang lewat. Karna jalanan di Pasar Minggu ini juga ngga terlalu luas banget kan dek, ditambah lagi pedagang kaki lima yang pakai jalan raya sampe satu jalur, kemudian banyak kendaraan yang lewat Pasar Minggu. Banyaknya pedagang kaki lima yang membuat jalanan menjadi macet ini bisa berdampak juga terhadap kecelakaan lalu lintas dek. Mengapa demikian? karna konsentrasi dan emosi pada saat mengendarai kendaraan menjadi terganggu. Jalanan di wilayah Pasar Minggu juga menjadi kotor dan bau akibat banyaknya pedagang kaki lima atau masyarakat yang mungkin membuang sampah sembarangan. Sehingga semuanya menyebabkan kondisi di Pasar Minggu menjadi sembarawut dan tidak tertata baik sesuai dengan tata kota. Semenjak Gubernurnya waktu itu Jokowi, dicarilah solusi untuk mengatasi permasalahan di Pasar Minggu ini dengan dibentuknya program pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP yang dibantu oleh TNI, POLRI dan Dishub.

2. P: Terdapat dimanakah peraturan tentang pembinaan pedagang kaki lima?

A: Pada saat pembinaan pedagang kaki lima ini kita terpacu kepada Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) dek yang intinya itu berisi larangan untuk berdagang di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyebrangan dan tempat umum lainnya. Dengan terpacunya Perda tadi diharapkan dapat merubah perilaku pedagang kaki lima supaya ngga berdagang lagi di tempat umum dan bisa bertahan di lokasi barunya.

3. P: Kapan program pembinaan pedagang kaki lima mulai dijalankan?

A: Pembinaannya itu dilakukan semenjak Pemerintahan Jokowi dulu, sekitar dua tahun yang lalu deh. Yaa.. tahun 2013an dek. Pokoknya pas Gubernurnya Jokowi dulu, mulai digerakin tuh programnya dengan cara penertiban dan pembinaan. Tapi sekarang kan udah diganti sama Ahok, masih tetep dijalankan dek programnya sampe sekarang. Dan untuk sekarang ini tinggal pengawasannya aja yang dijalankan tapi tetep setiap hari selama 1x24 jam dek.

4. P: Apa tujuan dibentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?

A: Kalo tujuannya itu udah pasti supaya Pasar Minggu menjadi lancar, ngga macet lagi dek. Terus juga agar fungsi atau peruntukkan trotoar dan jalan serta fungsi Pasar bisa sesuai peruntukan atau fungsinya. Kemudian, menjadikan wilayah Kecamatan Pasar Minggu menjadi tempat yang bersih, indah, nyaman dan aman.

5. P: Berapa banyak pedagang yang menjadi sasaran dari program pembinaan pedagang kaki lima?

Pedagang kaki lima mah banyak dek, sekitar 3000 orang deh. Itu kan pedagang banyak bener dek, dari balai sampe gang mawar aja udah ada yang berjejer pedagang buah tapi ngga banyak. Terus juga dari beacukai sampe Robinson itu lebih banyak dek, apalagi kalo menjelang sore ke malem itu pedagangnya lebih banyak dek dan pedagangnya itu macem-macem mulai dari pedagang pakaian, pedagang sepatu, pedagang makanan, masih banyak lagi dek. Pedagang kaki limanya itu menuhin jalannya sampe satu jalur jalan. Dari malem menjelang pagi juga rame lagi sama pedagang sayuran. Itu tiap hari selalu dipenuhi pedagang kaki lima dek, makanya Pasar Minggu selalu rame, yaa ramenya itu rame sama pedagang kaki lima.

BAGIAN KEDUA: PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

6. P: Apa saja agenda dari program pembinaan pedagang kaki lima?

A: Agenda yang kita laksanakan itu banyak ya dek. *Pertama*, kita beri penyuluhan dan sosialisasi tentang Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) tentang ketertiban umum. *Kedua*, sosialisasi fungsi fasilitas umum seperti trotoar dan jalan, serta tempat pengganti (relokasi) berdagang di Pasar Minggu (sesuai fungsinya). *Ketiga*, pemberitahuan atau surat peringatan satu kepada para pedagang agar tidak berjualan atau membongkar atau memindahkan dagangannya dalam waktu 7x24 jam semenjak surat peringatan satu dikeluarkan. *Keempat*, pemberitahuan atau surat peringatan dua (SP2) dalam waktu 3x24 jam. *Kelima*, pemberitahuan atau surat perintah bongkar (SPB) dalam waktu 1x24 jam. *Keenam*, bila SPB (Surat Perintah Bongkar) dalam waktu 1x24 jam tidak dipindahkan, maka aparat Pemda melalui Satpol PP dan dibantu pihak POLRI, TNI dan Dishub akan melaksanakan pembongkaran secara paksa tempat usaha atau bangunan yang tidak sesuai aturan atau fungsi lahan. Saat penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima, Satpol PP melakukan eksekusi yang di *back-up* oleh Polisi, TNI dan Dishub bila terjadi perlawanan oleh para pedagang yang mengancam keselamatan Satpol PP atau tindakan anarkis lainnya. *Terakhir*, melakukan pengawasan atau penjagaan pasca SPB (Surat Perintah Bongkar), agar para pedagang tidak berusaha kembali ke trotoar dan jalan. Tapi di Lokbin

pun juga diberi penyuluhan dek berupa cara berdagang dan memberi pelayanan yang baik terhadap pembeli

7. P: Siapa saja yang terlibat dalam program pembinaan pedagang kaki lima?

A: Yang ikut terlibat itu mulai dari Gubernur, Walikota Jakarta Selatan, Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu, PD Pasar Jaya, Pihak Lokasi Binaan, Sudin (Suku Dinas Terkait seperti Satpol PP, TNI, POLRI dan Dishub). Tapi saat dilaksanakannya penertiban dan pembinaan hanya aparatur aja seperti Satpol PP, TNI, POLRI, dan Dishub. Tapi TNI, POLRI dan Dishub hanya memback-up dari belakang aja kalo terjadi perlawanan dari pedagangnya itu. Setelah para pedagang dibina dan dipindahkan ke Lokasi Binaan, yang bertugas ngebina para pedagangnya itu yaa pihak Lokasi Binaannya dek.

8. P: Bagaimana alur koordinasi dalam pelaksanaan program pembinaan pedagang kaki lima?

A: Awal mulanya itu kan karna melihat Pasar Minggu yang selalu macet terus. Ditambah lagi pedagang yang setiap hari semakin banyak sampe ke badan jalan. Nah dari situ dicarilah solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi di Pasar Minggu dengan cara beberapa tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan dan terakhir pengawasan. Perencanaan sebelum dilaksanakannya pembinaan dan penertiban ini dengan melakukan pendataan dulu dek berapa banyak pedagang kaki limanya. Nah abis itu baru cari lokasi yang sesuai dengan jumlah pedagangnya, yang pasti harus luas, strategis dan sudah diizinkan sama Pemerintah. Akhirnya didapatkan lahan yang berada di belakang dekat Terminal Pasar Minggu yang diberi nama Lokasi Binaan yang dapat menampung seluruh para pedagang di jalan atau trotoar. Kemudian, dimusyawarahkan lagi berapa banyak aparat yang harus turun ke lapangan dan bagaimana pembagian jadwal pelaksanaannya dek, terus dimusyawarahkan juga bagaimana pembinaan yang harus dilakukan agar di pedagang itu bisa bertahan di lokasi barunya dan tidak kembali lagi ke trotoar atau jalan. Kalo rencananya sudah selesai baru aparat yang terkait tadi melakukan apel dulu sebelum turun ke lapangan. Selesai apel baru melaksanakan penertiban dan pembinaan. Nah itu kan berlangsung selama setahun lebih dan udah bikin jalanan jadi tertib. Tapi pengawasan tetep dijalankan tapi aparatnya dikurengin, yang tadinya Satpol PP sebanyak 150 orang dikurengin jadi 50 orang dan jaganya itu di pos penjagaan di samping PD Pasar. Terus juga dari anggota POLRI juga dikurangi yang tadinya sebanyak 10 sampe 20 orang sekarang dikurengin jadi 5 orang dan penjagaannya di pos kepolisian samping Robinson dek. Pengawasannya itu dilaksanakan 1x24 jam setiap hari oleh Satpol PP Kecamatan dan Kelurahan se-Jakarta Selatan. Terus juga dibuat piket pengawasan oleh Kasudin Pol.PP wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan dan Kelurahan digilir untuk piket pengawasan. Berkoordinasi juga dengan Polsek dan Pospol Pasar Minggu. Dilakukan pengawasan supaya pedagangnya itu ngga berani untuk balik ke jalan atau trotoar lagi dek.

9. P: Bagaimana peranan bapak Camat Pasar Minggu dalam melaksanakan program pembinaan pedagang kaki lima?

A: Peran Camat di sini untuk memberitahu dan mengarahkan peraturan yang turun dari atasan yaitu pertama turun dari Gubernur ke WaliKota terus ke Camat. Dari Camat turun lagi ke Lurah baru ke Kasatgas Satpol PP di wilayah Pasar Minggu. Nah di sini juga Camat ikut berkontribusi untuk memantau apakah pedagangnya masih ada di trotoar dan jalan atau sudah

tertib di lokasi barunya. Tapi pemantauan yang dilakukan tidak setiap hari seperti Satpol PP, hanya seminggu sekali saja.

10. P: Apa saja materi yang disosialisasikan melalui program pembinaan pedagang kaki lima?

A: Materi yang kami sampaikan itu ada tiga yang dilaksanakan oleh gabungan aparaturnya yang terdiri atas Satpol PP, TNI, POLRI dan Dinas Perhubungan (Dishub). Materi *pertama* memberi penyuluhan dan pengarahan mengenai Peraturan Daerah yang berisi mengenai ketertiban umum agar para pedagang bisa paham dan ngerti bahwa berdagang yang benar itu di lokasi yang sudah diizinkan oleh Pemerintah. *Materi kedua*, kami memberi penyuluhan dan pengarahan mengenai fungsi sarana dan prasarana umum agar para pedagang bisa paham dan ngerti mengenai kegunaan dari fungsi fasilitas, sarana, dan prasarana umum yang sudah disediakan oleh Pemerintah. *Materi ketiga*, kami mensosialisasikan lokasi binaan atau relokasi tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah untuk pedagang kaki lima agar tidak balik lagi ke trotoar atau jalan. Di Lokasi Binaan pun juga diberikan materi oleh pihak Lokbin terdiri atas Ketua atau Korlap, Sekretaris, dan Bendahara. Materinya itu berupa penyuluhan mengenai cara berdagang yang baik itu seperti memberikan pelayanan yang baik terhadap pembelinya.

11. P: Apakah terdapat kesulitan dalam mensosialisasikan program pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu?

A: Kalo soal sulit apa tidak, udah pasti ada kesulitannya dek. Soalnya rata-rata pedagang yang susah dibinanya itu alesannya "PERUT". Sehingga sulit untuk mau diajak pindah ke dalam Pasar atau Lokbin walaupun mereka mengerti telah melanggar Perda No. 8 Tahun 2007. Soalnya menurut mereka kalo dagang di pinggir jalan itu jauh lebih laku daripada di dalam Pasar atau Lokbin dek. Terus juga kalo di pinggir jalan itu kan ngga perlu biaya untuk bayar sewa, palingan cuma bayar ke preman. Nah kalo dagang di Lokbin dan Pasar tiap bulannya harus bayar sewa, itu yang bikin pedagang pun sulit juga untuk dibina dan dipindahinnya Tapi seiring berjalannya waktu dan kita setiap harinya terus melakukan penertiban dan pembinaan, lama-kelamaan para pedagang pun paham, ngerti dan mau bertahan di Lokbin atau PD Pasar. Untuk sekarang pun kita tetep ada pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya dengan menyediakan pos-pos penjagaan. Pos penjagaan untuk Satpol PP di samping Pasar, pos penjagaan Polisi di samping Robinson dan pos penjagaan Dishub di sebrang stasiun Pasar Minggu.

12. P: Adakah dampak setelah adanya program pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu?

A: Dampaknya itu banyak dan udah pasti jadi lebih baik yaa dek. Jauh lebih tertib, bersih, indah dan aman. *Pertama*, yang jelas para pedagang sudah berada atau berdagang di Lokasi Binaan Pasar Minggu. *Kedua*, Jalanan jadi lancar, tidak semberawut, dan macet lagi. *Ketiga*, keamanan para pejalan kaki yang melewati Jalan Raya Ragunan pun terjamin, keamanan bagi pengendara juga terjamin khususnya motor yang lewat Pasar Minggu karna kalo kondisi yang macet dengan banyaknya pedagang kaki lima menyebabkan emosinya pun tidak terkontrol yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara, dan bagi para pedagangnya pun keamanannya juga lebih terjamin dek. *Keempat*, kebersihan Pasar dan lingkungannya lebih

mudah dilaksanakan dan teratasi. *Terakhir*, keindahan dan kenyamanan Pasar Minggu jauh lebih baik dipandanginya dan dinikmati oleh masyarakat. Wilayah Kecamatan Pasar Minggu menjadi bagus, nyaman dan aman. Utamanya adalah semua lahan atau sarana dan prasana digunakan sesuai dengan peruntukannya (trotoar, jalan, taman, halte, dan lain-lain sesuai dengan fungsinya).

Lampiran I

Transkrip Wawancara Dengan Lurah Pasar Minggu

Profil Informan II (dengan panduan wawancara)

Nama : Suhanto. MA.P (diwakili oleh Upiek Mardhawathy)
Jabatan : Staff Bagian Kasi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Tanggal Wawancara : 26 Februari 2015

BAGIAN PERTAMA: SEJARAH PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. P: Bagaimana latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?

U: Lihat kondisi Pasar Minggu aja dulu mba, jalanan penuh sama pedagang kaki lima semua. Dari depan Beacukai sini nih sampe depan Robinson sana. Terus juga dari depan Robinson sampe lampu merah yang mau ke Kalibata sana mba. Terus juga ada lagi tuh yang dari depan stasiun Pasar Minggu sampe palang kereta api. Itu semua pedagang kaki lima yang madatin semuanya. Tapi yang parah sih yang di depan sini depan Beacukai itu dari pagi sampe ketemu pagi lagi di ramein sama pedagang kaki lima. Mba tinggal di daerah sini juga kan, udah pasti tau dong kondisi Pasar Minggu dulu kaya apa. Kalo pagi sekitar jam 10an itu penuh sama pedagang buah, terus dilanjut lagi sore jam setengah 4 aja pedagang kaki lima udah mulai gelar lapaknya udah mulai ngeluarin gerobaknya entar jam 4an aja udah penuh sama pedagang sampe ke badan jalannya mba sampe jam 11 malem tuh pedagang pakaiannya. Terus nanti dilanjutin lagi jam 12an lah yak kan udah ngga ada pedagang pakaian lagi tapi diganti sama pedagang sayuran. Nah itu berlangsungnya sampe pagi mba, jam 6an itu udah mulai diusir-usirin sama Satpol PP sampe bener-bener udah ngga ada pedagang kaki lima lagi. Jam 7annya itu baru mulai di bersihin sama petugas kebersihannya mba. Itu perdagangan di pinggir jalan berlangsungnya setiap hari mba, makanya bikin jalanan macet, bikin jalanan jadi kumuh+bau, bikin pengguna jalannya pun jadi emosi yang akhirnya bisa menimbulkan keributan kan. Nah dari kejadian seperti itu makanya pimpinan yang diatas yang waktu itu si Jokowi jadi Gubernur pun mencari solusinya. Nah makanya dibuatlah penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima agar para pedagangnya pun ngga berdagang lagi di pinggir jalan.

2. P: Terdapat dimanakah peraturan tentang pembinaan pedagang kaki lima?(Perda Nomer.....)

U: Kalo peraturannya itu ada di Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 mba tentang ketertiban umum. Lebih fokusnya sih di Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) yang isinya larangan berdagang di tempat umum seperti halte, trotoar, jembatan penyebrangan, jalan raya dan banyak lagi mba. Melalui Perda inilah yang mungkin bisa merubah para pedagang kaki lima menjadi lebih tertib lagi mba. Makanya ini juga membutuhkan banyak aparat dalam membantu ngebina pedagang di Pasar Minggu, soalnya pedagang disini juga ngga sedikit jumlahnya mba.

3. P: Kapan program pembinaan pedagang kaki lima mulai dijalankan?

U: Pembinaannya itu udah berjalan dua tahun yang lalu mba, semenjak Pemerintahan Jokowi langsung bener-bener ditertibkan. Yaaa kalo sekarang 2015 berarti dua tahun yang lalu itu tahun 2013 mba. Yang sekitar tahun segitu baru bener-bener dilaksanain penertiban sama pembinaannya sampe sekarang ini. Tapi kalo untuk sekarang-sekarang ini sih cuma pemantauan aja, aparat yang berjaga untuk memantau pun juga dikurangin ngga kaya waktu tahun 2013 kemaren nurunin aparat sampe ratusan orang.

4. P: Apa tujuan dibentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?

U: Kalo ditanya tujuannya apa, yang pasti supaya jalanannya ngga macet lagi sih mba. Soalnya Pasar Minggu itu kan terkenal banget macetnya yang kadang bikin orang males lewat Pasar Minggu, bener-bener ngga bisa gerak sama sekali mba. Apalagi pas sore mau menjelang malem pas banget jam-jam orang baru pulang kerja, itu kan banyak kendaraan yang lewat kan ditambah lagi pedagang kaki lima yang numpuk di jalanan sampe satu jalur penuh mba, yaudah makin ngga bisa gerak. Terus juga tujuannya itu supaya pedagang kaki limanya bisa tertata rapi di lokasi barunya yang di belakang deket Terminal. Orang-orang sih bilangannya tempat penampungan tapi dinamaninnya Lokasi Binaan mba. Kan kalo tertata rapi jadi keliatan indah dan pembeli pun juga merasa nyaman.

5. : Berapa banyak pedagang yang menjadi sasaran dari program pembinaan pedagang kaki lima?

U: Pedagang yang di pinggir Jalan Raya Ragunan ini yaa sekitar ribuan deh mba. Kalo ngga salah sih ada 3000 orang pedagang. Soalnya emang banyak banget pedagang kaki lima di Pasar Minggu mba. Yang dari Balai Rakyat sampe depan Robinson aja udah banyak, terus yang jalan mau kearah Terminal juga banyak, terus yang dari depan Robinson sampe lampu merah, dan terakhir itu dari depan stasiun sampe palang kereta api, itu bener-bener banyak sekali yang mengganggu ketertiban lalu lintas daaan meresahkan masyarakat sekitar. Tapi dari pembinaan dan penertiban ini ngga semua pedagang yang pindah ke Pasar atau Lokbin. Karenaa sebagian besar pedagang pada pulang kampung mba.

BAGIAN KEDUA: PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

6. P: Apa saja agenda dari program pembinaan pedagang kaki lima?

U: Dalam penertiban dan pembinaan ini, kami bagi antara shiff siang dan shiff malam. *Pertama*, shiff siangnya itu ada 75 Satpol PP, 10 TNI, 10 POLRI, 10 Dishub dan shiff

malamnya itu juga sama kaya 75 Satpol PP, 10 TNI, 10 POLRI, 10 Dishub. Kalo siang harinya itu kami menertibkan dengan pengusiran pedagang kaki lima di trotoar dan jalan. Nah baru abis itu kami ngebina para pedagangnya itu dengan mengarahkan dan memberi penyuluhan secara persuasif mengenai Perda No. 8 Tahun 2007 mengenai ketertiban umum yang menyatakan larangan untuk berdagang di trotoar atau jalanan. Kami juga memberi penyuluhan tentang fungsi fasilitas umum, contohnya itu fungsi trotoar harusnya buat pejalan kaki malah buat dagang, fungsi jalan raya harusnya buat perlintasan kendaraan malah buat dagang, yaa.. pokoknya banyak lagi deh mba. Nah kalo dengan penyuluhan masih tetap nakal, aparat yang terkait tadi pun bertindak lebih tegas lagi dengan mengangkut dagangannya ke Kantor Kecamatan Pasar Minggu.

7. P: Bagaimana alur koordinasi dalam pelaksanaan program pembinaan pedagang kaki lima?

U: Segala sesuatu hal pastinya harus dengan rencana kan mba, yaa begitu pun dengan pembinaan dan penertiban ini. Bermula dengan membuat perencanaan terlebih dahulu dengan cara bermusyawarah dengan Gubernur, Walikota, Camat, Lurah, Ketua PD Pasar, Korlap Lokbin, dan aparaturnya. Kami bersama-sama kumpul untuk membicarakan masalah yang terjadi di Pasar Minggu sekaligus mencari solusi untuk mengatasinya. Kita pun abis itu mendata nih berapa banyak pedagang yang mau dipindahkan. Kemudian kami pun mencari lahan yang cocok untuk tempat penampungan para pedagang kaki lima yang sekiranya sesuai dan mendapatkan izin dari Pemerintah. Nah kalo udah cocok lahannya baru kita lakukan pembangunan yang lokasinya tersebut di dekat Terminal diberi nama Lokasi Binaan. Kemudian, kami juga membagi jadwal pembinaan, penertiban dan pengawasan untuk para aparat seperti Satpol PP, TNI, POLRI dan Dishub. Kalo semua rencananya udah beres baru kita turun ke lapangan, tapi sebelumnya kami apel dulu bersama semua pihak yang terkait tadi. Terus baru turun ke lapangan tapi TNI, POLRI dan Dishub tadi cuma memback-up aja kalo tiba-tiba terjadi perlawanan atau kerusuhan dari para pedagangnya. Kalo pelaksanaan sudah berhasil pun tetep ada pengawasan dari aparatnya mba, supaya para pedagangnya itu tidak balik lagi ke trotoar atau jalanan.

8. P: Apa saja materi yang disosialisasikan melalui program pembinaan pedagang kaki lima?

U: Materi yang kami sampaikan ini dengan memberi penyuluhan secara persuasif dulu mba kepada mereka bahwa tidak diperbolehkan berdagang di trotoar maupun pinggir jalan karna larangan tersebut tertera jelas di Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2). Kami juga memberi penyuluhan secara persuasif mengenai fungsi fasilitas umum yang seharusnya bisa digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kami juga mensosialisasikan mengenai lokasi baru yang sudah disediakan oleh Pemerintah yang berada di belakang Terminal yaitu Lokasi Binaan. Para pedagang yang ada di Lokbin pun juga diberi penyuluhan lagi mba tapi yang melakukan penyuluhan ini bukan aparat tapi pihak yang ada di Lokbin, penyuluhannya tersebut berupa bagaimana sih cara berdagang yang baik.

9. P: Apakah terdapat kesulitan dalam mensosialisasikan program pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu?

U: Dalam setiap perubahan dari yang buruk kearah yang lebih baik lagi pastinya melewati rintangan dan hambatan dong mba. Begitupun dalam pembinaan ini, pada saat pembinaan pasti masih ada pedagang yang bandel lah yang ngga mau dibina dan dipindahkan jugalah itu biasanya karna ada propokator dari belakang mba. Malah pernah, pedagang pada ke dalam penampungan kalo ada petugas yang jaga tapi sebaliknya kalo ngga ada petugas yang jaga, pedagang pada keluar ke jalanan dan trotoar. Yaa paling cuma itu aja sih, tapi berjalannya waktu pedagang juga ngerti dan paham kalo berdagang di trotoar atau pinggir jalanan itu melanggar norma. Karna penertiban dan pembinaan yang kami lakuuin ini setiap hari sampe sekarang. Tapi untuk saat ini kami hanya sekedar pemantauan dan pengawasan aja.

10. P: Adakah dampak setelah adanya program pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Minggu?

U: Kalo masalah dampak sih ada dua kan, dampak positif sama negatif. Dampak positifnya itu yang jelas jalanan jadi lancar dan ngga macet lagi, kan kalo dulu parah banget macetnya, bener-bener sampe ngga bisa gerak sama sekali. Terus juga jalanan yang biasanya penuh sama sampah karna pedagang kaki lima sekarang jalanan jadi bersih, enak dipandangannya mba, pedagang yang dipindahkan di Lokbin juga tertata rapi dengan lokasi tempat dagang sesuai dengan jenis dagangannya. Tapiiii disini juga ngga menutup kemungkinan tidak terjadi dampak negatif, justru dampak negatifnya itu dirasakan masyarakat sama para pedagangnya. Kalo dari masyarakatnya jadi sulit nyari kebutuhan pokok atau lainnya karna dulunya gampang sekali sekarang kalo mau beli kebutuhan atau apapun harus jalan dulu ke PD Pasar atau Lokbin dan yang bawa motor harus parkir dulu. Nah kalo dari pedagangnya sudah keliatan jelas yaa, dengan dipindahkannya mereka ke lokasi baru aja sangat berpengaruh terhadap keuntungan dan pelanggan yang didapat. Kalo dulu mungkin gampang dapet pelanggannya, keuntungan yang didapat juga lumayan tapi sekarang jadi sulit dapet pelanggan, untung yang di dapet juga ngga sebanyak dulu karna harus bayar sewa kios tiap bulannya kalo dulu kan di jalanan jadi gratis paling dimintain uang sama preman doang.

Lampiran II

Transkrip Wawancara Dengan Aparatur

Profil Informan I (dengan panduan wawancara)

Nama : Muhidin (40 Tahun)
Jabatan : Kasatgas Satpol PP di Kelurahan Pasar Minggu
Tanggal Wawancara : 11 Februari 2015

BAGIAN PERTAMA : SEJARAH PROGRAM PEMBINAAN

1. P : Bagaimana latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima ?

M : Pasar Minggu itu dulunya semberawut mba. Pedagang itu ada di jalan selama 24 jam. Setiap harinya pedagang itu ada 3 tipe mba. Pertama, pedagang sayuran itu dari jam 10 malam sampe jam 8 pagi kadang pernah sampe jam 10 siang. Di lanjutkan lagi pedagang kedua yang isi oleh pedagang buah itu dari 8 pagi sampe jam 10 malem. Kemudian dilanjutkan lagi pedagang ketiga yang isi oleh pedagang pakaian itu dari jam 4 sore sampe jam 10 malem. Itu dilakukan setiap harinya bergilir tidak pernah bada kosongnya menempati Jalan Raya Ragunan dan Jalan Raya Pasar Minggu. Dampaknya banyak sekali mba. Pertama, jalanan menjadi macet sekali yaa karena jalan yang digunakan kendaraan cuma satu jalur aja, yang satu jalurnya lagi digunakan full untuk pedagang Kedua, jalanan jadi kumuh karna banyak sampah yang berserakan akibat pedagang kaki lima itu. Ketiga, jalanan jadi bau walaupun ada petugas sampah yang tiap harinya bersih-bersih. Yaa pokoknya mengganggu ketertiban umum deh mba. Makanya semenjak pemerintahannya Pak Jokowi jadi berubah total kan. Dibentuklah program pembinaan ini dengan tujuan untuk ngebina dan memberikan penyuluhan kepada pedagang-pedagang agar menempati lokasi yang sesuai dengan peraturan. Karena pedagang yang jualan di pinggir jalan ataupun di trotoar itu telah melanggar perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) yang berisikan setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. P : Siapa yang menjadi pelopor terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?

M : Pelopornya itu pertama dari Gubernurnya yang melihat Pasar Minggu yang semakin hari semakin tidak teratur dan semberawut. Kemudian dikoordinasikan oleh Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu, Ketua Pasar, Ketua Lokbin, Satpol PP, TNI, POLRI, dan Ormas (Organisasi Masyarakat). Nah yang melaksanakan program ini yaa kami sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dengan aparaturnya lainnya seperti TNI, POLRI dan Dishub. Tindakan kita dulu sesuai dengan SOP (Standar Operasional) yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Tepatnya yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (2) mba.

3. P : Kapan program pembinaan pedagang kaki lima terbentuk?

M : Ini pembinaan udah hampir dua tahun mba, yaa sekitar tahun 2013. Lebih tepatnya tanggal dan bulan berapanya saya lupa, pokoknya tahun 2013 pada saat pemerintahan Pak Jokowi.

4. P : Apa tujuan dibentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?

M : Tujuan dari program pembinaan ini yaa agar Pasar Minggu bisa jadi lebih baik lagi kondisinya. Biar jalanan menjadi lancar, ngga macet lagi, ngga semberawut lagi, ngga kumuh lagi, Intinya sih agar Pasar Minggu menjadi tertata rapi an tertib.

5. P : Berapa banyak pedagang yang menjadi sasaran dari program pembinaan?

M : pedagang kaki lima pada saat itu jumlahnya sekitar 3000 orang. Karena kan dari depan Beacuai sampai Robinson terus juga di pinggir stasiun juga banyak pedagang kaki limanya dan yang mau kearah Terminal sampe kearah lampu merah juga masih banyak pedagang kaki lima.

BAGIAN KEDUA : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN

6. P : Berapa banyak petugas satpol pp yang diturunkan untuk membina pedagang kaki lima di Pasar Minggu?

M : Satpol PP pada saat itu hampir 150 orang yang diambil dan dibantu dari Satpol PP setingkat kota dan se-Kecamatan Pasar Minggu. Dibantu juga oleh aparaturnya lainnya seperti 10 orang dari anggota POLRI, 10 orang dari anggota TNI dan 10 orang lagi dari anggota Dinas Perhubungan (Dishub). Tapi dari TNI, POLRI dan Dishub hanya mem-*backup* dari belakang saja mba jika terjadi kerisuhan atau ada perlawanan dari pedagang tersebut. Kemudian dari Ormas (Organisasi Masyarakat) juga ikut membantu kita untuk ngebina pedagang kaki lima. Ketua Lokbin dan Ketua PD Pasar Jaya itu termasuk ormas juga mba.

7. P : Bagaimana pembagian tugas untuk para petugas satpol pp dalam upaya menjaga jalan raya agar tidak ada pedagang kaki lima lagi yang berdagang di pinggir jalan?

M : Untuk pembagian tugasnya itu, Satpol PP yang jumlahnya 150 dibagi menjadi 2 shift yaitu shift siang dan shift malam. Shift siang dan shift malam terbagi menjadi shift siang sebanyak 75, ditambah dengan 10 anggota TNI, 10 anggota POLRI dan 10 anggota Dishub. Shift malam juga seperti itu mba sebanyak 75 Satpol PP, ditambah dengan 10 anggota TNI, 10 anggota POLRI dan 10 anggota Dishub. Tapi sekarang sedikit berkurang petugasnya karena melihat Pasar Minggu yang sudah terbilang tertib dan tertata karena program ini sudah berhasil dilaksanakan dengan baik. Jumlah petugas untuk sekarang ini hanya sekitar 50 orang Satpol PP.

8. P : Berapa lama (waktunya) petugas satpol pp dalam melakukan penjagaan di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu?

M : Kalo dulu itu kita jaga setiap hari selama 1x24 jam mba. Kita mulai jaganya itu dari jam 5 pagi sampe jam setengah 8 malam (pukul 05.00—19.30WIB) dan dilanjutkan lagi dari jam setengah 8 sampe jam 5 pagi (pukul 19.30—05.00WIB). Jadwal itu dilakukan secara terus menerus sampe Jalan Raya Ragunan ini bener-bener bersih dari pedagang kaki lima mba. Setelah program ini berhasil pun masih tetap dilakukan penjagaan dan pengawasan tapi petugas dari Satpol PPnya sedikit dikurangi. Hal ini dilakukan agar pedagang kaki lima ngga kembali lagi berdagang di trotoar maupun di pinggir jalan mba yang mengganggu ketertiban umum.

9. P : Siapa saja yang terlibat dalam program pembinaan pedagang kaki lima?

M : Yang terlibat dalam program ini tuh banyak mba, mulai dari Gubernur, Walikota, dan Lembaga Masyarakat yang terdiri atas Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu, Ketua Pasar, Ketua Lokasi Binaan, Kasatgas Satpol PP di Kecamatan Pasar Minggu, Kasatgas Satpol PP di Kelurahan Pasar Minggu, TNI, POLRI, Dishub dan warga sekitar.

10. P : Apakah pada saat pembinaan dilaksanakan, bapak ikut turun ke lapangan?atau sekedar memerintahkan saja ke anggota?

M : yaa saya ikut turun ke lapangan lah mba. Saya ikut ngebina pedagangnya dan memberi penyuluhan juga ke pedagang. Dan saya juga ikut memantau anggota saya yang sedang bertugas.

11. P : Apa saja agenda dari program pembinaan pedagang kaki lima?

M : agendanya itu pertama kita buat perencanaannya terlebih dahulu, perencanaannya itu berupa melakukan pendataan dahulu berapa banyak pedagang yang mau dipindahkan kemudian dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan Walikota, Camat, Lurah, Satpol PP, TNI, POLRI, Dishub, dan Ormas untuk mencari penempatan yang sesuai dengan jumlah pedagangnya itu mba. Setelah didapat lokasinya tersebut di Lokbin dan PD Pasar Jaya maka dirundingkan kembali langkah apa saja yang harus dilakukan untuk pelaksanaan pembinaan tersebut. Kalo pada saat pembinaan ada pedagang yang nekat untuk berdagang di trotoar dan pinggir jalan atau tidak mau masuk ke tempat penampungan maka akan dikenakan sanksi penindakan atau penilangan. Sanksinya tersebut berupa tipiring atau sidang ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian terdapat juga rundingan untuk pengawasannya. Mengapa pengawasannya juga ikut dilaksanakan?karenaa... dengan adanya pengawasan tersebut pedagang kemungkinan kecil pedagang akan kembali ke trotoar atau pinggir jalan mba.

12. P : Apa saja materi yang disosialisasikan melalui program pembinaan pedagang kaki lima?

M : Pembinaan yang kita lakukan itu berupa sosialisasi persuasif secara perlahan-lahan mba. Misalnya begini: “Bu, tolong sekarang berdagangnya di tempat penampungan seperti Lokbin dan PD Pasar Jaya Blok B”. Kalo sosialisasi yang dilakukan ini nggak berhasil dan masih ada pedagang yang bandel untuk tetap berdagang di pinggir jalan maka penyuluhan kita selanjutnya dengan sosialisasi preventif mba. Sosialisasi preventif itu jika dengan omongan tidak ada perubahan maka KTP-nya diminta. Kalo tidak punya KTP atau tidak membawa

KTP , maka gerobaknya yang jadi jaminannya dan langsung kita angkut gerobaknya mba. Kalo tidak ada perubahan juga dan masih berdagang di trotoar maupun di pinggir jalan maka gerobaknya langsung diangkut ke mobil Satpol PP kemudian dibawa ke Kantor Kecamatan Pasar Minggu.

13. P : Apakah ada kesulitan saat melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima?

M : Kalo pada saat bertugas seperti ngebina itu kadang mengalami kesulitan juga mba. Kesulitannya itu berupa ada beberapa pedagang yang sulit untuk dibinanya mba. Yang susah untuk pindah ke Lokbin atau PD Pasar Jaya, alesannya tempat penampungannya terlalu jauhlah terlalu ke dalamlah dan bikin dagangan mereka nggak laku mba. Ada beberapa faktor juga yang bikin pedagang susah untuk diaturnya itu karena adanya propokator dari oknumnya seperti preman di pasar. Tapi masih bisa kita *handle* karena aparat yang tergabung disini kan banyak. Selain dari Satpol PP, ada juga TNI, POLRI dan Dishub yang ikut membantu kalo misalkan ada kejadian keributan atau perlawanan dari pedagang tersebut mba.

14. P : Apakah sosialisasi program pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilakukan mampu merubah kondisi Pasar Minggu?

M : iyalah mba, banyak hal-hal yang berubah. Kalo dulu mba, kita baru masuk ke Pasar Minggu, pedagang baru nggak ada yang istilahnya "*oh kamu nggak boleh masuk, nggak boleh ini, nggak boleh itu*", masuk-masuk aja yaa namanya jalan kan, bebas mau dagang dimana aja. Nah sekarang dengan adanya penampungan (Lokasi Binaan) seperti ini, pedagang pun terorganisir. Pedagang siang yaa siang, pedagang malam yaa malam. Yaa tinggal saya yang menjaga dan memantau pedagang yang masih badung-badung. Dan menjaga pedagang-pedagang yang muka baru kalo mereka masuk ke jalan untuk berdagang kemudian kita larang, kita pasti tau ini pedagang lama atau pedagang baru. Karna kita kan tiap hari muter terus mba, penjagaan itu bukan duduk, liatin mobil atau liatin apa gitu, enggak begitu mba. Namanya penjagaan kita ngejagain, liat ada perkembangan apa yang terjadi disitu. Kalo memang ada perkembangan nih kaya gini : ada pedagang dipinggir jalan langsung kita tegor "bapak, kenapa berdagang disini?". Nah pedagang pasti jawabnya begini: "kan saya jualan pak, modal.. modal saya". Kan gitu kan pedagangnya. Nah kita nasehatin gini: "pak, di sini nggak boleh, bapak silahkan berjualan di tempat lain atau bapak bisa masuk di PD Pasar Jaya atau ke tempat penampungan di Lokasi Binaan. Biasanya dia bilang : "oh nggak boleh pak?". nggak boleh. Begitu mba. Tapi kalo yang bandel mba, besok datang lagi mereka mba. Lah kan udah saya tegor, gitu kan. Kenapa sekarang ada lagi?kan bapak nggak boleh mencoreng. Ohh.. bapak nggak tau?sini saya jelasin. Bahwa tidak boleh berjualan di pinggir jalan dari mulai sini nih depan Beacukai sampai masuk pintu Terminal, Jalan Raya Pasar Minggu dan Raya Ragunan, masuk jalan buntu. Bapak tidak boleh, inget yaa tidak boleh. Besok kalo ketemu lagi dengan saya atau dengan petugas yang lain. Kalo bapak dagangannya diangkat atau KTP-nya disita jangan salahkan kami ya pak. Begitu mba. Tapi emang dasar masih ada pedagang yang bandel yaa mba, masih juga ada yang dagang, Percaya nggak mba? Masih juga dagang. Yang pada akhirnya kita berikan tindakan preventif itu. Ambil KTP-nya lalu kita pegang dagangannya, tuker dengan KTP. Silahkan jalan, besok hari jumat ambil dan ikut sidang di Pengadilan Negeri. Kalo dagang lagi, kita ambil lagi dagangannya lalu bawa ke Pengadilan Negeri ikut sidang lagi yang kedua kalinya. Apabila

mereka tidak mengambil KTPnya, maka siap-siap tidak bisa membikin KTP lagi. Karna KTP-nya itu blokir di data kependudukan lewat nomer NIK-nya itu mba.

15. P : Apa manfaat yang diperoleh setelah adanya program pembinaan pedagang kaki lima?

M : manpaatnya itu bisa mba rasakan sendiri kan. Pasar Minggu yang dulunya semberawut, kumuh, bau, pokoknya mengganggu ketertiban umum mba. Nah sekarang bisa terbilang sudah rapi yaa mba, pedagang juga sudah tertata rapi di Lokbin maupun di PD Pasar Jaya. Soalnya kami bertugas dari pagi sampai ketemu pagi lagi mba, 24 jam full. Biar pedagan-pedagangnya tersebut tidak balik lagi ke bahu jalan ini. Kenapa demikian?karna pedagang itu berani berdagang di pinggir jalan ketika tidak ada kami dan petugas kami lainnya yang berjaga.

Profil Informan II (dengan panduan wawancara)

Nama : Suryadi

Jabatan : Anggota Lapangan

Tanggal Wawancara : 2 Februari 2015

BAGIAN PERTAMA : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. P : Apa latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?

S : Kondisi Pasar Minggu dulu yang semberawut yang belum terbina dan kurang tertib karena keberadaan pedagang kaki lima yang begitu banyaknya mba. Dari banyaknya pedagang kaki lima tersebut yang menyebabkan banyak pihak yang dirugikan mba. Mulai dari kemacetan lalu lintas dan masyarakat yang ikut dirugikan dari jam kerja seperti waktu ke kantor lebih lama. Nah makanya semenjak Gubernurnya diganti, yaa otomatis kebijakannya pun juga diganti kan mba. Nah dibentuklah program tapi dirundingkan dulu nih sama lembaga masyarakat dan ormasnya. Mulai dari Gubernur, Walikota Camat, Lurah, Satpol PP, Ketua Pasar, Ketua Lokbin dan aparatnya. Dikumpulin terus diomongin tuh solusi biar Pasar Minggu ngga macet dan ngga numpuk pedagang kaki lima lagi. Nah, makanya dibentuklah aparat Satpol PP yang tergabung dengan Polisi, Dishub sama TNI untuk melakukan penertiban jalan dan ngebina para pedagangnya agar mau pindah ke Lokbin.

2. P : Kapan pelaksanaan pembinaan mulai dilaksanakan?

S : kita di sini udah hampir 2 tahun mba, yaa sekitar tahun 2013an mulai dilaksanain. Yaa pokoknya semenjak kepemimpinan Pak Jokowi lah mba. Walaupun sekarang udah di ganti Ahok yah, tapi masih tetep berjalan. Kan kita sekarang hanya pengawasan, sewaktu-waktu ada pedagang yang ke pinggir jalan. Nah kita langsung bergerak cepat untuk menegornya mba. Kalo ngga bisa dibilanginnya, yaa kita ambil tindakan dengan cara menyita atau mengambil dagangannya

3. P : Bagaimana agenda pelaksanaan pembinaan tersebut berlangsung?

S : ya mekanisme sebelumnya dibuat perencanaan dulu mba yang terdiri dari Bapak Gubernur yang dulu masih dipimpin oleh Jokowi, Walikota Jakarta Selatan, Camat Pasar Minggu, Lurah Pasar Minggu, Satpol PP, TNI/POLRI, dan Ormas. Nah perencanaannya itu apa aja sih yang dibutuhin. Misalkan mendata pedagangnya dulu baru mencari tempat penampungannya, nah baru abis itu kita dibagi jadwal penjagaannya mba. Siapa yang dapet shift siang, siapa yang dapet shift malam. Itu dibaginya sama rata mba. Kalo rencananya udah benar-bener fix baru kita turun ke lapangan untuk menertibkan dan ngebina pedagang kaki lima supaya segera pindah ke Lokbin atau pindah ke PD Pasar Jaya yang ada di blok B dan blok C. tapi kita disini juga dibantu sama beberapa aparat kaya misalkan TNI, POLRI dan Dishub yang hanya *menghandle* dari belakang aja mba kalo terjadi keributan atau perlawanan dari pedagangnya.

4. P : Berapa banyak pedagang yang menjadi sasaran dari program pembinaan?

S : pedagang kaki lima di Pasar Minggu mah banyak mba sekitar 1000 lebih lah. Kan pedagangnya itu mulai ada dari depan Ramayana sampe depan Robinson tuh. Terus yang mau kearah Terminal juga rame sama pedagang kaki lima, padahal kan banyak angkot yang otomatis lewat terminal dong nah gara-gara banyak pedagang kaki limanya, angkot jadi kesusahan buat masuk ke Terminal. Nah itu bikin macet sampe depan Ramayana.

5. P : Siapa saja yang ikut terlibat melakukan sosialisasi program pembinaan ke para pedagang?

S : yang terlibat itu banyak mba mulai dari Gubernur, Walikota, Camat, Lurah, Satpol PP, TNI, POLRI, Dishub, ketua Pasar, Ketua Lokbin. Tapi yang turun tangan pada saat penertiban dan pembinaan itu yaa kami petugas Satpol PP dengan dibantu TNI, POLRI dan Dishub. Namun, TNI, POLRI dan Dishub hanya sekedar membantu kami aja dan jumlahnya pun tidak sebanyak Satpol PP mba.

6. P : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan pedagang kaki lima?

S : ngebina pedagang kaki lima itu ngga mudah mba, harus perlahan-lahan. Waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih satu tahun, itu benar-bener jalanan baru bersih dari pedagang kaki lima. Karena dulu pernah di tertibkan juga sebelum adanya Perda No. 8 Tahun 2007 itu, penertibannya itu dulu belum seperti sekarang yang penertibannya ketat dan para pedagang juga dibina. Kalo dulu, pedagang kalo misalkan ngga ada petugas yang lagi jaga mba, pasti langsung keluar lagi ke trotoar atau pinggir jalanlah buat gelar dagangannya itu. Nah kalo sekarang kan benar-bener ketat yaa mba, waktu kita menertibkan dan ngebina aja selama 1x24 jam peregunya mba. Jadi kita ini dibagi per-shift, ada shift siang dan ada shift malam dengan jumlah aparatnya yang banyak juga. Tapi kalo untuk sekarang aparatnya dikurangnya soalnya kan cuma sekedar memantau dan mengawasi aja mba

7. P : Apa saja materi yang disosialisasikan melalui program pembinaan?

S : yang pertama itu yaa kita sosialisasikan dulu, kita beri pengarahan pelan-pelan dengan persuasif supaya pedagangnya itu tau bahwa ada larangan berdagang di trotoar dan pinggir jalan. Larangannya itu ada di Perda No. 8 Tahun 2007. Nah kita juga ngasih pengarahan agar para pedagangnya itu mau menempati tempat yang udah disediakan Pemerintah, yaa di Lokbin itu mba.

8. P : Adakah kesulitan dalam mensosialisasikan program pembinaan di PD Pasar Jaya dan Lokasi Binaan?

S: Kalo untuk sekarang mah ngga begitu sulit mba, paling Cuma satu atau dua orang yang masih suka nakal. Tapi tetep kita kasih pengarahan supaya ngga dagang lagi di pinggir jalan. Kalo dulu emang rada sulit mba, soalnya pedagang kaki limanya kan banyak, tapi aparat yang diturunkan juga banyak sih mba dan kita juga ngga cuma sekali atau dua kali aja ngasih pengarahannya tapi setiap hari ini supaya para pedagangnya bisa ngerti kalo berdagang di pinggir jalan itu melanggar peraturan dan sebaiknya pindah ke lokasi yang sudah di sediakan oleh Pemerintah yang di Lokbin ini mba. Dan untuk yang masih nekat berdagang di pinggir jalan, kita kasih tegoran, kasih peringatan juga. Kalo masih nekat baru kita ambil dagangannya.

9. P : Apakah sosialisasi program pembinaan yang telah dilakukan mampu mengurangi tingkat kemacetan di Pasar Minggu

S: Yaa... bisa mba liat sendiri kan. Pasar jadi keliatan tertib, jalanan juga lancar ngga macet lagi, jalanan juga jadi ngga penuh sama pedagang kaki lima lagi. Kan kalo dulu mba bisa tau sendiri, jalanan padet bener sama pedagang dari depan Ramayana aja udah berjejer pedagang kaki lima semua sampe depan Robinson sana. Terus yang belokasi mau ke Terminal ini juga berjejeran pedagang kaki lima semua kan tapi sekarang yaa semenjak Gubernurnya Pak Jokowi, pedagang kaki limanya mulai ditertibkan, dibina juga, kemudian dipindahkan di Lokbin sama di PD Pasar. Semuanya itu kan jadi keliatan rapi kan mba

Profil Informan III (dengan panduan wawancara)

Nama : Hadi

Jabatan : Dinas Perhubungan Golongan 3A

Tanggal Wawancara : 11 Februari 2015

BAGIAN PERTAMA: PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. P: Apa latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?

H: Awal mula adanya pembinaan itu karna Pasar Minggu itu dulunya ngga teratur, pedagang kaki lima numpuk di pinggir jalan raya sampai memenuhi ke badan jalan raya sampai satu jalur. Pedagangnya itu mulai dari depan Beacukai sampai depan Robinson, kemudian yang mau kearah terminal juga dipadati pedagang kaki lima. Nah itu berlangsung setiap hari

selama 24 jam dan membuat terganggunya kelancaran lalu lintas, jalanan menjadi macet. Seiring berjalannya waktu dan kepemimpinan jg diganti yang pada waktu itu Jokowi. Nah dirundingkanlah masalah kemacetan di Pasar Minggu. Bagaimana cari solusi yang tepat untuk merubah Pasar Minggu supaya ngga macet lagi. Dibentuklah pembinaan dengan menurunkan beberapa aparat yang tergabung untuk membina dan menertibkan pedagang kaki lima di pinggir jalan.

2. P: Bagaimana alur koordinasi dalam pelaksanaan program pembinaan ini?

H: Dalam pelaksanaan alur koordinasi pertama adalah perencanaan dalam program pembinaan. Dimana perencanaan ini dengan di data dulu jumlah pedagangnya berapa baru setelah itu mencari lokasi penampungan untuk pedagang kaki lima. Nah, abis itu baru pembagian jadwal penjagaannya yang udah diatur sebelumnya. Satpol PP berapa orang, POLISI berapa orang, TNI berapa orang, dan kami Dinas Perhubungan berapa orang. Kemudian dibagi untuk jaga siang berapa jumlahnya dan jaga malem berapa jumlahnya. Jadi biar semuanya itu sama rata jumlah penjagaannya. Kalo sudah semuanya diatur, baru turun ke lapangan untuk melaksanakan penertiban dan pembinaan. Kalo sekiranya udah ada perubahan, dalam arti pedagangnya sudah ngga ada yang berdagang di pinggir jalan lagi. Maka aparat yang terlibat ini dikurangi jumlahnya tetapi tetap bertugas untuk melakukan pengawasan agar si pedagang kaki lima ngga balik lagi ke jalan untuk berdagang

3. P: Apa saja agenda dari program pembinaan?

H: Agenda yang pertama itu kita ngebina si pedagang kaki limanya, meskipun proses pembinaan pedagang kaki lima itu sebenarnya cenderung tugas Satpol PP. Tapi, berhubung ini adanya di terminal secara tidak langsung saya harus turun Dinas Perhubungan. Karna dalam pembinaan ini kami hanya dibelakang Satpol PP saja karena posisi kita kan dari lalu lintas yaa, kalo ada gabungan antara Dinas Perhubungan, TNI dan POLRI kalo itu memang buat pedagang, kita *memback-up* lalu lintasnya. Kalopun terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Yaaa, mau ngga mau kita turun untuk melerainya. Pada saat pembinaan, kami mensosialisasikan mengenai peraturan yaitu Perda No. 8 Tahun 2007 yang menyatakan larangan untuk berdagang di trotoar, halte maupun pinggir jalan. Kedua, kami memberikan penyuluhan juga mengenai fungsi fasilitas umum agar pedagang kaki lima juga paham mengenai fasilitas umum yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Kami juga melakukan penyuluhan seperti ini setiap hari, karna pedagang kaki lima itu meyoritasnya berpendidikan rendah. Jadi, cara berbicara kita sama pedagang pun juga berbeda, kaya berbicara sama temen aja. Kita juga ngebinanya itu nggak langsung kita panggil terus kita terangin segala macem, tidak seperti itu. Tapi kita ngebinanya itu, kita turun setiap hari sambil ngobrol sama mereka, menanyakan apa yang mereka mau dan inginkan. Mereka juga banyak cerita kalo mereka suka dimintai uang sama preman yang mengatasnamakan petugas, sehari bisa sampai 50ribu buat pengeluaran ini itu, buat aparat ini itu. Lalu, saya kasih penjelasan ke mereka bahwa itu semua tidak ada. Dan kalopun pedagang mau protes atau mau lapor ke Polisi juga bisa tapi kebanyakan dari pedagang tidak ada yang lapor karena tidak berani.

4. P: Berapa banyak petugas Dishub yang diturunkan dalam program pembinaan ini?

H: Setiap hari kami tugas dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, plus sampai jam 8 malam, dilanjutkan lagi piket malam. Itu sebanyak 23 anggota Dinas Perhubungan. Nah kalau untuk membantu Satpol PP itu kira-kira diturunkan cuma 20 orang setiap harinya yang dibagi menjadi dua shift. Shift pertama 10 orang untuk siang hari, kemudian shift keduanya juga 10 orang untuk malam harinya.

5. P: Adakah kendala saat dilaksanakannya program pembinaan pedagang kaki lima?

H: Kendalanya sudah pasti ada, karena pembinaan pedagang yang jumlahnya banyak itu butuh kesabaran dan kerja keras supaya program dari pembinaan ini bisa berhasil sesuai yang diharapkan. Karena pada saat pedagang itu dibina pastinya masih ada beberapa orang sekitar 1-3 orang yang masih melawan untuk tetap berjualan di pinggir jalan. Seiring berjalannya waktu dan dengan dilakukannya pembinaan selama setiap hari. Para pedagang pun akhirnya jadi mengerti. Kendala yang lain yaitu rebutan pelanggan. Antara pedagang yang satu dengan pedagang lain saling berebutan pelanggan agar pelanggannya banyak. Setelah diketahui akar permasalahannya, kami pun mencari solusi dengan membuat surat pernyataan di atas materai. Jika hal ini terulang lagi, maka akan dikenakan sanksi yaitu tidak diperbolehkan berdagang selama sebulan. Surat pernyataan dan sanksi yang akan dikenainya nanti sudah disetujui sebelumnya oleh aparat dan pedagang. Kendala yang lain juga dari masyarakatnya yang masih membuang sampah di jalan, padahal sampah dari pedagangnya cuma 30%. Justru yang banyak itu dari masyarakat, jadi yang dari motor atau mobil pada buang di jalur jalan itu. Makanya sampah jadi numpuk, nah dinas kebersihan yang merasa berat karena dia harus nyapu kotoran pasar, kotoran dari warga atau dari manapun yang buang sembarangan.

6. P: Bagaimana proses pembentukan tiga jalur di Jalan Raya Ragunan?

H: kerjasama dengan Satpol PP, TNI dan POLRI dirapatkan yang awal mulanya itu kan jalur ada dua tapi dipakai sama pedagang satu jalur, itu kan makan badan jalan banget sampai bikin kemacetan parah di Pasar Minggu. Nah oleh karena itu, kita rapatkan untuk mencari solusi bagaimana si pedagang tetap mencari nafkah sementara kendaraan pun lancar, jadi nggak mengganggu. Kami pun akhirnya membuat tiga jalur yang terdiri atas: jalur pertama (sebelah kiri) yang ke arah terminal itu khusus untuk angkutan umum yang masuk ke arah terminal, jalur kedua (tengah) yang ke arah depok atau kalibata dan jalur ketiga (sebelah kanan) yang ke arah cilandak atau mampang. Pembagian tiga jalur ini, tidak menyebabkan kemacetan karena sudah diatur secara matang

7. P: Apa saja dampak yang dirasakan setelah dilaksanakannya program pembinaan pedagang kaki lima?

H: Perubahannya banyak yah. Dari segi lalu lintasnya menjadi lancar, yang awalnya kan dari arah sana kemari atau kesana lagi padat sama pedagang kan, nggak bisa diatur juga. Karena menurut mereka, ini tanah Tuhan nggak ada tanah Negara. Yang ada tanah Tuhan, jadi dimanapun mereka berdagang selama itu halal, yaa sah sah aja. Nah, karena sekarang ada kebijakan baru dari pimpinan, yaa Alhamdulillah jadi lancar jalannya, makanya ditempatkan disini dibikin Lokasi Binaan. Sekarang sudah tertib juga, perkembangannya bagus. Pedagang juga nggak ada yang diluar lagi atau pinggir jalan lagi, sekarang udah pada menetap di Lokbin.

Profil Informan IV (dengan panduan wawancara)

Nama : Miratno
Jabatan : Anggota Patroli Polsek Pasar Minggu
Tanggal Wawancara : 11 Februari 2015

BAGIAN PERTAMA: PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. P: Apa latar belakang terbentuknya program pembinaan pedagang kaki lima?

M: Yaa kamu bisa inget pas dulu kan dek, pedagang kaki lima di pinggir jalanan banyak bener. Dari depan Beacukai sampe depan Robinson, dari depan Robinson sampe lampu merah kearah Volvo, terus juga yang mau kearah terminal juga padet sama pedagang kaki lima. Pedagang rame dari pagi sampe malem. Dari malem aja jam 11an sampe jam setengah 6 udah di penuh sama pedagang sayur, terus jam 6-7 pagi udah mulai diusir-usirin sama Satpol PPnya kan, terus lanjut lagi jam 10an sampe jam 3 mulai dipenuhi sama pedagang buah, lanjut lagi jam setengah 4 sampe jam 11 malem itu dipenuhi sama pedagang pakaian. Itu setiap hari selalu kaya gitu, bikin jalanan jadi macet total soalnya pedagang kaki limanya pakai jalanan itu sampe ke badan jalannya. Nah semenjak Gubernurnya Jokowi aja jadi sekarang tertib, soalnya tiap hari dijaga terus sama Satpol PP yang disamping pasar. Bapak juga ikutan jaga yang di pos samping Robinson itu, Dishub juga ikutan jaga yang posnya di sebrang mau ke stasiun itu, tapi polisi sama dishub lebih kepada kelancaran lalu lintasnya dek.

2. P: Bagaimana alur koordinasi dalam pelaksanaan program pembinaan?

M: Pertama kami bikin perencanaannya dulu seperti apa aja, mendata pedagangnya berapa jumlahnya. Kalo udah didata baru cari lokasi yang sekiranya luas, layak dan udah diizinkan sama Pemerintah. Terus kami juga membagi jadwal jaganya agar sama rata, antara penjagaan siang sama penjagaan malem. Kalo udah semuanya, baru kami turun ke lapangan untuk ngebina. Tapi yaaa kami cuma *memback-up* dari belakang aja dek. Kalo misalnya ada keributan karna pedagangnya gamau dipindahin, yaa kita membantu untuk memisahkan atau melerainya.

3. P: Apa saja agenda dari program pembinaan?

M: Sebelum kita turun ke lapangan, kita apel dulu di Kelurahan Pasar Minggu yang terdiri dari Lurah Pasar Minggu, Satpol PP, TNI, POLRI dan Dishub (Dinas Perhubungan) untuk membicarakan hal apa saja yang harus dilakukan oleh aparat saat melakukan pembinaan nanti. Kemudian, baru seluruh aparat turun ke lapangan dengan pembagian jadwal penjagaan. Yang dapet shift siang sebanyak 75 Satpol PP, 10 TNI, 10 POLISI, dan 10 Dinas Perhubungan. Nah shift malemnya juga seperti itu penjagaanya. Kalo udah semuanya dapet jadwal masing-masing, baru kami memberikan penyuluhan dan arahan sama pedagang tapi cuma Satpol PP aja. Penyuluhannya itu tentang larangan berdagang di tempat umum, itu juga udah terpaku di Perda No. 8 Tahun 2007. Kami polisi, TNI dan Dishub cuma sekedar memantau dari belakang aja dek. Selama setaun sampe dua tahun ngebina dan udah keliatan

ada perubahan, maka aparat yang berjaga sedikit dikurangi dek. Biasanya diturunkan sampe ratusan aparat, saat ini kurang lebih yaa hanya 50an aja buat mengawasi jalanan aja supaya pedagangngnya ngga balik lagi ke jalan raya.

4. P: Berapa banyak petugas kepolisian yang diturunkan dalam program pembinaan ini?

M: Dari kami itu menurunkan sekitar 10 sampe 20 orang anggota BIMMAS (Bintara Pembinaan Masyarakat) dari Polsek Pasar Minggu untuk membantu Satpol PP menertibkan dan ngebina pedagang kaki limanya. Tapi kami hanya *memback-up* dari belakang saja kalo terjadi keributan antara pedagang dengan Satpol PP. Kalo sekiranya udah ada perubahan. Anggota yang kita turunkan juga dikurangnya. Jadi sekitar satu sampe lima orang aja, yang bertugas untuk memantau Pasar Minggu.

5. P: Adakah kendala saat dilaksanakannya program pembinaan pedagang kaki lima?

M: kendalanya pasti ada dek, pedagang rata-rata susah dipindahkan ke Lokasi Binaan. Sekalinya sudah pindah, nah kalo ngga ada petugas yang jaga nanti dia keluar lagi ke jalanan. Alesannya pasti pendapatannya jadi turun, sepi pembeli karna lokasi penampungannya terlalu masuk ke dalam. Tapi setelah kita kasih arahan perlahan-pelahan, lama kelamaan pedagangngnya pun jadi ngerti, takut juga buat balik lagi ke jalanan soalnya kenapa?pasti dikenakan sanksi, entah KTPnya yang disita atau bisa jadi barang dagangannya yang diambil.

6. P: Apa saja dampak yang dirasakan setelah dilaksanakannya program pembinaan pedagang kaki lima?

M: dampaknya bagus banget, liat aja sekarang jalanan jadi lancar banget. Jalanan udah ngga macet lagi. Mau kemana aja enak, udah ngga nunggu lama gara-gara macet. Masyarakat juga ngga resah lagi karna numpuknya pedagang di jalan. Pedagang juga udah ditata rapi di tempat penampungan sama di pasar. Yang mau kearah terminal dulunya juga macet banget kan gara-gara pedagang yang jualan di pinggir jalan, angkot jadi susah buat masuk ke terminal. Tapi semenjak pemerintahan Jokowi, dilakukan penertiban sama pembinaan dari aparat terhadap pedagang kaki lima. Hasilnya yaa jalanan jadi tertib kaya sekarang.

Lampiran III

Transkrip Wawancara Dengan Ketua PD Pasar Jaya Profil Informan I (dengan panduan wawancara)

Nama : Maskut (54 Tahun)
Jabatan : Asisten Usaha&Pengembangan PD Pasar Jaya Pasar Minggu
Tanggal Wawancara : 2 Februari 2015

BAGIAN PERTAMA: SEJARAH SEBELUM MENDAPATKAN PEMBINAAN

1. P : Apa latar belakang pemindahan pedagang di PD Pasar Jaya Pasar Minggu?

M : pedagang kaki lima yang dipindahkan ke PD ini yaa karena memang mengganggu ketertiban umum dek. Jalan raya menjadi macet karena banyak sekali pedagang yang di pinggir jalan sampe satu jalur dipakai full untuk pedagang. Dulu itu pedagang kaki lima mulai dari depan Beacukai udah rame banget dek sampe depan Robinson. Dari depan Robinson sampe lampu merah yang mau kearah Volvo juga rame sama pedagang kaki lima. Hal itu yang membuat pedagang cepet-cepet dipindahkan ke PD ini sama dipindahkan ke Lokbin. Pemindahan itu semenjak Gubernurnya Pak Jokowi.

2. P : Berapa banyak kios yang ada di PD Jaya Pasar Minggu?

M : Tempat usaha di PD ini banyak dek. Jumlah tempat yang ada disini sekitar 1987. Tapi ngga semuanya aktif cuma 1801 yang masih aktif dagang dek, sisanya ngebatalin buat nyewa kios di PD ini.

3. P : Berasal dari manakah pedagang-pedagang yang berada di kios PD Jaya Pasar Minggu?

M : Kalo yang tinggal disini macam-macam dek, dari Jakarta ada dari luar juga ada. Kalo mayoritasnya mah dari Jakarta paling di sekitar Pasar Minggu asalnya dek. Yang dari luar palingan nggak jauh-jauh dari Pasar Minggu.

4. P : Adakah persyaratan yang dipenuhi pedagang untuk menempati kios di PD Pasar Jaya Pasar Minggu?

M : Syaratnya mah ngga banyak dek cuma serahin potokopi KTP, foto ukuran 4x6 dan mengisi surat perjanjian pemakaian tempat usaha. Disitu juga ditandatangani oleh pedagang yang mau pakai tempat usaha itu dek.

5. P : Berapa uang sewa yang harus dibayar oleh pedagang?

M : Kalo di Jakarta kan banyak pasar, jadi tiap pasar itu berbeda-beda uang sewanya dek. Nah kalo di PD Pasar Jaya ini berbeda-beda tarif perkiosnya. Karena disini itu banyak kiosnya dari blok A sampai blok F. Dan disini itu ada yang tertutup, ada juga yang terbuka. Tertutup disini dalam arti kios yang ada di dalam pasar, nah kalo terbuka itu di luar kios seperti yang di los-los. Pembayarannya pun berbeda-beda sesuai dengan luas kiosnya yaitu per-meter persegi perbulannya. Kalo yang nagih uang sewa itu dulunya karyawan saya yang keliling kios tapi sekarang ada peraturan baru jadi pedagang yang mau bayar uang sewa langsung lewat bank. Sekitar tanggal 17 Desember 2014 peraturannya mulai dijalankan dek. Makanya bagi pedagang yang memiliki tempat usaha wajib membuka rekening diperbankan dan pedagang pun diberi kebebasan untuk membuka rekening tabungan kepada Bank bersama dengan PD Pasar Jaya di Bank yang ada di Jakarta seperti Bank DKI, BRI, BNI, BCA dan Bank Mandiri. Apabila pedagang telah memiliki rekening pada salah satu Bank yang dituju tersebut maka pedagang dapat mendaftarkan nomor rekening kepada PD Pasar Jaya.

6. P : Kapan kios-kios di PD Pasar Jaya mulai dibuka dan dioperasikan?

M : tempat usaha di PD setiap hari buka dek dari hari senen sampe minggu, mulai bukanya itu dari pagi sampe sore menjelang magrib yaa sekitar dari jam 7 pagi sampe jam 7 malem dek (07.00—19.00 WIB). Jam 19.00 WIB pedagang udah pada tutup yang di dalam kios. Malemnya ganti lagi sama pedagang sayur tapi di tempat terbuka kaya di los-losan atau luar kios lah dek.

7. P : Bagaimana pembagian lokasi yang ada di PD Pasar Jaya Pasar Minggu?

M : Kalo pada saat pembagian tempat usaha, pedagang di kumpulkan dulu kemudian diadakan undian pengocokan. Jadi masing-masing pedagang ngambil kocokannya itu, tapi sesuai dengan barang dagang yang dijualnya. Misalkan pedagang sayur kocokannya sesuai dengan pedagang sayur juga, pedagang buah kocokannya sesuai dengan pedagang buah juga dan seterusnya juga sama kaya gitu dek. Pedagang yang punya KTP asli Jakarta juga lebih diutamakan daripada pedagang yang ngga punya KTP Jakarta.

8. Menurut anda apa saja dampak yang dirasakan dengan adanya program pembinaan?

M : Dampaknya sih jadi lebih baik pastinya dek. Jalanan yang biasanya macet banget di Pasar Minggu sekarang jadi lancar. Terus juga pedagang nggak menumpuk lagi di pinggir jalan, pedagangnya jadi lebih tertib dan teratur keberadaannya. Contohnya kaya dengan adanya Lokasi Binaan dan ditambahkan lagi dengan PD Pasar Jaya ini.

Lampiran III

**Transkrip Wawancara Dengan Ketua atau Korlap Lokasi Binaan
Profil Informan II (dengan panduan wawancara)**

Nama : Suryaman

Jabatan : Ketua atau Korlap (Koordinator Lapangan) di Lokasi Binaan

Tanggal Wawancara : 12 Februari 2015

BAGIAN PERTAMA : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. P: Bagaimana sejarah atau awal mula terbentuknya Lokasi Binaan?

S: Dulu Pasar Minggu bebas banget mba. Orang mau jualan dimana aja dibolehin, ngga ada yang ngelarang, bebas banget mba. Di sepanjang jalan dari depan Beacukai sampe Robinson tuh udah rame pedagang mba, yang mau kearah terminal juga rame pedagang. Itu biasanya dari abis ashar sekitar jam setengah 4 udah mulai rame tuh, pedagang pada keluar ke jalanan buat gelar lapaknya mba. Biasanya jam-jam segitu mba, kebanyakan pedagang pakaian. Nah entar sekitar jam 11an pada beres-beres tuh mba, jam 12an udah mulai diganti lagi mba sama pedagang sayur. Itu pedagang sayur sampe pagi mba, jam 6an udah mulai diusir-usirin tuh sama satpol pp. Sekitar jam 7an mulai di bersih-bersihin tuh sama dinas kebersihan sampe bener-bener bersih. Belom ada jeda yang lama, sekitar jam 9 atau jam 10an udah mulai dateng lagi pedagang buahnya sampe jam 3an mba. Itu berlangsung terus menerus setiap harinya mba. Malah kalo mau tahun baru pedagang udah numpuk dari balai rakyat sono sampe Robinson, itu penuh sama pedagang terompet sama kembang api. Nah kalo mau

lebaran juga kadang ramenya itu sama kaya pas mau tahun baru dari balai sampe Robinson mba, kalo itu rame sama pedagang ketupat, pedagang kembang, pedagang baju koko sama peci, banyak dah mba. Itu biasanya ramenya itu dari abis magrib sampe malem, sekitar jam 12an juga udah diusir-usirin sama Satpol PP mba. Nah gara-gara kebebasan itu yang bikin jalanan jadi macet parah. Sampe-sampe kendaraan ngga bisa gerak sama sekali mba, angkot yang mau kearah terminal juga ngga bisa masuk. Karna keberadaan pedagang kaki lima udah bikin kemacetan lalu lintas dan bikin resah masyarakat. Makanya Pemerintah bersama dengan lembaga masyarakat mencari solusi untuk mengatasinya. Sekitar tahun 2003an Lokbin udah mulai dibangun mba tapi belom bisa beroperasi. Setahun kemudian, yaa tahun 2004an lah mba Lokbin udah mulai dibuka. Tapi pedagang yang di Lokbin cuma sedikit mba, soalnya rata-rata kata mereka dagangannya ngga laku kalo di belakang, yang di depan masih banyak yang jualan soalnya. Nah semenjak pemerintahan Jokowi aja semuanya jadi berubah mba. Sekitar tahun 2013an mulai dibina dan ditertibkan tuh mba sama satpol pp yang bekerja sama juga dengan TNI, POLRI dan Dishub. Itu berlangsung dari tahun 2013 sampe sekarang mba.

2. P: Bagaimana pembagian lokasi untuk para pedagang kaki lima?

S: Cara untuk membagi lokasi untuk pedagang di Lokbin ini dengan pengocokan mba. Jadi, setiap pedagang mengambil kocokan atau undian sesuai dengan jenis dagangan mereka. Misalnya gini mba: pedagang buah semuanya di sebelah kiri, nah setiap pedagang buah mengambil kocokan. Mereka dapet lokasi dimana. Apakah di depan atau di tengah atau dipaling belakang. Dipilih dengan cara pengocokan ini supaya adil dan tidak ada kecemburuan satu sama lain. Karna mereka sendiri yang mengambil kocokannya, jadi harus terima hasil kocokannya tersebut mba.

3. P: Apa saja materi yang disosialisasikan melalui program pembinaan ini?

S: Kami kan bertiga yaa mba. Saya sebagai Korlap di sini, Pak Hendra sebagai Bendahara dan Pak Burhan sebagai Sekretaris. Kami bertiga hanya mensosialisasikan materi ke pedagang yang sudah berada di Lokbin aja mba, kalo yang di luar Lokbin itu bukan tanggung jawab kami, tapi sudah tanggung jawab Satpol PP. Materi yang kami sampaikan itu berupa pengarahan agar si pedagang itu bisa bertahan di Lokbin. Yaa, kami juga memberikan penyuluhannya itu secara perlahan-lahan dengan obrolan biasa layaknya berbicara dengan teman saja mba. Karna apa?karna kalau terlalu kaku yang ada pedagangnya juga sulit untuk paham dan mengerti. Akibatnya pedagang jadi cepet keluar dari lokbin. Nah, bagi pedagang yang udah keluar dari Lokbin biarin aja buat pelajaran juga buat kami. Tapi kita disini juga harus menjaga yang masih ada di Lokbin supaya ngga ikut keluar juga dari Lokbin, kurang lebih seperti itu mba. Kami juga memberikan pengarahan mengenai cara berdagang yang baik itu seperti apa. Misalkan, ada pedagang yang ditawar dagangannya sama pembeli terus pedagangnya itu marah-marah. Nah kami disini meluruskan orang-orang yang istilahnya belum paham mba. Pedagang itu kan tidak boleh kasar sama pembeli, mereka itu harus memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli. Jadi, kami yang di Lokbin ini juga ikut ngebina pedagang mba. Kami juga saling bekerja sama dengan pedagang yang di Lokbin. Kalo di Lokbin ada kerusakan misalkan gentengnya bocor. Nah si pedagang bisa langsung ngelapor ke kami. Biar nanti kami yang ngelapor ke Pemda, nah terkadang suka lama kan dana yang turun dari Pemda. Sebelumnya kami minjem uang dulu biar segera dibetulkan

gentengnya biar pedagangnya pun merasa nyaman dan ngga berpikiran kalo kita hanya mintain uang aja ke pedagang mba, tapi di sini kita juga ikut ngebantu pedagang di Lokbin dengan cara memberikan pelayanan supaya pedagang yang di Lokbin pun merasa nyaman.

4. P: Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk berdagang di Lokasi Binaan?

S: Pedagang yang mau berdagang di Lokbin harus memenuhi tiga persyaratan mba. Pertama, harus menyerahkan satu potokopi KK (Kartu Keluarga). Kedua, menyerahkan satu potokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk). Ketiga, menyerahkan foto ukuran 4x6 sebanyak 2. Peraturan di Lokbin juga ketat mba. Jadi, pedagang yang di Lokbin itu diwajibkan hanya memiliki satu kios dalam satu KK (Kartu Keluarga), ngga diperbolehkan untuk memiliki kios lebih dari satu mba. Selain itu, jika pedagang selama tiga bulan berturut-turut tidak berdagang, maka kiosnya akan digantikan sama orang lain. Pedagang yang di Lokbin juga lebih mengutamakan yang memiliki KTP asli Jakarta mba. Awalnya juga yang ngga punya KTP Jakarta ngga diperbolehkan berdagang di Lokbin. Tapi setelah dimusyawarahkan dan diizinkan juga sama Pemerintah, jadi yang ngga punya KTP Jakarta harus didomisili dulu ke RT, RW dan Kelurahan setempat mba.

5. P: Apakah terdapat uang sewa yang harus di bayar oleh pedagang? Jika iya, berapa jumlah uang sewanya?

S: Kalo dulu mba, pas masih awal-awal yaa sekitar tahun 2004 sampe 2012 masih gratis mba. Pedagang ngga di pungut biaya sama sekali. Tapi karna ada pembinaan, otomatis pedagang kaki lima di pinggir jalan dipindahin dong ke lokbin. Jumlahnya pun ngga sedikit, nah sekitar tahun 2013an mulai dipungutin Rp 4000, 00 setiap harinya mba. Itu juga uangnya buat kebersihan sama keamanan di sekitar sini mba. Pungutan empat ribunya itu berlangsung kurang lebih cuma dua tahun aja mba, awal tahun 2015 mulai ada peraturan baru. Pedagang diminta untuk membuka rekening tabungan di salah satu Bank yang dituju mba. Ada Bank DKI, BRI, BNI, Bank OCBC NISP, Bank BTN Syariah, dan Bank BCA. Nah uang sewanya itu sekitar Rp 127.000,- tiap bulannya mba. Jadi, pedagang tinggal bayar lewat Bank aja. Ngga usah bayar ke kami lagi.

6. P: Adakah kesulitan yang dirasakan saat pemindahan ke Lokasi Binaan?

S: Kesulitan udah pasti ada mba. Apalagi yang pas dulu-dulu itu, pedagang masih banyak yang bandel. Kalo ngga ada petugas yang jaga langsung pada keluar ke jalanan, nah kalo ada petugas yang jaga ngga ada yang berani buat keluar ke jalanan yang ada pada takut semua mba. Soalnya mereka bilang enakan dagang di pinggir jalan mba, dagangan mereka cepet lakunya. Kalo dagang di dalam gini kan jadi sepi. Soalnya di depannya lagi pasti ada pedagang. Otomatis pembeli nyarinya yang paling depan dong, ngga mungkin milih yang di belakang. Di depan aja ada, ngapain di belakang. Pasti mikirnya begitu dong mba. Nah semenjak Gubernurnya Jokowi aja nih, jadi bener-bener tertib. Jalanan udah bersih dari pedagang kaki lima. Kemudian, di Lokbin kami juga mengalami kesulitan mba. Pedagang kadang susah untuk dimintai uang sewanya, alesannya besok-besok mulu. Padahal jumlah pedagang kaki lima yang terdata di sini ada 142 orang, yang ngumpulin buku tabungan auto debit cuma 118 orang mba. Sisanya itu kan sekitar 24 orang yaa mbaa, 142 dikurangi 118, bener kan 24. Nah sisanya yang 24 ini dibagi lagi mba 13 orang memang udah keluar dari

sini karna milih dagang di tempat lain. Sisanya lagi kan 11 orang, itu ada di daftar pedagang di Lokbin tapi belum ngumpulin buku tabungan auto debetnya mba, alesannya belum ada uang lah, alesannya juga kadang besok-besok mulu. Tapi ngga di bawa-bawa juga buku tabungannya.

7. P: Apa saja keuntungan dan kerugian yang dirasakan setelah adanya Lokasi Binaan?

S: Keuntungannya itu yaaa... jalanan jadi lancar mba, ngga macet lagi gara-gara penumpukan pedagang kaki lima di jalanan. Terus juga dengan dibaginya jalan menjadi 3 jalur jalan itu jadi bermanfaat. Yang mana satu arahnya itu khusus buat angkot kearah terminal, yang dua jalurnya lagi buat umum. Dalam arti bisa digunain buat angkot sama kendaraan pribadi juga. Nah, dari itu aja udah bikin jalanan jadi rapid an ngga macet lagi. Ditambah lagi dengan penempatan pedagang kaki lima di lokbin ini dan PD Pasar Jaya yang membuat pedagang pun menjadi tertata rapi. Kalo untuk kerugiannya mah lebih ke masyarakatnya yaa mba, palingan jadi susah buat beli kebutuhan sehari-hari. Kaya misalnya mau beli sayuran, yang biasanya itu beli di sepanjang jalan depan Ramayana sampe depan robinson pada jam 11 malem. Sekarang harus jalan dulu ke terminal. Terus juga kalo misalnya mau beli makanan, biasanya banyak tukang jualan makanan di depan ramayana kaya tukang ketoprak, nasi goreng, bubur ayam, dan banyak lagi. Sekarang harus jalan dulu ke balai rakyat. Yaa kurang lebih seperti itu mba.

Lampiran IV

Transkrip Wawancara Dengan Masyarakat

Profil Informan I (dengan panduan wawancara)

Nama : Hj Neneng
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tanggal Wawancara : 13 Maret 2015

BAGIAN PERTAMA : SEJARAH PASAR MINGGU

1. P : Bagaimana awal mula terbentuknya Pasar Minggu?

N: Pasar Minggu dahulunya itu merupakan pasar buah-buahan yang diperoleh dari perkebunan masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Minggu. Dahulu juga gedung-gedung yang saat ini sudah menjadi Pusat Perbelanjaan Robinson, Ramayana, Borobudur, BRI, dan Pusat Perbelanjaan Ananda merupakan perumahan penduduk yang memiliki pepohonan buah-buahan di halaman rumahnya. Hasilnya perkebunan buah tersebut diperjualkan ke pasar minggu. Berbagai buah yang ditanami oleh penduduk di sekitar meliputi rambutan, sawo, kelapa, duren, kecapi dan lain sebagainya. Lokasi awal dari Pasar Minggu tepat berada di Jalan yang saat ini telah berdiri Pusat Perbelanjaan Robinson yaitu di sebelah timur Stasiun Kereta Api Pasar Minggu. Pedagang yang berada di Pasar Minggu bukan berasal dari Pasar Minggu saja, namun dari luar Pasar Minggu pun ikut berdagang di sini seperti Depok, Kebagusan, Senen, Kemayoran dan sekitarnya. Dahulu perdagangan dilakukan pada setiap hari, namun ramainya hanya di hari minggu saja. Oleh karena itu, dinamakan sebagai Pasar Minggu, yang kemudian digunakan juga sebagai nama Kelurahan dan Kecamatan.

2. P : Bagaimana awal mula terbentuknya perdagangan di pinggir jalan Pasar Minggu?

N : Awal mula pedagang mulai datang ke Pasar Minggu mah saya kurang tau, lebih jelas tahun berapanya saya lupa dek. Soalnya dari jaman saya lahir dan dari jaman engkong saya tinggal disini, pedagang kaki lima udeh rame banget dek. Pedagangnya entuh dari depan Beacukai sampe depan Robinson, terus jalan yang mau ke arah Terminal juga rame sama pedagang kaki lima. Satu jalur jalanan dipake penuh sama pedagang kaki limanya.

3. P : Bagaimana pendapat anda mengenai program pembinaan pedagang kaki lima?

N : ya menurut saya sih bagus dek, gimana yaa jalanan jadi kagak macet lagi. Pedagang-pedagang yang di pinggir jalan juga jadi teratur tempatnya, kan pedagangnya itu rata-rata dipindahin di tempat penampungan sama di PD pasarnya dek. Kalo dulu nih yaa macetnya bukan maen kan dek. Saban hari macet terus, soalnya pedagangnya juga saban hari jualan di pinggir jalan tuh depan Ramayana. Apalagi kalo udah sore menjelang malem tuh dek, macetnya nggak ketolongan. Biasanya kalo tiap malem itu ada “Pasar Kaget”, orang bilangannya gitu dek. Soalnya pedagang kaki limanya itu pada ngobralin dagangannya dek, makanya macet banget kalo tiap malem. Terus juga malem minggu lebih-lebih deh macetnya, gak bisa gerak sama sekali. Waktu itu saya mau pergi pas malem minggu dek, masyaallah kagak bisa jalan sama sekali. Soalnya udah banyak angkot yang lewat, mobil motor eh ditambah lagi sama pedagang kaki limanya yang banyak juga. Yaudah kagak bisa gerak.

4. P : Apa saja keuntungan dan kerugian dengan keberadaan pedagang kaki lima di pinggir jalan?

N : Keuntungannya mah bisa adek rasakan sendiri kan. Sama-sama tinggal di Pasar Minggu. Jalanan jadi lancar bener, enak di lihatnya juga soalnya kan bersih sekarang kan dek coba dulu iih kumuh banget. Kalo kerugiannya mah pasti ada dek, kalo ibu mau cari apa-apa susah bener, kudu jalan dulu ke PD Pasar Jayanya atau ke tempat penampungan yang di belakang deket Terminal itu. Kan kalo dulu lebih praktis banget, kalo mau cari apa-apa langsung nyebrang dari gang bima. Soalnya kan pedagang dulu banyak bener dek, berjejer di pinggir jalan dari depan Ramayana sampe depan Robinson

5. P : Apa saja dampak yang ditimbulkan setelah adanya program pembinaan terhadap pedagang kaki lima?

N : kalo dampaknya mah dek, paling ibu jadi kudu ke dalem PD nya dulu kalo mau ada yang di beli. Tapi berhubung ibu udah kenal sama beberapa pedagang di PD kaya tukang buah, lumayan deh ibu kenal sama tukang buah di PD. Jadi, ibu tinggal pesen aja kalo ibu butuh buah apa aja, nanti tinggal ibu ambil atau mereka (pedagang) yang nganterin ke rumah. Tapi, mungkin kalo bagi orang-orang sekitar sini yang sering belanja di depan Ramayana mah pasti jadi repot dek kalo mau belanja. Biasanya nyebrang langsung banyak tukang dagang sekarang kudu ke PD dulu. Soalnya kan sekarang-sekarang ini udah kagak boleh lagi nih pedagang jualan di depan Ramayana sampe Robinson dek. Kalo dulu mah jam 10 atau setengah 11an malem aja tukang sayur udah pada berjejer di depan Ramayana sampe Robinson, itu pake satu jalur jalan dek. Angkot-angkot yang masih lewat cuma bisa lewat jalan yang satunya lagi dek. Paling mereka (pedagang) boleh dagangnya sekarang-sekarang ini itu dari jalan yang mau ke terminal itu juga dari jam 11 malem sampe jam 6 kuranglah. Soalnya Jam 6 pas itu udah mulai diusir-usirin sama trantib dek, kalo mereka (pedagang) nggak cepet-cepet pergi bisa diambil dagangannya sama trantib dek.

Transkrip Wawancara Dengan Masyarakat

Profil Informan II (tanpa panduan wawancara)

Nama : Sri (Mbak iik)

Pekerjaan : Pedagang Nasi Uduk

Tanggal Wawancara : 22 Februari

BAGIAN PERTAMA: OPINI SETELAH ADANYA PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. P : Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi Pasar Minggu dahulu?

S : Kalo dulu mah Pasar Minggu rame bener pi. Kan tau sendiri pedagang mulai pada gelar tuh dari depan Ramayana tuh sampe depan Robinson. Terus yang belokan mau ke Terminal juga rame sama pedagang. Dari pagi jam 10 juga udah banyak pedagang kaki lima kaya tukang buah terus kalo udah sore sekitar jam empatan kebanyakan tukang baju, tukang celana, tukang tas duh banyak banget deh pi. Terus jam 11 malemnya tukang sayur banyak bener berjejeran di depan Ramayana sampe Robinson, itu tukang sayurnya sampe jam enaman terus di usir-usirin tuh sama kantip terus abis itu jam 7an di bersih-bersihin sama tukang sampahnya. Dulu mah bener-bener ngga teratur banget, semua pedagang jualannya sampe ke tengah jalan pi. Apalagi kalo udah sore jam empat atau jam lima dah ramena minta ampun, orang jualan sampe diobral-obral makanya bikin macet jalanan, motor mobil udah nggak bisa gerak sama sekali. Sampe-sampe ada orang pernah bilang males kalo lewat Pasar Minggu gara-gara macetnya itu. Nah itu gara-gara pedagang kaki lima yang banyak bener itu pi dari pagi sampe sampe ketemu pagi lagi sampe di usir-usirin sama kantip. Pasar Minggu mah nggak pernah bersih dari pedagang soalnya walaupun di usir-usirin juga pedagangnya tetep balik lagi balik lagi pi.

2. P : Bagaimana pendapat anda mengenai program pembinaan pedagang kaki lima?

S : yaa bagus pi, semenjak dulu gubernurnya Pak Jokowi bener-bener pedagang kaki limanya dibersihin abis dari jalanan. Yaa liat aja tuh sekarang jalanan jadi sepi ngga banyak pedagang lagi. Jalanan juga ngga macet lagi, lancar banget sekarang mah. Mau kemana-mana jadi enak, nggak perlu nunggu lama gara-gara macet. Apalagi sekarang kantip jaganya setiap hari, terus juga ada dishub, ada polisi juga yang jaga di pos samping robinson, jadi orang dagang yang mau nekat dagang lagi di pinggir jalan juga ngeri pi. Soalnya sekarang peraturannya juga ketat kan. Mau nggak mau harus nurut kan sama peraturan daripada kena sanksi.

3. P : Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi Pasar Minggu saat ini?

S : Pasar Minggu sekarang mah bagus pi, bebas dari pedagang kaki lima. Jalanan jadi bersih, nggak padet sama pedagang. Nggga kaya dulu udah kumuh, banyak pedagang juga, banyak sampah juga. Soalnya tau sendiri kan dulu pedagang padetnya minta ampun, kalo keluar asrama langsung jalanan keliatan padet bener. Penuh sama pedagang, sama motor, sama mobil, sama angkot juga pi. Sumpek liatnya dulu mah. Jalanan padet nih biasanya gara-gara pedagang dari depan Ramayana sampe depan Robinson pi. Jam-jam segini (pukul 06.00) aja

masih rame tukang sayur, entar nih jam 7an udah mulai diusir-usirin sama trantib abis itu langsung dibersihin sama yang tukang kebersihannya. Beda deh sama sekarang, enak bener deh pokoknya jalanan jadi lancar.

4. P : Apa saja keuntungan dan kerugian yang dirasakan dengan keberadaan pedagang kaki lima di trotoar atau pinggir jalan?

S : kalo untungnya mah lumayan banyak yah. Kan mba iik jualan jadi gampang kalo mau belanja buat jualan besok, tinggal nyebrang dari sini (asrama) langsung beli kan sepanjang jalan berjejeran tukang sayur semua kalo jam 4 pagi. Kan tukang sayur biasanya mulai dari jam 11 malem tuh sampe mulai diusir-usirin sama trantib kira-kira jam 6 pagian. Nah kalo misalnya ada cabe atau kurang apa jadi gampang pi, tinggal keluar asrama langsung nyebrang udah banyak tukang cabenya. Kalo mbak ik biasa belanjanya nih di depan puskesmas pi. Coba kalo sekarang mau beli apa-apa susah harus ke dalem pasarnya dulu. Nah apalagi kaya tadi nih, kalo ada cabe atau kurang apa huh sekarang jauh banget harus ke ujung sono, yang orang bilang apa penampungan yang di dekat Terminal sono (Lokasi Binaan).

5. P : Apa dampak yang dirasakan setelah adanya program pembinaan pedagang kaki lima?

S : dampaknya sih cuma jadi kesusahan belanja buat dagang nasi uduk besok pi. Kalo dulu mah enak banget pi, mau nyari apa-apa bangsa cabe, wortel, daun seledri gampang tinggal jalan sedikit nyampe, kalo langganan mbak ik mah yang di depan Puskesmas atau kalo misalkan nggak ada cari di tempat lain kan banyak dulu yang jualan dari di depan Ramayana sampe depan Robinson. Beda kalo sekarang mah, kudu ke dalem pasarnya dulu atau kalo nggak nemu yang mau dicari kudu ke ujung sono yang tempat penampungan itu. Kan mbak iik juga jalan kaki pi, mau naek angkot juga sayang banget kan. Mau nggak mau harus jalan sampe ke ujung sono.

Lampiran V

Transkrip Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima

Profil Informan I

Nama Informan : SITI
Jenis Dagangan : SARUNG, MUKENA, HANDUK, DLL
Lokasi Dagang : DI PD PASAR JAYA
Tanggal Wawancara : 10 FEBRUARI 2015

Profil Informan II

Nama Informan : ENDANG
Jenis Dagangan : PEDAGANG SAYURAN
Lokasi Dagang : DI PD PASAR JAYA
Tanggal Wawancara : 20 FEBRUARI 2015

Profil Informan III

Nama Informan : MUHAMMAD
Jenis Dagangan : TUKANG KELAPA PARUT
Lokasi Dagang : DI LOKASI BINAAN
Tanggal Wawancara : 11 FEBRUARI 2015

Profil Informan IV

Nama Informan : KHOIRI
Jenis Dagangan : TUKANG BUAH MELON DAN SEMANGKA
Lokasi Dagang : DI LOKASI BINAAN
Tanggal Wawancara : 11 FEBRUARI 2015

KETERANGAN:

Peneliti : P
Siti : S
Endang : E
Muhammad : M
Khoir : K

1. P: Sejak kapan anda sudah merintis untuk berdagang?

S : udah lama dagangnya udah dari tahun 1987 tapi dulu pertama kali dagang di kampung. Kampung saya di Cirebon mba, jualannya juga beda sama sekarang, dulu jualan kue jambang.

E : saya dagang udah dari gadis mba, ikut sama sodara di Jakarta

M : udah dari tahun dua ribu mba, dari Jawa Timur langsung ke Jakarta. Terus aku punya modal dua puluh juta terus aku beliin mesin aja buat dagang. Kalo dagangannya ngambil dari bos. Abis jualan langsung nyetor ke bos

K : Saya jualan udah lama dari saya masih bujang sampe tua, sampe punya anak tiga

2. P: Apa pendidikan terakhir anda?

S : saya cuma tamatan SD mba

E : pendidikan terakhir saya sampe SMP mba

M : aku cuma sampe SMP aja mba

K : dulu saya ngga sekolah

3. P: Apakah anda memiliki pekerjaan sampingan selain berdagang?

S : ngga ada mba, cuma dagang disini tok. Dagangnya juga kadang ganti-ganti mba. Kadang BH, kadang kancut, kadang kaos kaki, kadang seprey. Kalo suami jualannya sarung, mukena, sajadah. Nah pas ada penertiban, suami saya pindah ke kampung terus dagangannya saya gabungin aja sama punya saya.

E : nggak ada mba, saya dagang sayuran aja. Sekarang dagangnya juga sama suami.

M : nggak ada mba, cuma dagang kelapa parut aja ini sama istri.

K : nggak ada, saya cuma dagang ini aja

4. P: Dimana lokasi anda berdagang dahulu sebelum adanya pembinaan ini?

S : dulu dagangnya di depan Borobudur, dari jam setengah empat kalo nggak jam empatan baru buka saya mba ampe nanti malem yaa jam 11an lah

E : dulu dagangnya di dalam pasar, di belakang terminal terus di pindah ke atas sama manager karna di rapiin pasarnya, nah terus karna di atas sepi saya terus keluar ke lampu merah. Soalnya yang di luar masih banyak yang jualan, jadi kita ikut keluar.

M : dulu dagang di terminal sama istri dari pagi sampe malem mba. Tapi gara-gara ada penertiban jadi ganti-gantian sama istri. Istri di terminal dari jam 12 malem sampe jam 6 pagi kalo nggak jam 7, kan di terminal masih dibolehin buat dagang tuh asal jam 7 udah bersih. Terus gantian aku dagang di sini dari jam 7 pagi sampe jam 5 sore mba.

K : dulu saya dagangnya di depan Borobudur setiap hari non-stop dari jam 5 subuh sampe jam 6 sore mau magrib terus saya dorong ini gerobak sampe sini (Lokbin) terus saya titipin di pojok sono sama orang tapi bayar lima rebu tiap nitipin.

5. P: Kapan anda mulai berdagang di pinggir jalan? Dan apa alasan anda memilih di pinggir jalan?

S : hmm.. lupa saya mba, kalo nggak salah tahun 2005 saya dagang di depan Borobudur. Yaa nggak tau yaa mba, banyak temen aja sih makanya saya jadi ikutan di jalan. Tapi semenjak ada penertiban waktu itu, banyak temen-temen saya yang pada pulang kampung mba, ada juga yang pindah dagangnya, ada juga yang di lokbin sama di sini

E : saya pindah ke lampu merah, yaa pas saya di pindah ke atas sama manager soalnya pasarnya itu lagi di rapiin. Karna di luar masih banyak, yaudah saya ikutan juga keluar ke jalan. Saya di lampu merah itu cuma sebentar mba, cuma tujuh bulan doang.

M : aku dagang di terminal udah tujuh taun mba.

K : aku udah lama dagang di depan Borobudur, dari tahun 2000-an kalo nggak salah.

6. P: Bagaimana kondisi Pasar Minggu dahulu sebelum adanya program pembinaan ini?

S : yaa nggak tau yaa kaya apa yaa, pokoknya amburadul, nggak karuan, berantakan jugalah mba

E : Pasar Minggu dulu keliatan semberawut, ribetlah kaya berantakan, ngga rapi pokoknya mba

M : yaa berantakan sih mba, ngga teratur banget

K : Pasar Minggu dulu, yaa.... Kalo dulu mah Pasar Minggu yaa begitulah, macet, berantakan. Kan dimana-mana banyak orang dagang sampe ke depan-depan, nyebar sampe kemana-mana. Kalo sekarang mah kumpulnya di sini. Tapi yang di sini mah sedikit soalnya pada pulang kampung lah, yang di sini mah cuma beberapa persen doang. Full dulu mah, dari Ramayana sampe Robinson, depan taman pertanian, lampu merah di sebelah kanan kiri penuh pedagang. Pedagangnya juga banyak banget, lebih dari seratus orang, seribu orang lah yaa kurang lebih ada tiga ribu orang.

7. P: Bagaimana interaksi anda dengan pedagang-pedagang lain saat berdagang di pinggiran atau bahu jalan?

S : yaa hubungannya baik mba, saling bantu sama temen kan sesama pedagang kalo ada yang kesusahan yaa dibantu

E : hubungannya baik sih saling bantu aja mba

M : hubungan sama temen-temen aku yaa baik sih mba. Saling bantu pokoknya

K : hubungan sama yang lain sih baik baik aja yah, saling bantu aja satu sama lain

8. P: Apakah anda mengetahui dan paham mengenai peraturan yang melarang untuk berdagang di pinggir jalan?

S : ada, tau juga, tapi yaa namanya orang jualan yaa mau nyari duit mba, mau gimana lagi. Dulu di depan Borobudur juga banyak yang jualan. Yaa, saya ikutan aja mba. Banyak yang beli juga kalo di pinggir jalan gitu

E : yaa... kan sebenarnya kalo kita bener yaa salah juga kita udah di bilangin tapi kita malah bandel. Yaa abis gimana, yaa kan kita cari duit di jalan tapi kalo kita tetep di jalan nanti di ambil dagangannya. Sebenarnya kita tau peraturan itu. Yaa.., tapi kita nyari makan dari situ, nah nanti anak kita makan apa kalo kita nggak dagang.

M : tau sih mba kalo nggak boleh dagang di pinggir jalan sama terminal. Apalagi dagang di terminal pas siang-siang, kan bikin macet tapi yaa kita mau nyari duit mau gimana lagi

K : yaa... pokoknya sebelum Gubernurnya Pak Jokowi yah, yang dulu Pak Fauzi Bowo sama Pak Sutiyoso yaa susah kan di tertibinnya. Tapi sekarang semenjak yang megang Pak Jokowi aja jadi begini, soalnya dulu Pak Jokowi cuma bilang tolong semuanya pada ke belakang. Nggak perlu teriak-teriak, ngusir-ngusirin paksa. Cuma jalan kaki keliling pasar terus bilang tolong semuanya pada pindah ke belakang, langsung pada nurut. Yaa walaupun masih ada beberapa orang doang yang masih bandel.

9. P: Bagaimana pendapat anda mengenai program pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan?

S : yaa bagus sih sebenarnya bikin jalanan rapi, nggak macet lagi

E : yaa..., bagus sih Pasar Minggu jadi lancar nggak macet lagi

M : setuju aja sih mba, bagus bikin teratur juga.

K : yaa menurut saya sih, bagus yaa. Pasar Minggu jadi tertib diliatnya juga

10. P: Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh petugas satpol pp terhadap anda? (materi yang diberikan seperti apa?)

S : kalo waktu itu diusir-usirin terus cuma dikasih tau aja mba kalo nggak boleh dagang di sini, disuruh pindah ke tempat penampungan. Kalo nggak di pasar yaa di lokbin belakang. Tapi kalo dagangan kaya saya ini dipindahinnya di pasarnya. Terus kalo masih ngeyel dagang di situ bisa-bisa dagangannya di ambil sama trantibnya mba.

E : awalnya udah di siarin, udah di bilangin sama petugas kalo dagang di sini entar dagangannya di buang-buangin, di usir-usirin gitu. Nggak boleh bandel, ini bener-bener nggak boleh untuk selamanya jualan di sini. Coba nempatin jualan di tempat pembinaan penjualan di atas atau di lokbin. Nah itu nertibinnya setiap hari sama petugas. Terus kalo kita ngumpet-ngumpet keluar, nah terus ketauan sama petugas, dagangan kita nanti ditendang-tendangin, di buangin, di angkutin dagangannya, KTP-nya juga nanti diambil.

M : dulu sih sebelum di usir-usirin udah dikasih tau kalo nggak boleh dagang di terminal pas pagi sampe sore soalnya bikin macet, angkot jadi susah masuk. Tapi lama kelamaan dibolehin juga di terminal tapi cuma malem sampe pagi doang mba, malemnya itu jam 11 kalo nggak jam 12an sampe pagi jam 6an, itu jam 6 juga udah mulai di usir-usirin sama trantib

K : nertibinnya itu keliling satu-satu jalan kaki tuh sambil bilangin mulai hari sampe besok sampe seterusnya tolong ke belakang dulu, gitu sih pas Pak Jokowi ke Pasar Minggu nah di belakangnya ada Satpol PP sama pengawalnya. Makanya sekarang tertib soalnya ngasih taunya juga pelan-pelan. Nggak kaya dulu sebelum Pak Jokowi, ngasih taunya kasar jadi banyak banget pedagang yang ngelawan, kalo sekarang kan paling cuma beberapa orang aja yang masih bandel. Kalo Satpol PPnya kan sekarang cuma jaga di pos aja tuh, soalnya kan sekarang udah mulai tertib juga jadi yaaa mantau aja. Kalo dulu tuh keliling mulu tiap harinya, kalo misalkan ada pedagang yang dagang di jalanan, otomatis ketemu sama Satpol PP yang lagi nertibin dong. Yaudah langsung di tegor sama Satpol PPnya, kalo nggak mempan juga misalkan udah di tegor tapi balik lagi yaudah mau nggak mau dagangannya langsung di angkutin ke Kecamatan. Terus juga sekarang kan masih dibolehin dagang di terminal dari jam 11 malem sampe jam 6 pagi. Nah jam segitu tuh tukang sayuran semua. Tapi bates dagangannya itu sampe pos satpol pp aja, kalo lewat dari pos itu beda lagi urusannya, itu namanya sih bandel. Kalo kena usiran yang ada langsung diambil dagangannya. Pak Suryaman yang di Lokbin juga tiap hari keliling terus ngobrol sama pedagang, ngobrolnya juga bukan soal dagang di sini tapi ngobrol biasa aja. Suka bercanda juga, paling kalo keliling cuma bilang “yaudah di sini aja nggak usah kemana-mana, entar di sini juga rame”. Emang bener juga sih sama omongan Pak Suryaman waktu itu, soalnya sekarang-sekarang ini pembeli juga udah mulai pada tau, jadi kalo turun dari angkot langsung ke sini.

11. P: Kapan anda mulai dipindahkan ke PD Pasar Jaya atau Lokasi Binaan di Pasar Minggu?

S : yaa pas lagi rame-ramenya di tertibin itu mba. Tahun 2013an kalo nggak salah ya. Tadinya juga saya dagang di atas terus nggak laku karna sepi. Yaudah saya cari tempat yang di bawah terus agak ke depannya. Dapetnya di sini akhirnya. Ini juga di sini baru lima bulan saya mba.

E : mulai pindah udah lama yah, yang di usir-usirin rame itu. Udah dua taunanlah, semenjak Pak Jokowi jadi Gubernur. Nah saya dagang di atas dari pagi jam 4 sampe sore, kalo udah sore saya pindah ke bawah ke tempat kosong karna orangnya udah pulang. Soalnya di atas kalo sore kan sepi, makanya saya pindah ke bawah sampe magrib.

M : kalo di sini baru setaun mba. Soalnya pas lagi rame-ramenya di usirin gitu aku pulang kampung mba. Makanya baru disini setaun

K : di sini tuh saya udah lama, yaa udah dua taunan deh

12. P: Saat pembinaan berlangsung, apakah ada keinginan untuk melawan atau berusaha untuk mempertahankan lokasi anda berdagang? Dan apakah ada rencana untuk kembali berdagang di pinggir jalan?

S : ngga ada sih, yaa mau gimana lagi. Mau ngelawan juga saya takut. Nggak ada sih rencana buat ke sana lagi. Di sini juga udah enak mba

E : kalo dulu pertama-tama keberatan waktu itu, gimana gitu. Karna awalnya sih kita nggak terima, sampe nangis karna bingung mau jualan dimana. Takut dagangannya sepi, nggak ada yang beli gimana. Kan dulu sepi banget di atas. Tapi lama-lama kita ada pelanggan 1 sampe 2, lama-lama lumayan juga. kita juga ngasih nomer hp, kalo ada pelanggan yang pesen sayuran terus minta di anterin ke rumah, yaa nanti kita anterin pesenannya. Makanya di rasa-rasain enakan di dalem pasar juga ternyata.

M : ngga ada sih, yaa terima-terima aja. Kalo aku sih nggak pernah ngelawan sama petugasnya, dia kan juga tugas. Jadi yaa nurut aja mba. dulu juga pernah ada demo, udah lama sih. Itu juga yang demo yang nggak setuju aja paling mba. demonya di Kecamatan mba. Yaa..... tapi ujung-ujungnya juga nerima.

K : kalo di suruh pindah yaa saya pindah, nggak mau neko-neko kaya orang-orang. Dulu mah ada yang bandel satu orang entar semuanya kena, jadi kalo mau ngelawan juga malu sendiri kitanya.

13. P: Adakah perbedaan antara lokasi berdagang anda dahulu dengan saat ini?

S : yaa ada mba. Kalo di jalan kan nggak pake bayar sewa tiap bulannya, paling cuma kebersihan doang itu juga cuma dua rebu kadang tiga rebu doang. Kalo di sini kan tiap bulannya bayar sewa perbulannya dua ratus lima puluh rebu sama listrik cepek. Kalo di sini kan nggak nentu kadang untungnya banyak kadang dikit, kalo di pinggir jalan kan rame banyak yang beli juga. Tapi kalo di pinggir jalan nggak nyaman, soalnya sering diusir-usirin juga. Kalo di sini kan nyaman, buka jam berapa tutup jam berapa aja bisa. Kalo di pinggir jalan pernah baru buka udah diusir-usirin.

E : dulu pertama-tama yaa enakan di luar, soalnya kalo di jalan kan nggak pake bayar sewa, kalo aku sih nggak di maintain uang sama preman juga. tapi kadang di usir-usirin sama petugas, pokoknya nggak nyaman. Nah setelah aku pikir-pikir enakan di dalem pasar ternyata soalnya kalo panas nggak kepanasan, kalo ujan nggak keujanan juga, nggak repot juga kalo di usir-usirin, nggak kena asep mobil juga. Tapi kalo di dalem pasar bayar sewa tahunan, pertahunnya itu satu juta dua ratus terus sama uang lampu tiga rebu. Kita bayarnya langsung ke kantor yang di lantai dua, soalnya kita nggak jadi bikin rekening, kalo kaya tukang sayur kaya kita nggak mba, tapi kalo yang di kios-kios gitu yaa saya nggak tau.

M : kalo dagang itu nggak tentu, kalo lagi rame begini nih yaa lumayan. Kadang cepek kadang lebih juga. Kalo lagi musim ujan gini biasanya sepi mba. Tapi Alhamdulillah kalo buat sehari-hari masih bisa terpenuhi mba. Buat beli keperluan anak juga Alhamdulillah masih bisa dipenuhin. Anak soalnya cuma dua. Yang satu udah keluar, yang satunya lagi masih kelas 3 SD.

K : awalnya emang enakan di depan Borobudur yaa soalnya kan dekat jalan jadinya banyak yang beli, nggak dimaintain uang juga buat sewa palingan cuma bayar ke preman itu juga kalo aku lagi ada duit, kalo nggak ada amah nggak aku kasih. Tapi sebenarnya sih

enakan di sini (Lokasi Binaan) yah, udah nyaman juga. Paling yang masih di pinggir jalan itu yang dagangannya di gendong-gendong aja. Kalo yang pake gerobak kaya saya ini ngga ada yang berani, pada takut sama Satpol PPnya kalo nantinya mau di angkut ke Kecamatan. Saya malah di suruh sama anak saya pindah ke Cilandak, yang di depan Mall Cilandak tapi saya nggak mau. Mendingan di sini soalnya kalo di sana harus belanja dulu yang banyak, nyater mobil juga. nah kalo di sini kan enak bisa bareng-bareng sama temen. Rombongan belanjanya kira-kira 4 sampe 5 orang lah buat nyater mobil juga.

14. P: Bagaimana interaksi yang anda jalin dengan pedagang yang lain di lokasi baru?

S : baik juga sih, sama aja kaya di pinggir jalan dulu

E : hubungannya sama aja sih, saling bantu. Tergantung kitanya, kalo kitanya baik sama orang, orang juga bakal baik sama kita. Yaaa...., kalo di sana rame terus kitanya cemberut aja, yang ada di musuhin sama temen.

M : yaaa... hubungannya baik-baik aja mba, yaa saling bantu juga. Yaa paling masing-masing pedagang pada bersaing. Kalo misalnya ada pedagang baru, pasti pada bilang “orang baru mau nindas, orang baru mau nindas”

K : hubungannya sama saja yah. Sama-sama baik sama pedagang yang lain. Kalo ada yg minta bantuan, yaa kita bantu sebisa kita.

15. P: Apa dampak yang anda rasakan setelah adanya program pembinaan ini?

S : awalnya sih bikin kita jadi kebingungan mau dagang dimana lagi, mau nyari dimana. Tapi kalo di pikir-pikir sih enak juga, sekarang dapet tempat yang nyaman, nggak di usir-usirin lagi

E : yaa... bersyukur Alhamdulillah, semenjak penertiban itu sekarang jadi enak. Nggak keujanan, nggak kepanasan, udah gitu hasilnya juga lumayan lagi

M : akibatnya sih bagus juga sebenarnya. Jalanan jadi lancar, pasar juga rapi, di sini juga rapi.

K : kalo bagi saya ini yaa... ada bagusnya juga. Jalanan kan jadi enak, nggak padet sama pedagang semua, lancar juga jalanan, nggak macet lagi pokoknya deh

LAMPIRAN FOTO

1.



Proses Penertiban dan Pembinaan

2.



Proses Penertiban dan Pembinaan

3.



Proses Penertiban dan Pembinaan

4.



Proses Penertiban dan Pembinaan

5.



Proses Penertiban dan Pembinaan

6.



Proses Penertiban dan Pembinaan

7.



Proses Penertiban dan Pembinaan

8.



Proses Penertiban dan Pembinaan

9.



Proses Penertiban dan Pembinaan

10.



Pos Penjagaan Polisi

11.



Pos Penjagaan Dishub

12.



Simbol Relokasi Pedagang Ke Tempat Penampungan

13.



Kantor Lokasi Binaan

14.



Kantor PD Pasar Jaya

15.



Hj. Neneng (Masyarakat)

16.



Muhidin (Kasatgas Satpol PP)

17.



Suryadi (Satpol PP)

18.



Hadi (Dishub Anggota Golongan A)

19.



Maskut (Ketua PD Pasar Jaya)

20.



Korlap atau Ketua Lokasi Binaan

21.



Ariffudin (Staff Camat Bagian Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kecamatan Pasar Minggu)

22.



Endang (Pedagang Sayuran)

23.



Siti (Pedagang Sarung, Handuk, Mukena, dan lain-lain)

24.



Muhammad (Pedagang Kelapa Parut)

25.



Khoiri (Pedagang Buah Semangka dan Melon)

26.



Sri atau Mbak iik (masyarakat/pedagang nasi uduk)



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp/Fax.: Rektor (021) 4893854, PR I: 4895130, PR II: 4893918, PR III: 4892926, PR IV: 4893982,
BAUK: 4750930, BAAK: 4759081, BAPSI: 4752180
Bag. UHTP: Telp. 4893726, Bag. Keuangan: 4892414, Bag. Kepegawaian: 4890536, HUMAS: 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 0391/UN39.12/KM/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Untuk Skripsi

30 Januari 2015

Yth. Camat Kecamatan Pasar Minggu

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Devi Tri Liana
Nomor Registrasi : 4815116774
No. Telp/HP : 082110925141
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Untuk Mengadakan : Penelitian Untuk Skripsi

Di : Kantor Camat Pasar Minggu,
Jl. Raya Ragunan, No.16, Kel. Jati Padang,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Skripsi. Skripsi tersebut dengan judul :
"Pola Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jakarta"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan,



Desy Sulalla
NIP.155702161984031001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog / Jurusan Sosiologi



BADAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN PELAKSANA PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR MINGGU
NOMOR : 005/16.4.0/PTSP/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENELITIAN/RISET KEPADA PENELITIAN ATAS NAMA
DEVI TRI LIANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

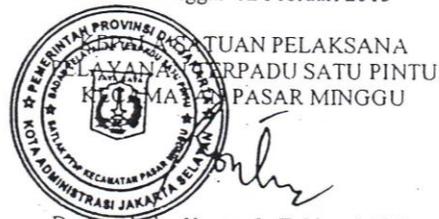
KEPALA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR MINGGU

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya surat dari **Universitas Negeri Jakarta** tanggal 30 Januari 2015 Nomor : 0391/UN39.12/KM/2015, hal Permohonan Izin Penelitian/Riset, untuk kegiatan dimaksud diperlukan izin;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Penelitian/Riset kepada Peneliti atas nama **Devi Tri Liana**;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur No.57 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Keputusan Gubernur Nomor 69 Tahun 2004 tentang Prosedur Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PEMBERIAN IZIN PENELITIAN/RISET KEPADA PENELITI ATAS NAMA
DEVI TRI LIANA;
- KESATU** : Memberikan Izin Penelitian/Riset kepada peneliti atas nama **Devi Tri Liana**
sebagai peneliti dari **Universitas Negeri Jakarta**;
- KEDUA** : Izin Penelitian/Riset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah "**Pola
Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jakarta**";
- KETIGA** : Pemegang Izin Penelitian/Riset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Satuan Pelaksana Pelayan
Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pasar Minggu tentang kegiatan yang telah
dilaksanakan, paling lama satu bulan setelah habis masa berlakunya Izin
Penelitian/Riset untuk mendapatkan rekomendasi publikasi;
- KEEMPAT** : Peneliti dapat melakukan publikasi hasil Penelitian/Riset jika laporan
sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA telah diterima dan mendapatkan
rekomendasi publikasi;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan
Pasar Minggu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Februari 2015



Dr. Roy Indra Kresna L. Tobing, M.Mkes
NIP. 197104032006041015

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
2. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kec. Pasar Minggu-Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Camat Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan

BAB VI
TERTIB TEMPAT USAHA TERTENTU
Bagian Kesatu
Tempat Usaha
Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 25

- (1) Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 26

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Usaha Tertentu
Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha - usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Setiap Orang atau badan dilarang;
 - a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.
 - b. mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya.
 - c. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.

LOKASI BINAAN PASAR MINGGU
 JALAN BUNTU
 KECAMATAN PASAR MINGGU
 KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
 TELP. 081806596999
 LATITUDE / LONGITUDE : -6.283130, 106.843427
 TITIK KOORDINAT : 6°16'59.3" S 106°50'36.3" E

NO	NAMA PEDAGANG	NOMOR KTP	ALAMAT	NO. HP PEDAGANG	NOMOR KIOS	JENIS DAGANGAN	STATUS JAKCARD
1	IING	3202470407560002	KP. CIPAMULIH, BOGOR	085798212358	BLOK A. 10	BUAH	
2	ENDI	3201280406790005	JL. TAMAN MUARA, BOGOR	085719376600	BLOK A. 154	BUAH	
3	FERI PURNIAWAN	3201381807890005	KP. SALAAWI, BOGOR	081283862239	BLOK A. 19	BUAH	
4	UJUM	3202172303660001	KP. JABON RAWA, BOGOR	085697537389	BLOK A.08	BUAH	
5	MAMAN	3202180707800011	KP. SINGAR, BOGOR	0812*1004275	BLOK A.01	BUAH	
6	MUSLIM	3217120112890007	KP. CILENGSING, BANDUNG	081382294165	BLOK A.155	BUAH	
7	MUHTADIN	3201280707790003	DS. GEGUNUNG, SEMARANG	081310682783	BLOK A.04	BUAH	
8	UDAY SETIAWAN / 410A1	3201401104780001	KP. PASIR, BOGOR	085695215184	BLOK A.44	BUAH	
9	KHOER	3201300703800009	KP. KEKONCONG, BOGOR	08568064358	BLOK A.45	BUAH	
10	SUPIAN	3201280912600001	KP. CIPAOK, BOGOR	085778413733	BLOK A.104	BUAH	
11	NURIYANA	3201381402780003	KP. SELAWI, BOGOR	087873239550	BLOK A.53	BUAH	
12	SOLEH	3201380607610004	CIBURAYUT CIGOMBONG, BOGOR.	081314112720	BLOK A.51	BUAH	
13	ABDL HAMID	3201381203760002	KP. SALAAWI, BOGOR	081283862239	BLOK A.18	BUAH	
14	AGUS	3201381506790018	KP. SALAAWI, BOGOR	081315990755	BLOK A.50	BUAH	
15	NGATEMAH	321017112620021	JL. CANDISARI, DEMAK		BLOK A.71	BUAH	
16	IPAH	321014107600003	JL. CANDISARI, DEMAK	081229980719	BLOK A.70	BUAH	
17	UJANG PERMANA	3174042108580004	GG. GAYA, PASAR MINGGU		BLOK A.112	BUAH	
18	HERI NOVIANTO	3174041911790008	GG. SOSIAL, PS. MINGGU		BLOK A.113	BUAH	
19	MAMAT	3201301804670004	KP. CAHANG PULANG, BOGOR		BLOK A.09	BUAH	
20	ZAKARIA	3173060708620009	GG. RAJAWALI PS. MINGGU		BLOK A.95	BUAH	
21	DAHLAN	3174041011550009	JL. MASJID AL FALAH PS. MINGGU	087785059121	BLOK A.03	BUAH	

13

LOKASI BINAAN PASAR MINGGU
 JALAN BUNTU
 KECAMATAN PASAR MINGGU
 KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
 Telp. 081806596999

LATITUDE / LONGITUDE : -6.283130, 106.843427
 TITIK KOORDINAT : 6°16'59.3" S 106°50'36.3" E

22	SAEPULLOH	3201281409690003	KP. BALALANG, BOGOR	082124684170	BLOK A.05	BUAH
23	KHAIROL SALAH	3174042207690004	GG. GAYA, PS. MINGGU		BLOK A.94	BUAH
24	SATINI NY	3174044508450002	GG. GAYA, PS. MINGGU		BLOK A.62	BUAH
25	ALI SADIKIN	3174040808730022	GG. GAYA, PS. MINGGU	087878084588	BLOK A.61	BUAH
26	SITI KHOMSIAH	3174044809730006	JL. PEJATEN TIMUR, PS. MINGGU		BLOK A.14	BUAH
27	SRIYONO ✓	362398602600004	DSN. KANTONG PARENGAN TUBAN		BLOK A.20	BUAH
28	RIKY S ✓	3201151007840003	KP. CINANGNENG BOGOR		BLOK A.21	BUAH
29	SUYEK	3322037112710016	DSN. TIMPIK SEMARANG	081219245665	BLOK PARKIR 01	BUAH
30	JUMINEM	3309027112640004	TEGAL SARI BOYOLALI	085694084459	BLOK PARKIR 02	BUAH
31	SUKAMITO	3523093012690002	DSN JEWET TUBAN	081329174466	BLOK PARKIR 03	BUAH
32	TUMPUK	3322035205540001	DS. KARANG SALAH SEMARANG	087883732680	BLOK PARKIR 04	BUAH
33	SUWARNI	3328036104810002	DS. KARANG SALAH SEMARANG	087700088463	BLOK PARKIR 05	BUAH
34	SARTI	3174046103640004	PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU	085213896663	BLOK PARKIR 06	BUAH
35	ABDULLOH	3602041204870004	JL. MASJID AL MAKHMUR	085772066555	BLOK PARKIR 07	BUAH
36	AHMAD F. NUGROHO	31750504100911003	KALI SARI, PASAR REBO		BLOK C95 / B9F	ARENG
37	SARINI	3322177112530006	DS. GEGUNUNG, SEMARANG		BLOK PARKIR 10	BUAH
38	WUJI	322203540530002	DSN. DUWARI SEMARANG	089633803869	BLOK PARKIR 11	BUAH
39	SITI	3322177112600090	DSN. BRUNGKAH SEMARANG	087876061893	BLOK PARKIR 12	BUAH
40	SRI HANDAYANI	32035001810004	DS. KAIBON SEMARANG	089629621712	BLOK PARKIR 14	BUAH
41	SURATMI	3322036306550001	DSN. TAWANG SUSAJUKAN SEMARANG	081295284547	BLOK PARKIR 15	BUAH
42	SARMI	3174045212640006	JL. MASJID AL FALLAH PASAR MINGGU		BLOK PARKIR 16	BUAH
43	GINANJAR I.G	3174040904860003	PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU	085319177953	BLOK PARKIR 18	BUAH
44	HARTONO	3322173112580012	DS. BRUNGKAH SEMARANG	085218659161	BLOK PARKIR 22	BUAH

LOKASI BINAAN PASAR MINGGU
 JALAN BUNTU
 KECAMATAN PASAR MINGGU
 KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
 TELP. 081806596999

LATITUDE / LONGITUDE : -6,283130, 106,843427
 TITIK KOORDINAT : 6°16'59.3" S 106°50'36.3" E

45	A. BENI S	3174050507730010	JL. RAJAWALI PASAR MINGGU	087786455999	BLOK PARKIR 24	BUAH
46	RIDWAN	3221011605560002	DSN. KARANG SALAM SEMARANG	085313661318	BLOK PARKIR 25	BUAH
47	AMINATUN	3322034505810003	DSN. KARANG SALAM SEMARANG	087700640197	BLOK PARKIR 26	BUAH
48	SARMI	331225309710002	NGASEM LEGI WONOGIRI	025778453054	BLOK A.07	BUAH
49	SAMIASIH	3309024407639001	NGAMPON BOYOLALI	081281720807	BLOK PARKIR 7	BUAH
50	SUYATI	3174047112660007	JL. PEJATEN TIMUR, PS. MINGGU		BLOK PARKIR 87	SAYUR
51	MULYADI ✓	3174040404780004	GANG SOSIAL PASAR MINGGU	081384366550	BLOK PARKIR 85	SAYUR
52	TEGUH SAMHARI	3174042002880010	JL. PEJATEN TIMUR, PS. MINGGU	081314181737	BLOK PARKIR 77	SAYUR
53	SUTRIYATUN	3174045803700003	JATIPADANG PASAR MINGGU	081380234675	BLOK PARKIR 90	SAYUR
54	YATI	3174044112530006	JL. LANGGAR PASAR MINGGU	081281846239	BLOK PARKIR 111	SAYUR
55	RENDRAWATI.	3174046606000004	JL. MASJID AL FALLAH PASAR MINGGU		BLOK PARKIR 34	SAYUR
56	SUMARNO	3174041812650001	GANG SOSIAL PASAR MINGGU	085692398262	BLOK PARKIR 104	SAYUR
57	SUHARNYO	3174041309780018	JL. MASJID AL FALLAH PASAR MINGGU		BLOK PARKIR 35	SAYUR
58	TUKIYEM	3310177112550029	DAMPULAN KLATEN		BLOK PARKIR 132	SAYUR
59	WARSIH	3523095911670002	DSN. KRASAN TUBAN	082131701756	BLOK PARKIR 52	SAYUR
60	SULASTRI	3520166405740001	DUKUH DUWET MAGETAN	085694211648	BLOK PARKIR 53	SAYUR
61	SUPIYAH	3311064504640002	DUKUH TETIS SUKOHARJO		BLOK PARKIR 74	SAYUR
62	WAGINI ✓	3174036607670005	MAMPANG TEGAL PARANG	081284247608	BLOK PARKIR 47	SAYUR
63	DUDU MASDUKI	3273031506660012	JL. RAGUNAN PASAR MINGGU	081315958302	BLOK PARKIR 75	SAYUR
64	RAMAYANA	3276056806610007	KEBON DUREN DEPOK	085716499882	BLOK PARKIR 109	SAYUR
65	SEMI YONATAN	3174040707574002	GANG MAWAR PASAR MINGGU	082111096382	BLOK PARKIR 90	SAYUR
66	GIYANTO	3175040604800004	JL. MASJID AL MAKMUR PASAR MINGGU	081908051588	BLOK PARKIR 69	SAYUR
67	ROFIQ	3523110111820002	JL. MASJID AL MAKMUR PASAR MINGGU	081219299198	BLOK PARKIR 33	SAYUR
68	DWI HARTINI	3174044306690014	GANG MAWAR PASAR MINGGU	081381753587	BLOK PARKIR 32	SAYUR
69	ROSITA MANIURUNG	317406607720002	KOMP. KEJAKSAAN AGUNG		BLOK PARKIR 108	SAYUR
70	SUWARNO	3174041204720002	JATIPADANG PASAR MINGGU	082114174254	BLOK PARKIR 107	SAYUR
71	HARNI	0953044404590439	PASAR MINGGU		BLOK PARKIR 56	SAYUR

LOKASI BINAAN PASAR MINGGU
 JALAN BUNTU
 KECAMATAN PASAR MINGGU
 KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
 Telp. 081806596999

LATITUDE / LONGITUDE : -6.283130, 106.843427
 TITIK KOORDINAT : 6°16'59.3"S 106°50'36.3"E

72	SRIYADI	3312121005810001	GANG MAWAR PASAR MINGGU	087886173126	BLOK PARKIR 66	SAYUR
73	WIWIK ESTIARI ✓	3174045312670004	JL. MASJID AL FALLAH PASAR MINGGU	081212482581	BLOK PARKIR 114	SAYUR
74	NARNI	3310571112630018	GANG SOSIAL PASAR MINGGU		BLOK PARKIR 113	SAYUR
75	SULASTRI	3174044110790008	PEJATEN TIMUR		BLOK PARKIR 73	SAYUR
76	SITI CHODIROH	317404430660001	PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU	087881194948	BLOK PARKIR 81	SAYUR
77	SRI RAHAYU	3523096008820002	JL. RAJAWALI PASAR MINGGU		BLOK PARKIR 96	SAYUR
78	SUPARNI ✓	3174045211790016	PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU	085716498882	BLOK PARKIR 110	SAYUR
79	RASEM	31740468912680009	PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU		BLOK PARKIR 157	SAYUR
80	MAT SAHU	3523090207720001	DS. KEDUNG BANTENG TUBAN	081398067320	BLOK PARKIR 97	SAYUR
81	SADINEM	3276064508510004	JL. KARYA BAKTI DEPOK		BLOK PARKIR 41	SAYUR
82	LERMINA BR MANULANG	3174046512530010	PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU		BLOK PARKIR 147	SAYUR
83	MASNUN	3174044506680015	GANG BIMA PASAR MINGGU	081297294368	BLOK PARKIR 86	IKAN ASIN
84	SUTINI	3523095805760004	MARGOREJO MAGETAN	081218495375	BLOK PARKIR 94	SAYUR
85	SUPARDI	3174042107710008	PASAR MINGGU	085216497634	BLOK PARKIR 43	SAYUR
86	SUNARDI ✓	1740825126000008	JL. KALIBATA PANCORAN		BLOK PARKIR 118	SAYUR
87	PURNOMO	317404011070004	JL. MASJID AL FALLAH PASAR MINGGU	081281855879	BLOK PARKIR 55	SAYUR
88	RASMI	3326104204510001	DS. BASARAN SEAGI PEKALONGAN	087875176800	BLOK PARKIR 83	SAYUR
89	IKAH ✓	3202297112680004	KP. CIRADEN CISAAT SUKABUMI		BLOK PARKIR 100	SAYUR
90	SRIWATI ✓	3523094403670002	DS. PANCO PATENGAN TUBAN		BLOK PARKIR 93	SAYUR
91	SURANTO ✓	0953040311420198	GANG LANGGAR PASAR MINGGU		BLOK PARKIR 107	SAYUR
92	ANDRI SUKMAWATI	3517015803570001	DSN. BULU PURWOSARI JAK-SEL	08563007268	BLOK PARKIR 39	SAYUR
93	PAINI	3521136402630001	KEDUNG MIRI NGAWI	081280805790	BLOK PARKIR 82	SAYUR
94	ARIF SUTANTO	3174042803770009	JL. SIAGA PEJATEN BARAT	081285779666	BLOK PARKIR 40	SAYUR
95	KARTI	3313045902630002	KARANG ANYAR	087774332316	BLOK PARKIR 45	SAYUR
96	WARTINI	3523105207700008	DSN. KRAGAN MONTONG TUBAN	081310765967	BLOK PARKIR 62	SAYUR
97	SARTINI	3523094106730001	DSN. KRAGAN TUBAN		BLOK PARKIR 95	SAYUR
98	MOH RAIS	3506151203730002	PASAR MINGGU		BLOK PARKIR 42	SAYUR

LOKASI BINAAN PASAR MINGGU
 JALAN BUNTU
 KECAMATAN PASAR MINGGU
 KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
 Telp. 081806596999

LATITUDE / LONGITUDE : -6.283130, 106.843427
 TITIK KOORDINAT : 6°16'59.3" S 106°50'36.3" E

99	WARMO ✓	0540604412540501	PASAR REBO JAKTIM			BLOK PARKIR 161	SAYUR
100	SUNARDI ✓	3174041008720014	GANG SOSIAL PASAR MINGGU			BLOK PARKIR 05	SAYUR
101	NGADINO	3221011403630001	JL. SISU DEMAK			BLOK A.154	BUAH
102	DODI	321712050786001	CIPONGKOR BOGOR			BLOK A.165	BUAH
103	DONA AGUSTINA	3175046408780005	JL. GARDU KRAMAT JATI			BLOK B.06	SAYUR
104	MARDIONO ✓	3175042406650001	BALE KAMBANG KRAMAT JATI			BLOK A.186	SAYUR
105	NURYANI	3174046512450004	JL. MASJID AL FALLAH PASAR MINGGU		083811267524	BLOK A.196	WARKOP
106	WARDANA	3174042808890010	JL. MASJID AL FALLAH PASAR MINGGU		081382294170	BLOK A.128	WARKOP
107	ERNAWATI	3174045505790004	JL. LEBAK PEJATEN TIMUR			BLOK A.56	WARKOP
108	HARYATI	3210106427820001	GANG GAYA PASAR MINGGU			BLOK A.157	MAK-MIN
109	SOLIHIN	3174021107620002	MENTENG ATAS MANGGARAI			BLOK A.130	PECEL LELE
110	HUSNI TIJUPUTRA ✓	3171062105490002	JL. KELAPA MOLEK KELAPA GADING			BLOK PARKIR	MINYAK CURAH
111	ABDUL HAMID	3171040103590008	GANG SOSIAL PASAR MINGGU			BLOK B.12	MAK-MIN
112	ANISA PRASETIA	3174044608790012	JL. ASRAMA PASAR MINGGU			BLOK A.182	MAK-MIN
113	MOH SAI	3174043112680041	JL. PASAR MINGGU			BLOK PARKIR 129	MAK-MIN
114	WARTINI	3174084402670006	KALIBATA PANCORAN		087884658663	BLOK A.119	AYAM POTONG
115	SUNARDI	3174041008720014	GANG SOSIAL PASAR MINGGU			BLOK C.05	SAYUR
116	NURYATI	3174046107770001	GANG SOSIAL PASAR MINGGU			BLOK C.08	SAYUR
117	SARTINI	3523094105550001	DS. KRAJAN TUBAN			BLOK PARKIR	SAYUR
118	JOKO A. SUSANTO	3521021205770003	KP. GEDORO NGAWI			BLOK C.01	AYAM POTONG
119	KASORI	3174040910641001	JL. KELAPA MUDA JAGAKARSA			BLOK C.37	AYAM POTONG
120	ABDUL MUKIB	3671122602860005	JL. RADEN SALEH TANGGERANG		081224980719	BLOK A.116	AYAM POTONG
121	SURATMIN	3175053112780011	JL. LEBAK PARA PS REBO			BLOK A.134	BAKSO
122	ZAINUDDIN	3174042110630006	JL. ANGSANA PEJATEN TIMUR			BLOK A.158	BAKSO
123	TUTIK NURWIJAYANTI	3276064508730005	BEI PLADEN DEPOK			BLOK A.99	BUMBU
124	SITI MARYAM	3174045211871001	JL. PEJATEN TIMUR PS MINGGU			BLOK C	SEMBAKO
125	WIJI LESTARI	3174044606770006	JL. PEJATEN TIMUR PS MINGGU			BLOK A.137	BAKSO

LOKASI BINAAN PASAR MINGGU

JALAN BUNTU
 KECAMATAN PASAR MINGGU
 KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

TELP. 081806596999

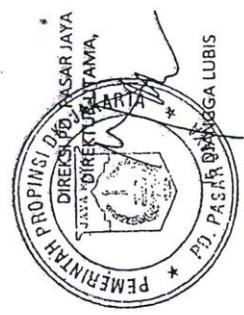
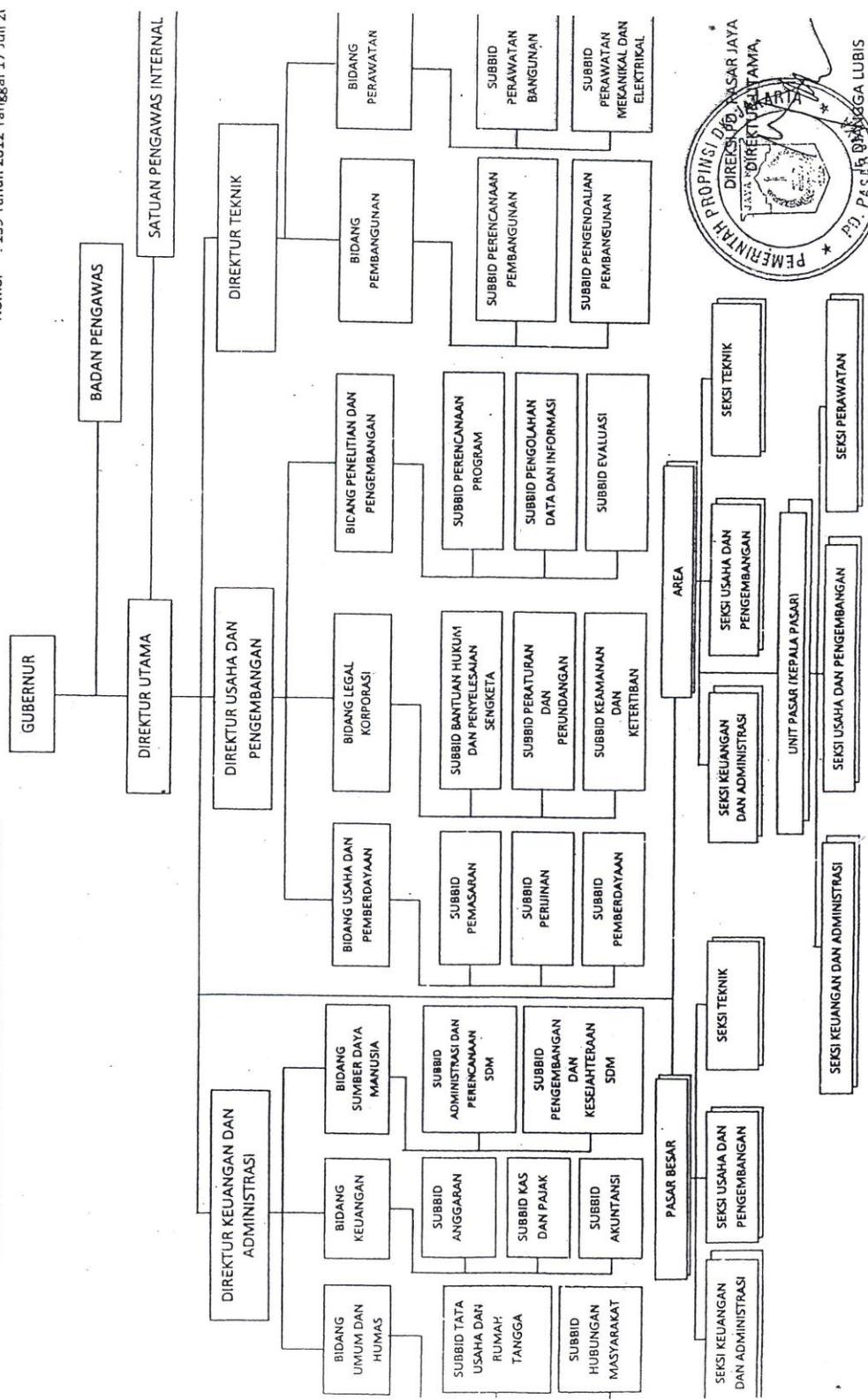
LATITUDE / LONGITUDE : -6.283130, 106.843427

TITIK KOORDINAT : 6°16'59.3"S 106°50'36.5"E

126	SRI YUNIATI	3671124406850009	JL. RADEN SALEH TANGGERANG			BLOK A.153	AYAM POTONG
127	TARTIK ASTRIANI	3174045702770005	GG. BIMA PS. MINGGU		087881567188	BLOK PARKIR 48	AYAM POTONG
128	SURATNO	3174040101590018	GG. MAWAR PS. MINGGU			BLOK A.136	BAKSO
129	MOH. ZAINUDIN	3171063112550005	JL. MATRAMAN JAK-PUS			BLOK PARKIR	LANGSAM
130	ARIAWI	36204020181002	KP. NANGGERANG BANTEN		081932069481	BLOK PARKIR 08	BUAH
131	YANTO	3201161811820002	KP. TUTUL CIRATEJUNILUR BOGOR			BLOK A.60	BUAH
132	SAMI ASIH	3309024407635001	IN-CAMPON JA-TIM BOYOLALI			BLOK PARKIR 17	BUAH
133	SUPINAH	3174046506770003	JL. KETAPANG PS. MINGGU		087883998383	BLOK A.181	MAK-MIN
134	ABDUL HAMID	3527032812780006	JL. JEMBATAN KRAMAT JATI		087878496425	BLOK A.183	MAK-MIN
135	MAISAROH	352703410778282961	JL. JEMBATAN KRAMAT JATI		087849993961	BLOK A.184	MAK-MIN
136	FATKHULLOH	3172062407790003	JL. PEGANGSAAN KLP GADING			BLOK A.179	MAK-MIN
137	SUGIARNO	3174041104790010	JL. LEBAK PS. MINGGU			BLOK PARKIR 134	SEMBAKO
138	KHAIRODDIN	3174040606690010	GG. GAYA PS. MINGGU			BLOK PARKIR	MAK-MIN
139	SUMADI	3309105090478003	JL. PERAIRAN PS REBO			BLOK A.120	WAR-KOP
140	UNDIWATI	3174044109620006	JL. SAMALI PS MINGGU			BLOK PARKIR	MAK-MIN
141	WAWAN	3201401001940003	KP. PASIR TANJOLAYA BOGOR			BLOK A.68	
142	SWARTININGSIH	3315076002730002	DSN. PULOREJO GROBOKAN			BLOK PARKIR	

Lampiran : Peraturan Direksi PD. Pasar Jaya
 Nomor : 139 Tahun 2012 Tanggal 17 Juli 21

SUSUNAN ORGANISASI PD PASAR JAYA PROVINSI DKI JAKARTA



REKAPITULASI DATA TEMPAT USAHA
UNIT PASAR BESAR PASAR MINGGU

NO	URAIAN	TYPE TEMPAT USAHA	JUMLAH TEMPAT USAHA						AKTIF						BATUKOSONG PD. PASAR JAYA					
			LT. BASEMENT	LT. DASAR	LT. SATU	LT. DUA	LT. TIGA	TOTAL	LT. BASEMENT	LT. DASAR	LT. SATU	LT. DUA	LT. TIGA	TOTAL	LT. BASEMENT	LT. DASAR	LT. SATU	LT. DUA	LT. TIGA	TOTAL
1	BLOK B	KIOS	-	311	348	55	-	714	-	311	287	46	-	644	-	-	61	9	-	70
		COUNTER	-	-	-	162	-	162	-	-	-	105	-	105	-	-	-	57	-	57
		LOS	-	40	-	-	40	40	-	35	-	-	-	35	-	-	-	-	5	
		TENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah		-	351	348	217	-	916	-	346	287	151	-	784	-	5	64	66	132	
2	BLOK C	KIOS	-	7	1	-	-	8	-	7	1	-	-	8	-	-	-	-	-	
		COUNTER	115	114	-	-	229	229	115	76	-	-	-	191	-	38	-	-	38	
		LOS	154	-	-	-	154	154	153	-	-	-	-	153	-	-	-	-	1	
		TENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah		269	121	1	-	391	391	268	83	1	-	-	352	1	38	-	-	39	
3	BLOK D	KIOS	-	248	282	-	530	530	-	248	280	-	-	528	-	-	-	-	2	
		COUNTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah		-	248	282	-	530	530	-	248	280	-	-	528	-	-	2	-	2	
4	BLOK E	KIOS	-	81	1	-	82	82	-	81	1	-	-	82	-	-	-	-	-	
		COUNTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah		-	81	1	-	82	82	-	81	1	-	-	82	-	-	-	-	-	
5	BLOK F	KIOS	-	51	6	5	68	68	-	51	4	-	-	55	-	-	2	6	13	
		COUNTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah		-	51	6	5	68	68	-	51	4	-	-	55	-	-	2	6	13	
	TOTAL		269	852	638	223	5	1.987	268	809	573	151	-	1.801	1	43	65	72	5	186

Keanginan
Rincian 539
204
308
E/K 89

JAKARTA, FEBRUARI 2015
MANAGER UPB. PASAR MINGGU
BENYAMIN MANIK, S.Sos
NPP. 3650

RIWAYAT HIDUP



Devi Tri Liana lahir di Jakarta pada 7 Desember 1992. Devi telah menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN Jati Padang 03 Pagi pada tahun 2005. Melanjutkan, Pendidikan Menengah Pertama pada tahun 2008 di SMPN 227 Jakarta, dan Pendidikan Menengah Atas di SMA SULUH Jakarta pada tahun 2011. Selama SD Devi aktif dalam kegiatan volly hingga mengikuti pertandingan volly tingkat Kecamatan Pasar Minggu. SMP dan SMA, Devi aktif di dalam kegiatan paskibra 227 dan Volly SMA SULUH. Pada tahun yang sama Devi memasuki jenjang pendidikan di Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Sosiologi. Selama menjadi mahasiswa sosiologi, Devi aktif dalam mengikuti organisasi mahasiswa jurusan yaitu BEMJ Sosiologi bagian staff infokom.

Devi telah melakukan beberapa penelitian, yaitu pertama, di Jalan Raya Ragunan Gang Bima Jaya RT 003/RW 04 dengan fokus pada bergesernya pendayagunaan lahan sebagai akibat adanya lahan kosong yang berubah menjadi kontrakan di area sub-urban untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi akibat berubahnya lahan kosong menjadi rumah kontrakan melalui mata kuliah Teori Perubahan Sosial. Selanjutnya, penelitian pada mata kuliah Sosiologi Perkotaan yang dilakukan untuk mengetahui identitas dari komunitas tato yang diberi nama “masberto (masyarakat bertato)” yang berada di daerah Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, melakukan penelitian mengenai masyarakat desa khususnya perempuan yang bekerja sebagai pengepur dan pengangkut batu di desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat melalui mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Lalu penelitian di Baduy melalui mata kuliah ekologi sosial, guna melihat kehidupan sosial masyarakat Baduy. Setelah itu, Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah, dengan fokus pada perilaku menyimpang dan terakhir penelitian di Sleman, Jogjakarta untuk mengetahui orientasi pendidikan perempuan di Dusun Karanggeneng Desa Purwobinangun.

Email: lianadevivi@gmail.com atau 082110925141